

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 8
PACITAN**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj.IP ini merupakan salah satu bentuk / media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pacitan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan selama Tahun Anggaran 2016, dan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 diatas, Inpektorat Kabupaten Pacitan selalu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja ini sehingga diharapkan laporan ini dapat menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 ini diharapkan dapat terwujud optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten



Pacitan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja utamanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pacitan, Maret 2017

BUPATI PACITAN

INDARTATO



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP). Dalam rangka mencukupi kewajiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Pacitan berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKj.IP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) memiliki dua fungsi utama sekaligus, yaitu :

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pelaksanaan RPJMD.

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.



Matrik sasaran strategik yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah 19 (Sembilan belas) sasaran strategik dari 9 (sembilan) tujuan strategik atas 6 (enam) misi untuk mencapai visi.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan disusun menurut klasifikasi sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata pada tahun 2016 sebesar 125,99%. Capaian kinerja ini termasuk dalam kategori "SANGAT BAIK". Apabila dibanding dengan tahun sebelumnya pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,66%.

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.649.390.896.801,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.527.531.210.970,59 kurang dari target sebesar Rp. 121.859.685.830,41 atau mencapai 92,61%.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategik tersebut terutama disebabkan karena :

-) Pemahaman dan komitmen berbagai lapisan dan komponen masyarakat serta aparatur yang relatif belum merata mengenai berbagai kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.
-) Kondisi perekonomian nasional yang fluktuatif yang mempengaruhi sendi – sendi perekonomian dan pembangunan daerah.

Peningkatan dan perbaikan kinerja akan terus dilakukan dengan cara meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yang diemban dalam bentuk :

-) Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik, saran dan informasi agar dalam pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah.



- J) Koordinasi, informasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan masing – masing unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan acuan dalam perumusan arah kebijakan pemerintah kabupaten yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik.
- J) Meningkatkan peran serta lembaga – lembaga masyarakat dan swasta dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sehingga kegiatan pembangunan akan mampu menumbuhkembangkan kreativitas dan partisipasi masyarakat Kabupaten Pacitan untuk mandiri, maju dan semakin sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Surat Pernyataan Reviu	iii	
Ikhtisar Eksekutif	iv	
Daftar Isi	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud Dan Tujuan	3
	C. Dasar Hukum	4
	D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan	6
	E. Struktur Organisasi	17
	F. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015	22
BAB II	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN 2011-2016	23
	A. Visi	24
	B. Misi	25
	C. Rencana Strategis	29
	D. Rencana Kinerja	30
	E. Perjanjian Kinerja	31
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	33
	A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016	33
	B. Akuntabilitas Keuangan	202
BAB IV	PENUTUP	233
LAMPIRAN		
	1. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pacitan	
	2. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016	
	3. Penetapan Kinerja Tahun 2016	
	4. Pengukuran Kinerja Tahun 2016	
	5. Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2016	
	6. Daftar Penghargaan (Hasil Capaian Kinerja) Yang Diterima Oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan



untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; penyusunan LKj.IP Tahun 2016 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana telah dirangkum dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan dan penetapan/perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKj.IP Kabupaten Pacitan menjadi laporan kemajuan



penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Realisasi yang dilaporkan dalam LKj.IP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2016 yaitu tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres tersebut memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi misi dan tujuan stratejik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 kepada seluruh stakeholders.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan selama Tahun Anggaran 2016;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2016, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang;



- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
20. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
24. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 tahun 2016 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016;



D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

D.1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Timur yang berada di bagian Barat Daya Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan terletak di antara 07° 55' - 08° 17' Lintang Selatan 110° 55' - 111° 25' Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.389,8716 Km² atau 138.987,16 Ha, yang sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang terjal.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

-) Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
-) Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
-) Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
-) Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,61 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu luas 71,86 Km².

Kondisi topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Datar (kelas kelerengannya 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- b) Berombak (kelas kelerengannya 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- c) Bergelombang (kelas kelerengannya 11-30%) dengan luas 333,57 Km² atau 24 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- d) Berbukit (kelas kelerengannya 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- e) Bergunung (kelas kelerengannya > 52%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.



Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Januari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm³, suhu udara berkisar antara 22,6°C sampai dengan 32,1 °C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 Ha
- Pemukiman Penduduk : 4,43% atau 6.157,33 Ha
- Hutan : 57,13% atau 79.397,00 Ha
- Sawah : 9,00% atau 12.509,26 Ha
- Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 Ha

1. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan selama 5 Tahun terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016

NO	UMUR	TAHUN 2016						KET
		L	%	P	%	JUMLAH	%	
1	0-4Thn	12049	4.14	11306	3.94	23355	4.04	
2	5-9Thn	19385	6.67	18275	6.37	37660	6.52	
3	10-14Thn	19351	6.66	18127	6.32	37478	6.49	
	0-14 Thn	50785	17.47	47708	16.62	98493	17.05	
4	15-19Thn	19706	6.78	18415	6.42	38121	6.60	
5	20-24Thn	22279	7.66	20555	7.16	42834	7.41	
6	25-29Thn	21024	7.23	20008	6.97	41032	7.10	
7	30-34Thn	22709	7.81	21641	7.54	44350	7.68	
8	35-39Thn	19628	6.75	18812	6.56	38440	6.65	
9	40-44Thn	20660	7.11	21497	7.49	42157	7.30	
10	45-49Thn	22803	7.84	23171	8.07	45974	7.96	
11	50-54Thn	21301	7.33	22167	7.72	43468	7.52	
12	55-59Thn	19064	6.56	19918	6.94	38982	6.75	
13	60-65Thn	18645	6.41	17442	6.08	36087	6.25	
	15-65 Thn	207819	71.48	203626	70.96	411445	71.22	
	66 Thn keatas	32143	11.06	35644	12.42	67787	11.73	
	JUMLAH	290.747	100	286.978	100	577.725	100	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan



Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan jumlah penduduk akhir tahun 2016 mencapai 577.725 jiwa terdiri atas 290.747 jiwa penduduk laki – laki dan 286.978 jiwa penduduk perempuan.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15 tahun – 64 tahun) jumlahnya sebesar 411.445 jiwa atau mencapai 71,22% total penduduk yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat)..

Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016

No	Lapangan Usaha	Jumlah	%
1	PERTANIAN / PERKEBUNAN	207,567	35.93
2	PERIKANAN / KELAUTAN	1,373	0.24
3	PERTAMBANGAN / INDUSTRI	235	0.04
4	PERDAGANGAN	4,182	0.72
5	ANGKUTAN / TRANSPORTASI	982	0.17
6	BANK / PERSEWAAN / PERUSAHAAN	145,327	25.16
7	JASA / JASA	1,393	0.24
8	PEMERINTAHAN	11,229	1.94
9	KESEHATAN	273	0.05
10	PENDIDIKAN	2,445	0.42
11	KEAGAMAAN	54	0.01
12	LAIN-LAIN	202,665	35.08
	-PENSIUNAN	4,406	0.76
	-BELUM / TIDAK BEKERJA	83,972	14.53
	-MENGURUS RUMAH TANGGA	35,391	6.13



	-PELAJAR / MAHASISWA	78,896	13.66
	JUMLAH	577,725	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian/ perkebunan adalah yang terbesar daripada lapangan usaha lain yang ada di Kabupaten Pacitan mencapai 35,95%. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa angkutan, dimana hal ini juga membentuk sektor usaha perbankan yang mendukung pembiayaan sektor usaha juga ikut berkembang.

Sumberdaya Manusia yang berkualitas adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sanggup menampung produktivitas sektor pendidikan sehingga terjadi dinamika yang seimbang antara pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan laju sektor ekonomi. Bidang pendidikan khususnya guru mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas. Tingkat produktifitas dan kompetensi anak didik seseorang sangat ditentukan oleh kualitas pendidik yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	BELUM SEKOLAH	95.809	16.58
2	TIDAK TAMAT SD	44.395	7.68
3	TAMAT SD	232.601	40.26
4	SLTP	110.015	19.04
5	SLTA	74.686	12.93
6	DIPLOMA II	2.911	0.50
7	DIPLOMA III	2.176	0.38
	S I, II, III	15.132	2.62
8	STRATA I	14.505	2.51
9	STRATA II	605	0.10
10	STRATA III	22	0.00
	JUMLAH	577.725	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan



2. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan secara umum dari berbagai komoditi Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pertanian, meliputi komoditi ubi kayu, jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, pisang, jeruk siam / keprok;
2. Tanaman perkebunan, meliputi komoditi kelapa, cengkeh, kopi, kakao, lada, panili, melinjo, jahe, kunyit, laos, temu lawak, kencur, janggolan, aren, kapas, jarak pagar, nilam;
3. Ternak, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam broiler, ayam ras petelur dan itik/entok;
4. Kehutanan, meliputi jati, mahoni, sengon laut, akasia, pinus, sono dan bambu;
5. Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - a. Batubara
 - b. Mineral logam : timah putih, nikel, timah hitam, mangaan, tembaga, seng, emas, pasir besi, batu besi
 - c. Mineral bukan logam : batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, fosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophyllit, fosil kayu, kalsedon/ agate, kristal kuarsa, rijang, jasper
 - d. Batuan : ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, lempung/ tanah liat
6. Pariwisata, sebagaimana tabel berikut :

Tabel Potensi Pariwisata di Kabupaten Pacitan Tahun 2016

No.	Jenis Wisata	Lokasi		Jarak dari Pusat Kota
1.	Wisata Pantai	Pantai Teleng Ria	Kel. Sidoharjo, Kec.Pacitan	3 Km
		Pantai Watukarung	Desa watukarung, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Segara Anakan	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	30 Km
		Pantai Tamperan	Kel. Sidoharjo, Kec.Pacitan	3 Km
		Pantai Srau	Desa candi, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Taman	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	32 Km
		Pantai Wawaran	Desa Sidomulyo, Kec. Kebonagung	15 Km



No.	Jenis Wisata	Lokasi		Jarak dari Pusat Kota
		Pantai Klayar	Desa Widoro, Kec. Donorojo	53 Km
		Pantai Dhaki	Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro	48 Km
		Pantai Buyutan	Desa Widoro, Kec. Donorojo	45 Km
		Pantai Pancer Door	Kel. Ploso, Kec. Pacitan	3 Km
		Pantai Kali Wuluh	Desa Klesem, Kec. Kebonagung	20 Km
		Pantai Soge	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	28 Km
		Pantai Pidakan	Desa Jetak, Kec. Tulakan	25 Km
2.	Wisata Goa	Goa Tabuhan	Desa Wareng, Kec. Punung	40 Km
		Goa Gong	Desa Bomo, Kec. Punung	30 Km
		Goa Putri	Desa Kendal, Kec. Punung	29 Km
3.	Wisata Sejarah / Budaya	Monumen Panglima Besar Jendral Soedirman	Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan	50 Km
		Monumen Tumpak Rinjing	Desa Dadapan, Kec. Pringkuku	12 Km
4.	Wisata Rekreasi	Pemandian Air Hangat	Desa Karangrejo, Kec. Arjosari	15 Km

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

7. Kelautan dan Perikanan, sebagaimana berikut :

Potensi unggulan kelautan dan perikanan Kabupaten Pacitan, terdiri dari: Tuna, Cakalang, Tongkol, Layur, Manyung, Lemuru, Tengiri, Rebon, Cucut, Pari, Kembung, Tiga waja, Teri, Kakap Merah, Kuwe, Pisang-pisang, Julung-julung, Marlin, Sebelah, Bawal Hitam, Layang, Cucut Martil, Bawal putih, Lemadang, Kuniran, Golok-golok, Lobster, Lele dan Nila

8. Perdagangan, sebagaimana berikut :

Aspek perdagangan didukung melalui ketersediaan Pasar Daerah, sejumlah 18 buah dengan rincian di masing – masing kecamatan sebagai berikut : Donorojo 1 buah, Punung 2 buah, Pringkuku 1 buah, Pacitan 4 buah, Arjosari 1 buah, Nawangan 1 buah, Bandar 2 buah, Tegalombo 1 buah, Tulakan 2 buah, Ngadirojo 2 buah dan Sudimoro 1 buah.

9. Perindustrian, sebagaimana tabel berikut :

Tabel Potensi Perindustrian di Kabupaten Pacitan Tahun 2016

No.	Uraian	Lokasi
1.	Batu Aji/Akik	Donorojo, Punung, Nawangan, Tulakan
2.	Gula merah	Kebonagung, Donorojo, Tulakan



No.	Uraian	Lokasi
3.	Keramik dan Gerabah Seni	Kebonagung
4.	Batik Tulis	Ngadirojo, Pacitan
5.	Batu Bata	Kebonagung, Pacitan, Ngadirojo
6.	Kapur Tohor	Kebonagung
7.	Industri Makanan Olahan	Pacitan, Ngadirojo, Tulakan, Arjosari, Tegalombo Pringkuku, Punung
8.	Meubelair	Kec. Pacitan
9.	Anyaman bambu	Kec. Nawangan, Arjosari

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pertumbuhan ekonomi/ Pendapatan Domestik Regional Brutto Kabupaten Pacitan tahun 2016, disajikan pada tabel berikut :

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan
Tahun 2015 - 2016

NO	URAIAN	TAHUN	
		2015*	2016**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,40
2	PDRB ADHK (juta Rp.)	11.590.629,7	12.395.467,32
3	PDRB ADHB (juta Rp.)	9.019.541,2	9.650.908,55
4	Penduduk Miskin (%)	16,68	16,38
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,97	1,08
6	Laju Inflasi (dari harga konsumen) (%)	3,45	3,75
7	Pendapatan per kapita (rupiah)	21.063.160	21.427.835,81
8	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	71,05	75,35
9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,88	7,47
10	Angka Melek Huruf P15 Tahun + (%)	91,86	91,87
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,92	64,44

Sumber : Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

*) = Angka diperbaiki

***) = Angka Proyeksi.



Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Angka Sementara Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015. Angka Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,40% sedangkan tahun 2015 mencapai 5,1%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian seiring dengan meningkatnya stabilitas politik serta peluang sektor ekonomi ke arah positif. Berdasarkan tabel tersebut di atas, nampak pada tahun 2015 jumlah PDRB kabupaten pacitan atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 9.019,54 milyar dan meningkat menjadi Rp. 9.650,90 milyar pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 6,99%. Sedangkan PDRB Kabupaten Pacitan atas dasar harga konstan tahun 2015 mencapai Rp. 11.590,63 milyar dan meningkat menjadi Rp. 12.395,46 milyar pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 6,94%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2015 mencapai 5,1% dan mengalami peningkatan sampai tahun 2016 mencapai 5,40%, hal tersebut dikarenakan agregat output per sektor mengalami pertumbuhan yang positif.

Jumlah penduduk miskin dengan kondisi tahun 2015 sejumlah 16,68% dari total jumlah penduduk dan menurun pada tahun 2016 mencapai 16,38% atau mengalami penurunan sebesar 0,30%.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pacitan tahun 2015 mencapai 0,97% dan meningkat pada tahun 2016 mencapai 1,08%, hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari pihak swasta yang mengurangi jumlah pekerja (PHK) sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat pacitan kehilangan mata pencaharian.

Inflasi dari harga konsumen Kabupaten Pacitan tahun 2015 sebesar 3,45%, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 3,75% atau mengalami peningkatan sebesar 0,30%.

PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan tahun 2015 mencapai Rp. 21.063.160 dan meningkat menjadi Rp. 21.427.835,81 pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 1,73%.

Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2015 mencapai 71,05 dan turun menjadi 75,35 pada Tahun 2016.



Angka rata - rata Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2015 mencapai 6,88 dan meningkat menjadi 7,47 pada Tahun 2016 atau meningkat sebesar 0,59.

Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2015 mencapai 91,86 dan meningkat menjadi 91,87 pada Tahun 2016 atau meningkat sebesar 0,01.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan tahun 2015 mencapai 64,92 dan menurun menjadi 64,44 pada tahun 2016 atau menurun sebesar 0,4

➤ PDRB ADHK

PDRB ADHK merupakan pertumbuhan riil yang tidak terpengaruh oleh kenaikan harga atau inflasi. PDRB ADHK tahun 2015 mencapai Rp.9.019.541.200.000 meningkat pada tahun 2016 mencapai Rp. 9.650.908.550.000 adapun perkembangan PDRB ADHK tahun 2015-2016 sebagaimana tabel berikut :

Tabel PDRB ADHK Kabupaten Pacitan
Tahun 2015 - 2016 (dalam juta)

NO	SEKTOR	2015*	%	2016**	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.484.704,5	27,55	2.658.633	27,55
2	Pertambangan dan Penggalian	536.233,4	5,95	573.769,74	5,95
3	Industri Pengolahan	613.227,2	6,80	656.153,10	6,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.479,3	0,04	3.722,85	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.423,3	0,09	9.012,93	0,09
6	Konstruksi	1.296.581,9	14,38	1.387.342,63	14,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.550.261,9	17,19	1.658.780,23	17,19
8	Transportasi dan Pergudangan	212.355,9	2,35	227.220,81	2,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	181.391,8	2,01	194.089,23	2,01
10	Informasi dan Komunikasi	585.031,5	6,49	625.983,71	6,49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	171.684,9	1,90	183.702,74	1,90
12	Real Estate	150.791,4	1,67	161.346,80	1,67
13	Jasa Perusahaan	25.374,7	0,28	27.150,93	0,28



NO	SEKTOR	2015*	%	2016**	%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	407.008,7	4,51	435.499,31	4,51
15	Jasa Pendidikan	448.614,8	4,97	480.017,84	4,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.442,9	0,99	95.703,90	0,99
17	Jasa Lainnya	254.932,8	2,83	272.778,10	2,83
	JUMLAH	9.019.541,20	100,00	9.650.908,55	100,00

Ket : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa, PDRB ADHK Kabupaten Pacitan didominasi dari sektor pertanian yang mencapai 27,52%; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,19%; Bangunan/ konstruksi 14,38%; Industri Pengolahan 6,80%; Informasi dan Komunikasi 6,49%; Pertambangan dan Penggalian 5,95%; Jasa Pendidikan 4,97%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,51%; Jasa Lainnya 2,83%; Transportasi dan Pergudangan 2,35%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,01%; Jasa Keuangan dan Asuransi 1,90%; Real Estate 1,67%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,99%; Jasa Perusahaan 0,28%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,09%; Pengadaan Listrik dan Gas 0,04%

➤ PDRB ADHB

PDRB ADHB merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu. Adapun capaian PDRB ADHB masing masing sektor di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 - 2016 sebagaimana tabel berikut :

Tabel PDRB ADHB Kabupaten Pacitan
Tahun 2015 - 2016 (dalam juta)

NO	SEKTOR	2015*	%	2016 **	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.528.940,3	30,45	3.775.966,01	30,46



NO	SEKTOR	2015*	%	2016 **	%
2	Pertambangan dan Penggalian	680.996,6	5,88	728.666,36	5,88
3	Industri Pengolahan	763.115,1	6,58	810.360,22	6,54
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.313,2	0,03	3.211,93	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.430,7	0,09	11.160,85	0,09
6	Konstruksi	1.719.985,4	14,84	1.840.384,38	14,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.866.552,9	16,10	1.997.211,60	16,11
8	Transportasi dan Pergudangan	248.439,3	2,14	265.829,94	2,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	232.249,3	2,00	248.506,75	2,00
10	Informasi dan Komunikasi	624.696,6	5,39	668.425,36	5,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	227.866,5	1,97	243.817,16	1,97
12	Real Estate	177.963,9	1,54	190.421,37	1,54
13	Jasa Perusahaan	30.877,4	0,27	33.038,82	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	483.780,4	4,17	517.645,03	4,18
15	Jasa Pendidikan	569.116,5	4,91	608.954,66	4,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106.613,7	0,92	114.076,66	0,92
17	Jasa Lainnya	315.691,8	2,72	337.790,23	2,73
	JUMLAH	11.590.629,7	100,00	12.395.467,32	100,00

Ket : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa, PDRB ADHB Kabupaten Pacitan didominasi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 30,46%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16,11%; Konstruksi 14,85%; Industri Pengolahan 6,54%; Pertambangan dan Penggalian 5,88%; Informasi dan Komunikasi 5,39%; dan Jasa Pendidikan 4,91%.



E. Struktur Organisasi

Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Dengan kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku di bidang kelembagaan pemerintah daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan meliputi Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada bulan Desember 2007 telah ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan



E.1. Sekretariat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Asisten terdiri dari :
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Asisten Administrasi Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

E.1.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Kerjasama dan Perbatasan;
- c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

E.1.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Bagian Administrasi Perekonomian;
- c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
- d. Bagian Pengolah Data Elektronik.

E.1.3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum.



E.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

E.3. Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibentuk Dinas Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012). Pemerintah Kabupaten Pacitan terdiri dari 14 Dinas Daerah yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 4) Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- 5) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- 6) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- 7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 9) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
- 10) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 12) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 13) Dinas Pertambangan dan Energi;



- 14) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

E.4. Lembaga Teknis Daerah

Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibentuk lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012), ada 14 lembaga teknis daerah yaitu :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 5) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- 6) Badan Kepegawaian Daerah;
- 7) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
- 8) Inspektorat;
- 9) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 10) Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
- 11) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- 12) Kantor Lingkungan Hidup;
- 13) Kantor Ketahanan Pangan;
- 14) Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada bulan Desember 2010 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan.



Sehingga secara keseluruhan terdapat 15 lembaga teknis daerah, 14 dinas daerah dan 2 sekretariat sehingga total ada 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pacitan.

E.5. Kecamatan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dalam wilayah kecamatan. Di Kabupaten Pacitan memiliki 12 kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Pacitan
- 2) Kecamatan Arjosari
- 3) Kecamatan Tegalombo
- 4) Kecamatan Nawangan
- 5) Kecamatan Bandar
- 6) Kecamatan Pringkuku
- 7) Kecamatan Punung
- 8) Kecamatan Donorojo
- 9) Kecamatan Kebonagung
- 10) Kecamatan Tulakan
- 11) Kecamatan Ngadirojo
- 12) Kecamatan Sudimoro

E.6. Kelurahan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan, tugas pokok dan fungsi kelurahan adalah membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan. Di Kabupaten Pacitan terdapat 5 (lima) kelurahan yaitu :

- 1) Pacitan,
- 2) Pucangsewu,
- 3) Sidoharjo,
- 4) Ploso,



5) Baleharjo.

F. Sistematika LAKj.IP Tahun 2016

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan selama 5 tahun yaitu tahun 2011-2016. Capaian kinerja (performance result) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya faktor-faktor yang menyebabkan kinerja (performance) tidak tercapai ataupun kinerja yang berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Sistematika penulisan yang dipakai dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKj.IP) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan
- E. Struktur Organisasi
- F. Sistematika LKj.IP Tahun 2016

BAB II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016

- A. Visi
- B. Misi
- C. Rencana Strategis
- D. Rencana Kinerja
- E. Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016
- B. Realisasi Keuangan Tahun 2016

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita Pemerintah Kabupaten Pacitan. Kewajiban menyusun perencanaan strategik diatur di dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dokumen perencanaan strategik Kabupaten Pacitan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 telah mengalami revisi / perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, perubahan tersebut merupakan hasil dari evaluasi terhadap capaian kinerja melalui hasil analisis dan rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pacitan serta dalam upaya mengakomodir regulasi-regulasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian dengan diterbitkannya Standar Pelayanan Minimal pada beberapa bidang dan urusan yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh pemerintah daerah pada khususnya sehingga perubahan perencanaan jangka menengah pemerintah Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan baik indikator maupun target-target yang akan dicapai, perubahan perencanaan jangka menengah tersebut disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun kedepan serta penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintahan. Dengan adanya perubahan RPJMD tersebut otomatis Indikator Kinerja Utama Pemerintah kabupaten Pacitan juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan perubahan



RPJDM dimaksud, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan yang telah dirumuskan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA ”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Pacitan secara terpadu.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

“MASYARAKAT PACITAN” : adalah sekelompok orang yang hidup bersama di Kabupaten Pacitan dalam satu komunitas yang teratur

“SEJAHTERA” : adalah tatanan kehidupan masyarakat Pacitan yang terpenuhinya kebutuhan dasar meliputi antara lain ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, derajat pendidikan, dan daya beli masyarakat, hal tersebut selaras visi RPJMN dan RPJM Provinsi Jawa Timur



Kinerja pembangunan daerah yang ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas, yang secara langsung berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan dan didedikasikan untuk sebesar-besarnya menjamin terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat, yang hasilnya dapat didistribusikan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan secara adil, transparan dan akuntabel

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Pemerintah Kabupaten Pacitan dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Pacitan Sejahtera", maka ditetapkan misi Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

1. Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat ;
4. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan;
5. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar



6. Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

Makna dari misi tersebut adalah :

Misi 1 : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Misi ini dimaksudkan agar birokrasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di setiap instansi pemerintah dengan mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak dasar rakyat untuk memperoleh akses kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai pemerataan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih ditekankan pada akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah pada kualitas prestasi anak didik. Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru serta peningkatan sarana penunjang belajar.

Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, komponen standar hidup layak diukur dengan indikator PDRB per kapita riil yang telah disesuaikan. Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong



stabilitas perekonomian daerah sementara ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar pemerintah kabupaten ke depan adalah terciptanya kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan masyarakat.

Perkembangan perekonomian daerah diukur dengan menggunakan tolok ukur pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), hal ini dapat digunakan untuk mengukur intensitas kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Pacitan.

Misi 5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

Misi ini dimaksudkan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang atau jasa berupa jalan, jembatan, pasar, informasi dan telekomunikasi yang keseluruhannya akan menunjang akses perekonomian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur irigasi sebagai penunjang produksi pertanian, penyediaan air bersih maupun listrik guna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Misi 6 : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

Misi ini dimaksudkan untuk membangun karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur dalam tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib dan damai didukung stabilitas pemerintahan, politik dan sosial budaya.

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan tersebut maka disusunlah peta keterkaitan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:



Tabel

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pacitan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA		
MISI I : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional	1. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	J Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya
	2. Tercapainya SPM daerah	J Presentase SPM yang mencapai target
	3. Terselenggaranya Pelayanan Prima	J Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan	1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	J Opini audit: WTP (wajar tanpa pengecualian)
MISI II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat	1. Terwujudnya perilaku hidup sehat	J Presentase penduduk yang menggunakan jamban J Presentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
	2. Terciptanya lingkungan sehat	J Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU J Skor evaluasi adipura
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan	J Usia harapan hidup
	2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	J Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Mempermudah akses pendidikan	1. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil: J - SD/MI J - SMP/MTs
	2. Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	J Angka rata-rata lama sekolah
2. Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Meningkatnya pelayanan pendidikan	J Angka melek huruf J Angka kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
MISI IV : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah	1. Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	J Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif
	2. Ketersediaan pangan daerah	J Penguatan cadangan pangan
	3. Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	J Presentase koperasi aktif J Jumlah UMKM
	4. Pemasaran komoditas daerah	J Omset penjualan komoditas unggulan



MISI V : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	1. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	<ul style="list-style-type: none">)] Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik <ul style="list-style-type: none"> - Jalan - jembatan)] jumlah terminal bis/sub terminal)] jumlah rumah tangga pengguna listrik
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar)] Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
MISI VI : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, berbudi luhur dan damai	1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	<ul style="list-style-type: none">)] Angka kriminalitas yang ditangani)] Indeks pembangunan manusia (IPM)
	2. Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none">)] Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar)] Persentase kader bina ketahanan keluarga

C. Rencana Strategis

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra (RPJMD) akan dicapai dengan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut berupa Kebijakan dan Program. Upaya – upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra tersebut bukan merupakan suatu hal yang mutlak tetapi berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk memaksimalkan usaha - usaha pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra (RPJMD) didasari asumsi – asumsi kondisi makro dan kondisi regional pada saat penyusunannya serta prediksi selama lima tahun kedepan. Karena itu seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika pembangunan yang ada ditengah masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan dilaksanakannya berbagai upaya lain dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perbaikan kebijakan, pengembangan program, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak maupun aransemen kelembagaan.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pacitan di dalam Dokumen Renstra (RPJMD) selengkapnya dituangkan dalam formulir perencanaan strategik (Lampiran I : Form RS / Rencana Strategis)



D. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara perencanaan strategik dengan penganggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, ketersediaan dana/anggaran serta hasil capaian kinerja yang lalu berdasarkan koridor yang telah digariskan dalam Dokumen Renstra. Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan, sehingga melalui proses ini diharapkan seluruh target pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilaksanakan sesuai agenda pembangunan yang telah disusun. Rencana Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintahan tahun 2016 perencanaannya berdasarkan Perubahan RPJMD 2011 - 2016 (Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016). Program - program yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD yang telah ditetapkan dalam:

1. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
2. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016;

Peraturan Bupati tentang RKPD dan perubahannya tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan, melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai berikut

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
3. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
4. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;



5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 tahun 2016 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016;

Untuk mengimplementasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 mencakup 194 program dan 877 kegiatan, dengan rincian Urusan Wajib 155 program dan 767 kegiatan sedangkan untuk Urusan Pilihan sebanyak 39 program dan 110 kegiatan.

Perencanaan kinerja masing – masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam tahun 2016 selengkapnya dituangkan dalam formulir rencana kinerja (Lampiran II : Rencana Kinerja Tahun 2016)

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.



Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran yang dimulai dari Musrenbang, penyusunan RKPD, penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD yang disahkan menjadi Peraturan Daerah

Dokumen penetapan kinerja tersebut disusun setelah APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD. Di tingkat SKPD dokumen penetapan kinerja disusun oleh Kepala SKPD paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran diserahkan untuk dilaksanakan, yang berisi janji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), di tingkat Kabupaten dokumen penetapan kinerja disusun oleh Bupati untuk disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perjanjian Kinerja masing – masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam tahun 2016 selengkapnya dituangkan dalam formulir penetapan kinerja (Lampiran III : Penetapan Kinerja Tahun 2016)



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKj.IP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga, sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pacitan melaksanakan kewajiban menyusun akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-2016 maupun RKPd Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016.



Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai, serta membandingkan dengan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya dalam periode ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut: a). Nilai 85 s.d 100 kategori Sangat Baik; Nilai 75 s.d < 85 kategori Baik; Nilai 65 s.d < 75 kategori Cukup Baik; Nilai 50 s.d < 65 kategori Sedang; dan Nilai 0 s.d < 50 kategori Kurang.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan disusun menurut klasifikasi sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata pada tahun 2016 sebesar 125,99%. Capaian kinerja ini termasuk dalam kategori "SANGAT BAIK". Apabila dibanding dengan tahun sebelumnya pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 14,66% melambatnya kenaikan capaian ini dikarenakan terdapat perubahan jumlah indikator serta perubahan target akibat penyesuaian sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan yang dikarenakan realisasi pada RPJMD induk telah tercapai melebihi target yang ditetapkan.

Rincian capaian indikator kinerja per-sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016

NO.	SASARAN	CAPAIAN KINERJA					2016	
		2011	2012	2013	2014	2015	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi Dan Kinerja Aparatur Secara Terencana Dan Sistematis	91.15	105.59	88.61	96.56	98.52	111.41	Sangat Baik
2	Tercapainya SPM Daerah	93.31	76.63	107.34	94.01	94.01	100	Sangat Baik
3	Terselenggaranya Pelayanan Prima	104.16	109.66	103.18	125.51	100	100	Sangat Baik



4	Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	90	98.37	105.91	100	100	n.a	-
5	Terwujudnya Perilaku Hidup Sehat	96.53	92.09	103.96	105.94	103.73	105.63	Sangat Baik
6	Terciptanya Lingkungan Sehat	103.86	113.92	113.35	98.11	97.97	100.3	Sangat Baik
7	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	98.66	114.24	111.82	100	98.26	98.38	Sangat Baik
8	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kesehatan	101.53	105.92	103.25	126.19	95.35	100	Sangat Baik
9	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan	101.93	105.96	99.23	100	100	100	Sangat Baik
10	Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau	100.51	97.44	95.8	100.28	102.68	103.81	Sangat Baik
11	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	101.27	106.39	131.25	100.17	100.36	100.04	Sangat Baik
12	Terwujudnya Pusat Ekonomi Unggulan Daerah	117	179.34	185.54	100	200	133.33	Sangat Baik
13	Ketersediaan Pangan Daerah	94.24	130.55	115.01	128.6	144.44	153.85	Sangat Baik
14	Lembaga UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Berdaya Saing	115.2	121.47	157.23	99.18	99.74	101.60	Sangat Baik
15	Pemasaran Komoditas Daerah	144.81	170.49	123.44	115.63	117.52	120	Sangat Baik
16	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan Dan Perekonomian	94.47	113.62	106.53	103.21	104.92	104.88	Sangat Baik
17	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dasar	107.16	128	119.94	152.9	152.69	538.09	Sangat Baik
18	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Rukun Dan Damai	96.26	100.03	116.25	126.5	92.6	97.76	Sangat Baik
19	Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat	108.77	108.46	111.23	98.63	112.41	124.67	Sangat Baik
JUMLAH / RATA-RATA		103.20	114.64	115.73	109.02	111.33	125.99	SANGAT BAIK



1. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN



Sasaran “Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi Dan Kinerja Aparatur Secara Terencana Dan Sistematis” diarahkan untuk menciptakan aparatur yang profesional serta meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan. Pencapaian sasaran “Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi Dan Kinerja Aparatur Secara Terencana Dan Sistematis” yang capaian indikator kinerja dapat dilihat dari sebagai berikut :

Tabel Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	5.24	6.69	6.52	6.50	6.65	6.75	7.52	111.41



Target aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dari target sebesar 6,75% dapat terealisasi 7.52% dengan capaian sebesar 111.41%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat



disimpulkan bahwa capaian sasaran 1 termasuk kategori "Sangat baik" (111.41%). Dalam menciptakan profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mengupayakan langkah-langkah perbaikan dengan hasil sebagai berikut:

➤ Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)

Capaian Kinerja Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya pada awal periode tahun 2011 mencapai 5,24% mengalami peningkatan sehingga setiap tahunnya selalu tercapai targetnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai 7,52% dari target akhir tahun 2016 sebesar 6.75 % atau mengalami peningkatan sebesar 0,87 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Capaian kinerja ini pada akhir tahun 2016 dengan dukungan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut

- Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Diklat Struktural
- Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsi

Capaian Kinerja RPJMD Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya apabila dibandingkan dengan target mencapai 111,41 %.

➤ Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu (%)

Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu pada tahun 2016 sebesar 5,89% dari target 4,15% atau mencapai 141,93% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD pada tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Diklat Struktural
- Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsi
- Jumlah CPNS Daerah yang mengikuti diklat Prajabatan

Capaian Kinerja RPJMD Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Tugasnya Capaian Kinerjanya 141,93% mengalami peningkatan sebesar 2,32% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.



➤ Pelanggaran disiplin PNS (%)

Indikator Kinerja Pelanggaran disiplin PNS pada tahun 2016 sebesar 0,0005% dari target 0,0015 atau mencapai lebih dari (100%) dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Administrasi Pembinaan PNS dan Non PNS dengan output yang dihasilkan adalah Terlaksananya Pembinaan PNS dan Non PNS

Capaian Kinerja RPJMD Pelanggaran Disiplin PNS apabila dibandingkan dengan target mencapai 100% mengalami (penurunan) sebesar 0,0010% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Dari target 15 orang tercapai 5 Orang, ini berarti peran Badan Kepegawaian Daerah menurunkan pelanggaran disiplin dikategorikan Berhasil.

➤ Dokumen kepegawaian yang diselesaikan (%)

Indikator Dokumen kepegawaian yang diselesaikan pada tahun 2016 mencapai 92,53% dari target 92,39% atau mencapai 100,15%. Dokumen kepegawaian yang diselesaikan didukung dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, yang dihasilkan oleh output beberapa kegiatan sehingga diperoleh capaian program yang dihasilkan adalah Dokumen Kepegawaian yang terselesaikan

Maka Dokumen kepegawaian yang diselesaikan Capaian kinerjanya pada tahun 2016 mencapai 92,53% sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,14% dari target RPJMD tahun 2016.

Sedangkan untuk mendukung administrasi kepegawaian pemerintah kabupaten pacitan menerapkan sistem manajemen kepegawaian untuk memudahkan aparatur sipil negara dalam mengakses informasi kepegawaian dan memudahkan pengelola kepegawaian untuk me-manage data kepegawaian aparatur sipil negara. Sistem informasi manajemen itu antara lain:

1. Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang mengolah data kepegawaian PNS, masih bersifat offline dan dengan akses terbatas hanya untuk pengelola data kepegawaian,
2. Sistem Informasi Kepegawaian, mengolah data pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, sistem ini sudah berjalan secara online dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.



3. Sistem Informasi E-Dokumen, mengolah data Arsip PNS secara Elektronik, sistem ini bersifat offline dan hanya bisa diakses secara terbatas

Berikut disajikan database kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2016

TABEL JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI LAKI	4130
2	PEREMPUAN	3394
JUMLAH KESELURUHAN		7524



TABEL PNS BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2016

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	107
2	II	2.178
3	III	2.965
4	IV	2.274
JUMLAH KESELURUHAN		7.524



TABEL PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2016

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	32
2	SLTP	141
3	SLTA	1.633
4	D1	42
5	D2	939
6	D3	648
7	S1	3.739
8	S2	349
9	S3	0
JUMLAH KESELURUHAN		7.523





TABEL PNS BERDASARKAN ESSELONERING TAHUN 2016

NO	ESSELON	JUMLAH
1	II a	1
2	II b	31
3	III a	56
4	III b	83
5	IV a	450
6	IV b	95
7	V	41
8	Staf	1.994
9	Fungsional	4.773
Jumlah Keseluruhan		7.524

Guna meningkatkan pelayanan kepada aparatur sipil negara maupun masyarakat umum yang menginginkan informasi atau konsultasi langsung terkait masalah kepegawaian, badan kepegawaian daerah kabupaten pacitan menyediakan sarana khusus yaitu Pusat Pelayanan Informasi Kepegawaian Satu Pintu, yang merupakan front office dan pusat informasi bagi seluruh pelayanan terkait masalah kepegawaian. Dengan keberadaan pusat informasi ini diharapkan pengelolaan kepegawaian akan lebih transparan dan akuntabel.

Permasalahan penyelenggaraan urusan pada tahun 2016 antara lain :

- Belum adanya Seleksi Penerimaan CPNS sehingga jumlah SDM Aparatur di Kabupaten Pacitan masih sangat kurang ditambah dengan banyaknya PNS yang pensiun setiap tahunnya.

Sedangkan solusi yang dilaksanakan antara lain :

- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan telah mengirimkan surat permohonan ke Kementerian PAN dan RB terkait penerimaan CPNS untuk menutup kekurangan SDM Aparatur yang telah pensiun

Untuk mewujudkan sasaran I tersebut didukung melalui 3 (tiga) program, antara lain:

Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 1

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	EFISIENSI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,311,181,000.00	3,203,061,462.00	96.73	108,119,538.00



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	51,217,440,609.00	49,543,476,902.00	96.73	1,673,963,707.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,953,095,080.00	1,555,493,923.00	79.64	397,601,157.00
JUMLAH	56,481,716,689.00	54,302,032,287.00	91.04	2,179,684,402.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 1 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 1 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 1 tahun 2016 mencapai 111,41% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 1 yang pada tahun 2016 mencapai 91,04%.



SASARAN STRATEGIS 2

Tercapainya SPM Daerah

Sasaran "Tercapainya SPM Daerah" diarahkan untuk mewujudkan tercapainya pencapaian SPM daerah sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang bermutu kepada masyarakat.

Kinerja sasaran "Tercapainya SPM Daerah" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Prosentase SPM yang mencapai target	43.30	71.70	70.51	70.51	70.51	82	82	100



Indikator SKPD yang mencapai target SPM, dari target sebesar 82% pada tahun 2016 tercapai 100% Sedangkan progres pencapaian sasaran "Tercapainya SPM Daerah" selama tahun 2016 secara ringkas diuraikan berikut ini.

- Pencapaian Prosentase SPM yang mencapai target didukung oleh beberapa faktor pendukung antara lain pelaksanaan 6 jenis SPM merupakan hal yang wajib diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota maka Pemerintah Kabupaten Pacitan segera menindaklanjuti dengan melaksanakannya. 6 SPM yang diterapkan antara lain:



- a. SPM Bidang pendidikan.
- b. SPM Bidang kesehatan.
- c. SPM Bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- d. SPM Bidang perumahan rakyat.
- e. SPM Bidang sosial.
- f. SPM Bidang pemerintahan dalam negeri.

SKPD yang menerapkan SPM pada tahun 2016 sebanyak 7 SKPD. Sehingga capaiannya 100%. SKPD 2016 antara lain:

1. Dinas Cipta kaya, Tata Ruang dan Kebersihan, melaksanakan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan SPM Bidang Sosial dan SPM Bidang Ketenagakerjaan
5. Dinas Kesehatan, melaksanakan SPM Bidang Kesehatan;
6. Dinas Pendidikan, melaksanakan SPM Bidang Pendidikan Dasar;
7. Dinas Bina Marga dan Pengairan, melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Untuk mewujudkan sasaran tersebut didukung melalui 1 (satu) program, yaitu: (1) Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SPM dengan dukungan dana APBD tahun 2016 sebesar Rp 15.000.000,00 yang telah terealisasi senilai Rp 13.959.500,00 atau 93,06% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.040.500,00

Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 2

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	EFISIENSI
Program Penetapan dan pengendalian Penerapan SPM	15,000,000.00	13,959,500.00	93.06	1,040,500.00
JUMLAH	15,000,000.00	13,959,500.00	93.06	1,040,500.00



Dari tabel capaian kinerja sasaran 2 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 2 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 2 tahun 2016 mencapai 100% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 2 yang pada tahun 2016 mencapai 93,06%.



SASARAN STRATEGIS 3

Terselenggaranya Pelayanan Prima

Sasaran "Terselenggaranya Pelayanan Prima" diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan filosofi keberadaan pemerintah sebagai pelayan masyarakat sekaligus sebagai bentuk komitmen kepala daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pencapaian sasaran "Terselenggaranya Pelayanan Prima" indikator kinerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 :

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.00	80.00	79.00	97.90	100.00	100	100	100



Pencapaian sasaran terselenggaranya pelayanan prima dengan indikator utamanya adalah meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja persentase Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2016 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut telah mencapai target RPJMD tahun 2016 karena seluruh unit pelayanan telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat. Capaian kinerja pada tahun 2016 sama apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, pencapaian ini didukung oleh



- program Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan berupa Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan output berupa laporan indeks kepuasan masyarakat yang merupakan kompilasi dari survey indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh unit kerja.
- Disamping pelaksanaan survey IKM, Pemerintah Kabupaten Pacitan juga telah melaksanakan perbaikan di bidang ketatalaksanaan yaitu dengan melaksanakan penerapan SOP pada tahun 2016 sebesar 100,00% dengan capaian ini diharapkan pelayanan SKPD kepada masyarakat akan lebih jelas baik dari sisi prosedur pelayanan maupun dari sisi administrasi, sehingga seluruh unit pelayanan dalam melaksanakan tugasnya dapat terukur.
 - Dalam hal perbaikan ketatalaksanaan, Pemerintah Kabupaten Pacitan juga fokus terhadap penanganan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dihasilkan dari jumlah Pengaduan masyarakat yang ditangani tahun 2016 sebanyak 4 Aduan dibandingkan dengan Pengaduan masyarakat yang masuk tahun 2016 sebanyak 4 aduan. Pengaduan yang masuk pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang berjumlah 10 aduan. Penurunan jumlah pengaduan menunjukkan kinerja pemerintah daerah semakin hari semakin baik, hal ini tidak lepas dari oleh komitmen dan peran semua pihak untuk melaksanakan good government dan good governance. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik secara umum dikoordinir oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan, sedangkan secara teknis unit-unit pelayanan secara langsung juga menangani adanya pengaduan masyarakat seperti halnya pelayanan di puskesmas, dimana terdapat unit khusus yang menangani pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui kotak pengaduan ataupun melalui SMS atau call center yang telah disediakan. Secara khusus Bapak Bupati Pacitan juga menerima pengaduan melalui SMS center dengan nomor 081230130001, sehingga masyarakat dapat secara langsung memberikan masukan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.
 - Guna peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah kabupaten pacitan melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan berupa Penyusunan Dokumen ISO



9001-2008 dan Sertifikasi ISO 9001-2008 dengan output berupa sertifikat ISO yang diterima oleh unit pelayanan yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ISO dan telah diverifikasi oleh Badan Sertifikasi Internasional yang telah terakreditasi yaitu WQA (Worldwide Quality Assurance).

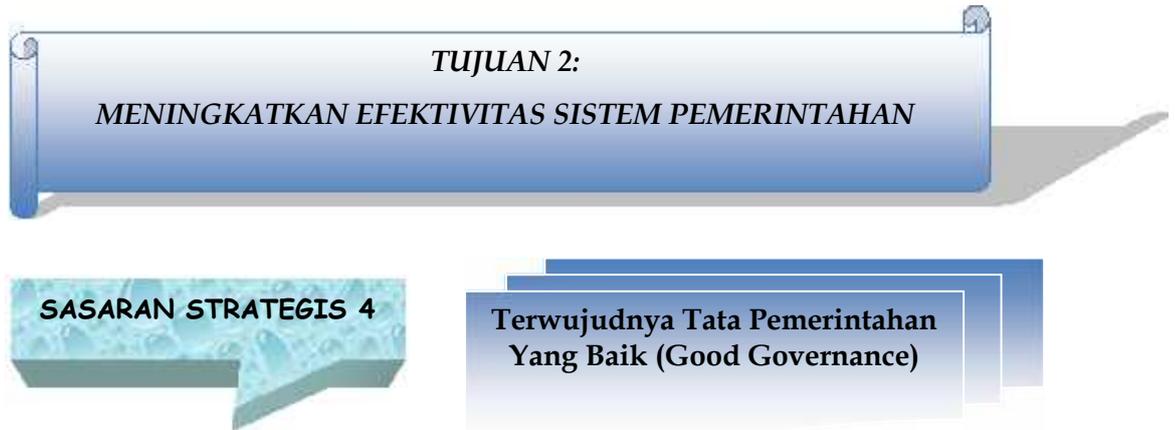
Untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja diatas didukung melalui 14 (empat belas) program, antara lain:

Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 3 :

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
Program standarisasi pelayanan kesehatan	1,140,000,000.00	923,412,075.00	81.00	216,587,925.00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata	21,408,741,410.00	21,166,616,559.00	98.87	242,124,851.00
Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan (BLUD)	54,100,000,000.00	58,636,695,248.24	108.39	(4,536,695,248.24)
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	27,650,000.00	27,650,000.00	100.00	-
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	605,000,000.00	597,728,000.00	98.80	7,272,000.00
Program penataan administrasi penduduk	942,000,000.00	904,580,350.00	96.03	37,419,650.00
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	382,000,000.00	378,183,670.00	99.00	3,816,330.00
Program keluarga berencana	2,319,468,637.00	2,180,380,425.00	94.00	139,088,212.00
Program pelayanan kontrasepsi	225,000,000.00	165,374,900.00	73.50	59,625,100.00
Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	555,000,000.00	547,552,000.00	98.66	7,448,000.00
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100,000,000.00	99,933,100.00	99.93	66,900.00
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	584,850,000.00	583,002,650.00	99.68	1,847,350.00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	7,019,262,000.00	6,572,968,670.00	93.64	446,293,330.00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2,767,199,000.00	2,639,510,014.00	95.39	127,688,986.00
JUMLAH	92,176,171,047.00	95,423,587,661.24	95.49	(3,247,416,614.24)



Dari tabel capaian kinerja sasaran 3 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 3 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 3 tahun 2016 mencapai 100,00% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 3 yang pada tahun 2016 mencapai 95,49%.



Sasaran “Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)” diarahkan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pencapaian kinerja sasaran “Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)” capaian indikator kerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 :

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Opini audit BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam Proses	n.a

- Opini audit BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Pacitan untuk tahun 2016 yang diperiksa pada tahun 2017 ini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa

NO.	TAHUN	OPINI BPK
1.	LKD TAHUN 2012	WDP
2.	LKD TAHUN 2013	WTP
3.	LKD TAHUN 2014	WTP
4.	LKD TAHUN 2015	WTP
5.	LKD TAHUN 2016	On Progres

Keuangan Republik Indonesia, sedangkan laporan keuangan tahun 2015 yang diperiksa pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pacitan memperoleh opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Surat Kepala BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur Nomor 104/S-HP/XVIII-SBY/05/2016 Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016. Hal ini tentunya merupakan hasil dari upaya dan kerja keras seluruh komponen dan seluruh pihak sehingga prestasi tersebut dapat diraih kembali setelah pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan juga



mendapatkan predikat WTP. Dalam rangka mempertahankan opini WTP tersebut Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerbitkan beberapa petunjuk khusus untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:

- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
- Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Road Map Dan Action Plan Dalam Mewujudkan Dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Untuk mencapai terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) serta guna mendukung pencapaian opini WTP BPK Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui inspektorat juga melaksanakan pemeriksaan internal terhadap laporan keuangan SKPD secara berkala untuk pemeriksaan PKPT maupun non PKPT yang pada tahun 2016 dapat terselesaikan dan ditindaklanjuti secara keseluruhan. Hal ini dapat tercapai karena etos kerja yang baik dan profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dari aparatur pengendalian intern pemerintah serta atas kerjasama yang baik dari obyek pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Tenaga pemeriksa / auditor yang ada di inspektorat kabupaten pacitan sampai tahun 2016 sejumlah 17 orang, tentunya hal ini masih terbatas dan belum sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan, untuk itu diperlukan diklat teknis khusus bagi auditor / APIP

Tabel Data Kinerja Pengawasan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016

NO.	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kasus pelanggaran disiplin	Kasus	9	14	18	15	7	7	
2	a. Temuan	Kasus	228	254	391	570	437	671	560
	b. Tindak Lanjut	Kasus	228	254	290	671	437	671	560
3	a. Jumlah obyek pemeriksaan	Buah	155	180	167	99	55	110	110
	b. Pemenuhan pelaksanaan pemeriksaan	Buah	155	179	167	99	55	110	110
4	a. Jumlah tenaga pemeriksa	Orang	21	21	14	19	19	19	21
	b. Tenaga pemeriksa yang mengikuti Diklat	Orang	2	5	6	10	15	17	20
5	a. Jumlah sisdur yang diperlukan	Sisdur	1	1	2	2	1	1	1
	b. Jumlah sisdur yang disusun	Sisdur	0	1	2	2	1	1	1



6	a. Jumlah aduan masyarakat	Aduan	48	10	20	15	10	3	5
	b. Jumlah aduan yang ditindak lanjuti	Aduan	38	10	20	15	10	3	5

- Sedangkan dalam bidang akuntabilitas kinerja, berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pacitan memperoleh nilai 62,26 atau predikat predikat "B"

(BAIK) sesuai dengan Surat Menteri PAN&RB Nomor B/223/AA.05/2017 Tanggal 26 Januari 2017. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk

No.	TAHUN	PREDIKAT	NILAI
1.	2012	CC	54,35
2.	2013	CC	55,62
3.	2014	CC	56,18
4.	2015	B	60,48
5.	2016	B	62,26

manajemen kinerja meskipun memerlukan sedikit perbaikan. Dalam pencapaian ini memang sangat diperlukan komitmen bersama dalam upaya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja tersebut antara lain dengan melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan yaitu dengan melakukan revisi terhadap dokumen RPJMD yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016. Perubahan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Menteri PAN dan RB, juga dikarenakan pada sebagian besar indikator kinerja capaian kerjanya telah melebihi target yang telah ditetapkan dan memasukkan indikator SPM yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan perubahan RPJMD tersebut secara otomatis rencana strategis SKPD juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan RPJMD perubahan. Selain melaksanakan perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pacitan juga melaksanakan reviu dan penyempurnaan terhadap indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.



Untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 7 (tujuh) program, antara lain:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 4 :

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
Program perencanaan pembangunan daerah	2,290,000,000.00	2,274,285,200.00	99.31	15,714,800.00
Program perencanaan tata ruang	1,060,000,000.00	987,684,695.00	93.18	72,315,305.00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	7,019,262,000.00	6,572,968,670.00	93.64	446,293,330.00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2,767,199,000.00	,639,510,014.00	95.39	127,688,986.00
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	13,710,555,500.00	13,439,476,884.85	98.02	271,078,615.15
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	35,000,000.00	34,855,000.00	99.59	145,000.00
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	32,000,000.00	21,674,650.00	67.73	10,325,350.00
JUMLAH	26,914,016,500.00	5,970,455,113.85	92.41	943,561,386.15

Dari tabel capaian kinerja sasaran 4 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 4 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 4 tahun 2016 belum dapat diketahui hasilnya, akan tetapi jika dilihat dari capaian tahun 2015 opini WTP dapat diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan sehingga capaian kinerjanya dapat tercapai 100% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 4 yang pada tahun 2016 mencapai 92,41%. Dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.943.561.386,00.



TUJUAN 3:

“MEWUJUDKAN PERILAKU DAN LINGKUNGAN SEHAT”

SASARAN STRATEGIS 5

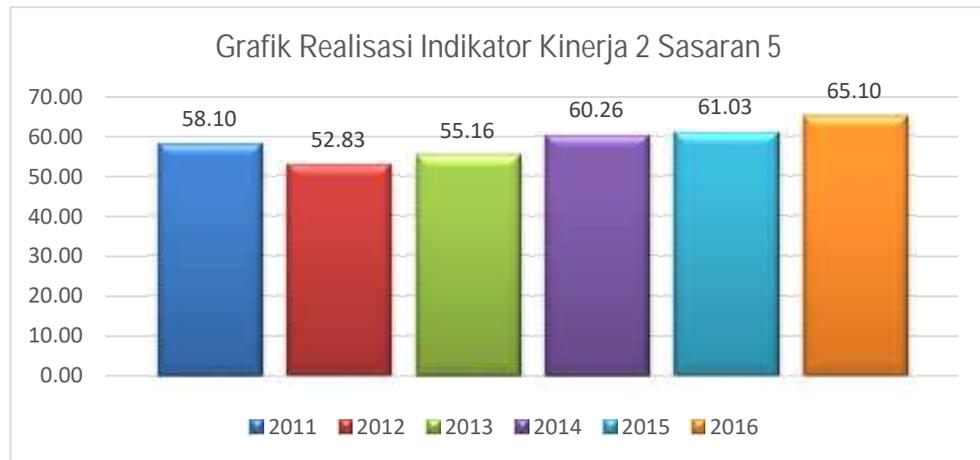
Terwujudnya Perilaku Hidup Sehat

Sasaran “Terwujudnya Perilaku Hidup Sehat” diarahkan untuk meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan perilaku hidup sehat. Pencapaian kinerja sasaran Kinerja sasaran “Terwujudnya Perilaku Hidup Sehat” capaian indikator kerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Prosentase penduduk yang menggunakan jamban	79.47	83.02	100.00	100.00	100.00	90.00	100	111.11
2	Prosentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	58.10	52.83	55.16	60.26	61.03	65.00	65.10	100.15
RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 5									105.63





Capaian indikator yang mendukung sasaran terwujudnya perilaku hidup sehat pada tahun 2016 mengalami progres yang menggembirakan, capaian dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting perilaku hidup sehat, berikut adalah uraian mengenai perkembangan yang telah dicapai:

Seiring dengan meningkatnya capaian indikator desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) maka jumlah penduduk yang menggunakan jamban juga meningkat. Pada tahun 2016 prosentase penduduk memakai jamban keluarga di Kabupaten Pacitan sudah 100% dari seluruh jumlah penduduk yaitu sebanyak 577.725 jiwa, karena sudah seluruh desa dan seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan dinyatakan ODF atau bebas buang air besar sembarangan. Hal ini didorong oleh program ODF atau STBM di wilayah Kabupaten Pacitan serta pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat. Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara instan, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan. Meski sudah dinyatakan Kabupaten ODF, perlu terus ditingkatkan lagi kesadaran dan pemahaman masyarakat agar tidak buang air besar di sembarang tempat agar kesehatan lingkungan lebih meningkat. Sedangkan untuk Rumah berjamban adalah jumlah rumah yang memiliki jamban sehat sesuai standar kesehatan. Jumlah rumah berjamban di Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 sebanyak 122.633 rumah dari target 122.383 rumah berjamban



sehingga capaian kinerjanya 100,20%. Indikator ini dapat tercapai karena program yang mendukung ODF (Open Defecation Free) tengah digalakkan di Kabupaten Pacitan dalam rangka menuju Pacitan Bebas ODF Tahun 2012. Sedangkan Kecamatan yang sudah ODF sampai tahun 2016 ada 12 Kecamatan dan jumlah desa/kelurahan ODF sebanyak 171 desa/kelurahan. Artinya Kabupaten Pacitan sudah dinyatakan Bebas ODF pada tahun 2016. Kegiatan Deklarasi ODF dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 50 pada 12 November 2014 oleh Bupati Pacitan, jajaran insan kesehatan dan masyarakat serta anak sekolah dan dihadiri oleh Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas sanitasi lingkungan meliputi kepemilikan jamban, pembuangan air limbah dan sampah yang memenuhi syarat kesehatan dapat meningkatkan kualitas air bersih serta mencegah penularan penyakit berbasis lingkungan. Sanitasi total berbasis masyarakat sebagai pilihan pendekatan, strategi dan program untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode pemucuan dalam rangka mencapai target MDGs. Di Kabupaten Pacitan telah berjalan kegiatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang terdiri dari 5 pilar, yaitu :

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau peningkatan akses jamban
2. Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS)
3. Pengolahan air minum dan makanan skala rumah tangga
4. Pengolahan limbah skala rumah tangga
5. Pengolahan sampah skala rumah tangga

Suatu desa/kelurahan dikatakan telah melaksanakan STBM berdasarkan kondisi :

- 1) Minimal telah ada intervensi melalui pemucuan di salah satu dusun dalam desa/kelurahan tersebut.
- 2) Adanya masyarakat yang bertanggungjawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM baik individu atau dalam bentuk komite dan sebagai respon dari aksi intervensi STBM, atau mempunyai tim kerja STBM.
- 3) Masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan (rencana tindak lanjut) dalam rangka mencapai komitmen-komitmen perubahan perilaku pilar-pilar



STBM yang telah disepakati bersama.

Pelaksanaan STBM dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada pilar ke-1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan adopsi perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan secara bertahap mengembangkan pilar lain dari STBM.

Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 sama dengan tahun 2013, 2014 dan 2015 sebanyak 171 desa/kelurahan dari 171 desa/kelurahan yang ada atau sebesar 100,00% desa/kelurahan sudah melaksanakan pilar-pilar STBM. Artinya seluruh desa/kelurahan dan seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan sudah melaksanakan kegiatan pemucuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Capaian ini telah melampaui target RPJMD tahun 2016 dengan dukungan program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Jumlah peserta bimtek perencanaan dan evaluasi program PL
- Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas petugas PL
- Jumlah sasaran monev pembinaan TTU, institusi dan pengambilan sample
- Jumlah sampel pemeriksaan bakteriologis / kimia terbatas
- Jumlah peserta bimtek program STBM
- Jumlah sasaran monev program STBM

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sebesar 58,1 dan sampai akhir tahun 2016 mencapai 100, telah terjadi peningkatan selama 6 tahun sebesar 41,9. Peningkatan angka disini berarti Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil mengkondisikan seluruh Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Rumah tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang seluruh anggota keluarganya telah berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi 10 indikator. Persentase rumah tangga ber-PHBS didapatkan dari jumlah rumah tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS



dibagi dengan jumlah rumah tangga yang dipantau. Sepuluh indikator tersebut antara lain :

- 1) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan,
- 2) Bayi diberi ASI eksklusif,
- 3) Balita ditimbang setiap bulan,
- 4) Menggunakan air bersih,
- 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun,
- 6) Menggunakan jamban sehat,
- 7) Memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu,
- 8) Makan buah dan sayur tiap hari,
- 9) Melakukan aktivitas fisik setiap hari
- 10) Tidak merokok di dalam rumah.

Sedangkan rumah tangga yang dikaji minimal 1% dari seluruh rumah tangga yang ada. Hasil kegiatan pemantauan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui hasil survei PHBS tatanan Rumah Tangga pada tahun 2016 dari target 65% terealisasi sebesar 65,10% dengan capaian kinerja 100,15%. Jumlah rumah tangga yang disurvei sebanyak 52.910 dan yang sudah PHBS sebanyak 34.445 rumah tangga. Tahun 2015 dari target 64% terealisasi sebesar 61,03% dengan capaian kinerja 95.36%. Jumlah rumah tangga yang disurvei sebanyak 37.816 dan yang sudah PHBS sebanyak 23.080 rumah tangga. Tahun 2014 dari target 62% terealisasi sebesar 60.26% dengan capaian kinerja 97,19%. Jumlah rumah tangga yang disurvei sebanyak 35.754 dan yang sudah PHBS sebanyak 21.547. Rumah tangga Rumah tangga ber-PHBS di Kabupaten Pacitan pada tahun 2013 sebesar 55,16%, tahun 2012 sebesar 52,83%, tahun 2011 yaitu sebesar 58,10%.

Capaian rumah tangga ber-PHBS merupakan hasil survei yang dilakukan petugas puskesmas dimana sasaran survei berbeda setiap tahunnya sehingga dimungkinkan hasil yang berbeda atau naik-turun dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator kinerja Rumah Tangga yang ber-PHBS belum bisa memenuhi target dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang memenuhi standar kesehatan seperti perilaku pemberian ASI eksklusif kepada bayi capaiannya masih rendah serta perilaku merokok di dalam rumah masih sangat tinggi. Ke depan kegiatan



promosi kesehatan harus lebih ditingkatkan agar pembangunan kesehatan lebih berhasil dalam upaya promotif dan preventif bukan lagi pada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Juga diperlukan adanya intervensi dari berbagai komponen baik lintas program maupun lintas sektor, LSM, swasta, tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Juga terus dilakukan upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS di tingkat desa/kelurahan serta mengikuti event lomba PHBS baik tingkat kabupaten maupun propinsi untuk mengungkit capaiannya. Hasil kegiatan pemantauan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui hasil survei PHBS tatanan Rumah Tangga Tahun 2015 di Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa rumah tangga ber-PHBS sebesar 54,5%. Sedangkan secara nasional rumah tangga ber-PHBS pada tahun 2015 mencapai 44%. Berarti capaian Kabupaten Pacitan lebih baik dibanding Propinsi Jawa Timur dan capaian nasional.

Dalam kaitannya dengan PHBS, Jumlah Pelaksanaan Tatanan Kabupaten Sehat di Kabupaten Pacitan Sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 atau 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, yang dimaksud Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat merupakan pendekatan terpadu, menyeluruh, lintas sektor berbasis masyarakat, masyarakat sebagai pelaku utama. Selain itu juga merupakan operasionalisasi pembangunan berkelanjutan, berbasis pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berwawasan kesehatan. Pendekatan Kabupaten/Kota Sehat tidak hanya mengutamakan pada terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik tapi juga sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan agar dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten/kota tersebut, secara mandiri sehingga diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi wilayah dan masyarakat dalam



meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik.

Penghargaan Swasti Saba adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah bagi kabupaten/kota yang melaksanakan pendekatan kabupaten/kota sehat. Penghargaan Swasti Saba meliputi :

- a. Padapa, bagi kabupaten/kota yang memilih dan melaksanakan 2 tatanan
- b. Wiwerda, bagi kabupaten/kota yang memilih dan melaksanakan 3-4 tatanan
- c. Wistara, bagi kabupaten/kota yang memilih dan melaksanakan 5 tatanan atau lebih.

Penilaian kabupaten/kota sehat dilakukan pada proses kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dilaksanakan oleh pemerintah dan yang bersifat berkelanjutan jadi bukan bersifat kompetisi/lomba. Tatanan dalam penilaian penghargaan swasti saba adalah sasaran kabupaten/kota sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di kabupaten/kota. Tatanan kabupaten/kota dikelompokkan berdasar kawasan dan permasalahan khusus terdiri dari 9 tatanan, yaitu :

- a. Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum
- b. Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi
- c. Kawasan Pertambangan Sehat
- d. Kawasan Hutan Sehat
- e. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat
- f. Kawasan Pariwisata Sehat
- g. Ketahanan Pangan dan Gizi
- h. Kehidupan Masyarakat Yang Mandiri
- i. Kehidupan Sosial Yang Sehat

Untuk pelaksanaan tatanan Kabupaten Sehat pada tahun 2011 terealisasi sebanyak 4 tatanan dari 9 tatanan yang ada. Pada tahun 2011 dari 4 tatanan yang diajukan dan dinilai di tingkat nasional, ada 2 tatanan yang lolos oleh tim verifikasi dan berhak menerima Penghargaan "Swasti Saba Padapa" Program Kabupaten Sehat kualifikasi pemantapan. Penyerahan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia diterima pada tanggal 14 Nopember 2011 oleh Bupati Pacitan di Istana Negara. Tatanan Kabupaten Sehat yang diverifikasi tingkat nasional adalah :



1. Tatanan Masyarakat Sehat dan Mandiri, titik Pantau di Desa Poko
2. Tatanan Pariwisata Sehat, titik pantau di Pantai Teleng Ria
3. Tatanan Pemukiman dan Sarana Prasarana Sehat, titik pantau di Perumnas Bangunsari
4. Tatanan Hutan Sehat, dengan titik pantau di Desa Donorojo

Capaian tatanan Kabupaten Sehat tahun 2012 sudah memenuhi 6 tatanan adalah:

1. Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum
2. Tatanan Hutan Sehat
3. Tatanan Pariwisata Sehat
4. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat dan Mandiri
5. Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi
6. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi

Berarti ada 2 tatanan baru yang dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi dan Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi. Dari 6 tatanan yang diadopsi pada tahun 2012 diajukan untuk verifikasi tingkat propinsi dan lolos untuk dievaluasi tingkat nasional pada tahun 2013, dengan 6 tatanan sebagai berikut :

1. Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum, dengan titik pantau Desa Bangunsari dan Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan
2. Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi, dengan titik pantau di Terminal Bus Pacitan di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan, dan di sepanjang jalur Jalan Tentara Pelajar sampai dengan Jalan WR. Supratman Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan
3. Tatanan Hutan Sehat, dengan titik pantau Kawasan Hutan Desa Donorojo Kecamatan Donorojo dan Kawasan Hutan Desa Karanganyar Kecamatan Kebonagung
4. Tatanan Pariwisata Sehat, dengan titik pantau Kawasan Wisata Teleng Ria Kecamatan Pacitan dan Kawasan Wisata Goa Gong Kecamatan Punung
5. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi, dengan titik pantau Desa Kledung Kecamatan Bandar



6. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat dan Mandiri, dengan titik pantau Desa Poko Kecamatan Pringkuku dan Desa Bangunsari Kecamatan Bandar.

Capaian kegiatan Kabupaten Sehat pada tahun 2013 sudah mencapai 6 tatanan dan pada tanggal 14 November 2013 Kabupaten Pacitan berhasil mendapatkan "Piala Swasti Saba Wiwerda" yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan kepada Bupati Pacitan di Hotel Merlynn Park Jakarta.

Sedangkan pada tahun 2015 sudah berhasil mendapatkan "Piala Swasti Saba Wistara" untuk penilaian 6 tatanan yang diajukan. Piala diserahkan Menteri Kesehatan kepada Bupati Pacitan pada tanggal 30 November 2015 di Jakarta. Sedangkan sampai tahun 2015 sudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, bimtek dan monev Kabupaten Sehat pada 9 tatanan.

Guna mendukung pencapaian PHBS pemerintah kabupaten pacitan melalui dinas kesehatan mencanangkan desa dan kelurahan siaga untuk bisa menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif jika memenuhi 8 (delapan) kriteria berdasarkan Pedoman Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1519/Menkes/SK/X/2010. Desa Siaga Aktif merupakan desa/kelurahan yang penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM yang dapat melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

Untuk mengembangkan Desa Siaga minimal harus memenuhi 9 syarat yaitu :

- 1) Ada Forum Masyarakat Desa (FMD) = Peran aktif masyarakat dan ormas dalam meningkatkan kesejahteraan warga/perbaikan desanya.
- 2) Adanya pelayanan kesehatan dasar = Kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan seperti polindes, pustu, bidan, dokter/perawat/ bidan praktek swasta, klinik.
- 3) Adanya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) = Posyandu,



Poskesdes, Kader Pemberdayaan masyarakat/kader kesehatan aktif, ambulans desa.

- 4) Adanya pengamatan kesehatan terus-menerus dilakukan masyarakat serta melaporkan kepada petugas kesehatan.
- 5) Ada pembinaan dari puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan bagi ibu dan bayi.
- 6) Ada sistem siaga terhadap bencana oleh masyarakat seperti ancaman dan kejadian yang dapat membahayakan jiwa.
- 7) Ada pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat = Dukungan dana untuk kegiatan kesehatan seperti dana sehat, jimpitan, tabungan ibu bersalin.
- 8) Mempunyai lingkungan yang sehat, mencakup kebersihan, kenyamanan, kebutuhan dasar.
- 9) Masyarakat ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Ada 4 tahapan/tingkatan Desa Siaga yaitu :

- a. Desa Siaga BINA = memenuhi kriteria 1-3
- b. Desa Siaga TUMBUH = memenuhi kriteria 1-3 ditambah 2 kriteria lainnya (5 kriteria)
- c. Desa Siaga KEMBANG = memenuhi kriteria 1-3 ditambah 4 kriteria lainnya (7 kriteria)
- d. Desa Siaga PARIPURNA = memenuhi seluruh kriteria (9 kriteria)

Target Cakupan Desa Siaga Aktif tahun 2016 sebesar 84,42% dari seluruh desa/kelurahan terealisasi sebesar 171 desa/kelurahan dari 171 desa/kelurahan yang ada yang ada di Kabupaten Pacitan atau 100%. Sama dengan capaian tahun 2013 dan 2014 sebesar 100%. Sedangkan capaian tahun 2012 sebesar 79,53% dan tahun 2011 sebesar 75,44%. Desa/Kelurahan Siaga Aktif di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 98,51%. Sedangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif secara nasional pada tahun 2015 sebanyak 69,51% sehingga capaian Kabupaten Pacitan lebih baik dari Propinsi Jawa Timur dan Nasional.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 2 (dua) program, antara lain:



Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 5

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program pengembangan lingkungan sehat	365,000,000.00	364,184,000.00	99.77	816,000.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1,623,295,750.00	1,610,283,150.00	99.19	13,012,600.00
JUMLAH	1,988,295,750.00	1,974,467,150.00	99.49	13,828,600.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 5 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 5 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 5 tahun 2016 mencapai 105,63% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 5 yang pada tahun 2016 mencapai 99,49% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 13.828.600,00.



SASARAN STRATEGIS 6

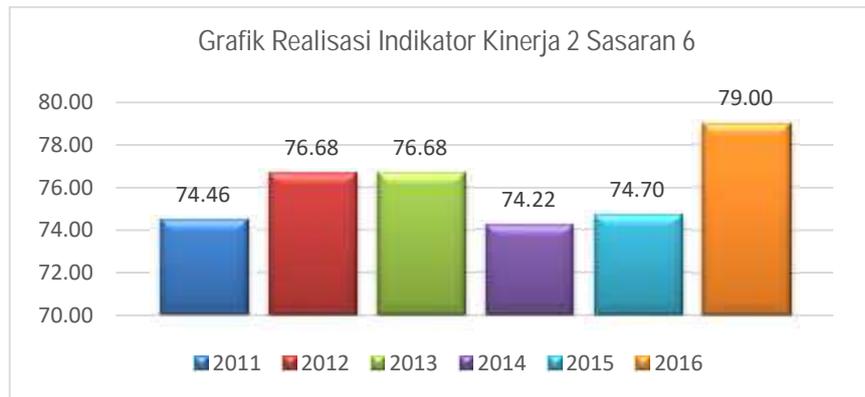
Terciptanya Lingkungan Sehat

Sasaran “Terciptanya Lingkungan Sehat” diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Pencapaian kinerja sasaran Kinerja sasaran “Terciptanya Lingkungan Sehat” capaian indikator kerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut :

Tabel Target Indikator Kinerja Sasaran 6

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	38.68	39.73	40.00	40.61	41.22	41.58	41,83	100.6
2	Skor Evaluasi Adipura	74.46	76.68	76.68	74.22	74.70	79.00	79.00	100.00
RATA RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 6									100,30





Keberhasilan pencapaian sasaran cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang antara lain meliputi jalan, drainase, pengelolaan persampahan, sanitasi, ketersediaan air bersih, listrik yang memadai dengan uraian pencapaian sebagai berikut:

- Indikator kinerja Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2016 sebesar 41,83% atau mencapai 100,6% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 41,58% dan capaian tahun 2016 sebesar 41,83%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan output yang dihasilkan adalah Meningkatnya rumah layak huni. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 41,83% dan mengalami peningkatan sebesar 0,61% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk Indikator kinerja rumah layak huni pada tahun 2016 sebesar 98,84% atau mencapai 105,15% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 94,00% dan capaian tahun 2016 sebesar 98,84%. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 98,84% atau 135.593,49 unit dan mengalami peningkatan sebesar 1.343,49 unit apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Disamping itu Indikator kinerja Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2016 sebesar 47,23% atau mencapai 105,64% dari



target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 41,71% dan capaian tahun 2016 sebesar 47,23%. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 47,23% dan mengalami peningkatan sebesar 3,12% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Selain itu Indikator kinerja Rasio rumah layak huni pada tahun 2016 sebesar 26,72% atau mencapai 108,8 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2015 sebesar 25,39% dan capaian tahun 2016 sebesar 26,72%. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 26,72% atau 138.391 unit dan mengalami peningkatan sebesar 0,14% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Meningkatnya rumah layak huni juga dapat dilihat dengan semakin menurunnya lingkungan kumuh. Indikator kinerja Berkurangnya luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan pada tahun 2016 sebesar 0.055% atau mencapai 101,82% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 0.056% dan capaian tahun 2016 sebesar 0.055%. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 0.055% atau 79,24 m² dan mengalami peningkatan sebesar 0,002% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Selain faktor – faktor tersebut juga didukung dengan Indikator kinerja Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2016 sebesar 47,23% atau mencapai 105,64% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 41,71% dan capaian tahun 2016 sebesar 47,23%. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 47,23% dan mengalami peningkatan sebesar 3,12% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Kondisi Jalan

Indikator kinerja Luas Permukiman (Ha) pada tahun 2016 sebesar 14.530,06 atau mencapai 102,43% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun



2016 sebesar 14.185,40 dan capaian tahun 2015 sebesar 14.530,06. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 14.530,06 dan mengalami peningkatan sebesar 172,33 apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator kinerja Permukiman layak huni (%) pada tahun 2016 sebesar 99,99% atau mencapai 102,46% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 97,59% dan capaian tahun 2016 sebesar 99,99%.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 99,99% atau 13.802,65 unit dan mengalami peningkatan sebesar 137,65 unit apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Capaian kinerja diatas pada tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan dengan output yang dihasilkan adalah Peningkatan jalan lingkungan.

Drainase

Indikator kinerja Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) tahun 2016 sebesar 84.54% atau mencapai 104,97 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2015 sebesar 80.54% dan capaian tahun 2016 sebesar 84.54%. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 84.54% atau 118.716,25 m dan mengalami peningkatan sebesar 4 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator kinerja Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun pada tahun 2016 sebesar 84.54% atau mencapai 104,97% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 80,54% dan capaian tahun 2016 sebesar 84.54%.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 84.54% atau 118.716,25 m dan mengalami peningkatan sebesar 4 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Capaian kinerja tersebut pada tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong dan pemeliharaan rutin saluran drainase kota dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Saluran drainase kota yang terpelihara

Indikator kinerja Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m) pada tahun 2016 sebesar 27.509 atau mencapai 193% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 14.223 dan capaian tahun 2015 sebesar 27.509.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Kegiatan Perbaikan Saluran Tertutup Trotoar Kota dengan output yang dihasilkan adalah Terpeliharanya Saluran Tertutup Trotoar Kota

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 27.509 dan mengalami peningkatan sebesar 3.371,50 apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pengelolaan persampahan

Indikator kinerja Penanganan sampah (%) pada tahun 2016 sebesar 91,06% atau mencapai 100,07% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 91,00% dan capaian tahun 2016 sebesar 91,06%. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 91,06% atau 135,03 m3 dan mengalami peningkatan sebesar 2,24 m3 apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator kinerja Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk (%) pada tahun 2016 sebesar 0,40% atau mencapai 105,26% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 0,38% dan capaian tahun 2016 sebesar 0,40%. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 0,40% dan mengalami peningkatan sebesar 0,04% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Capaian kinerja tersebut diatas pada tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan dengan output yang dihasilkan adalah Jumlah pengolahan sampah menjadi kompos dan satuan sampah yang terangkut.

Sanitasi

Indikator kinerja Rumah bersanitasi (%) pada tahun 2016 sebesar 87,58% atau mencapai 102,78% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 85,21% dan capaian tahun 2016 sebesar 87,58%.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dengan output yang dihasilkan adalah Kelancaran kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 87,58% atau 122.766,38 unit dan mengalami peningkatan sebesar 1.216,38 unit apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Air Bersih

Indikator kinerja Rumah tangga pengguna air bersih perkotaan (%) pada tahun 2016 sebesar 71,08% atau mencapai 125,58% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 56,60% dan capaian tahun 2016 sebesar 71,08%.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 71,08% atau 107.091,01 unit dan mengalami peningkatan sebesar 1.061,01 unit apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator kinerja Rumah tangga pengguna air bersih perdesaan (%) pada tahun 2016 sebesar 39,22% atau mencapai 104,03% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 37,7% dan capaian tahun 2016 sebesar 39,22%.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 39,22% atau 155.136,39 rumah dan mengalami peningkatan sebesar 1.536,39 rumah apabila



dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Capaian kinerja tersebut diatas pada tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dengan output yang dihasilkan adalah Sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Indikator kinerja Rumah tangga pengguna air bersih (%) pada tahun 2016 sebesar 70,15% atau mencapai 102,95% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 68,14% dan capaian tahun 2016 sebesar 70,15%. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 70,15% atau 112.595,50 rumah dan mengalami peningkatan sebesar 1.115,50 rumah apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator kinerja Penduduk berakses air bersih (%) pada tahun 2016 sebesar 55,43% atau mencapai 115,48% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 48,00% dan capaian tahun 2016 sebesar 55,43%. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 55,43% atau 81.648,95 jiwa dan mengalami peningkatan sebesar 808,95 jiwa apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Capaian kinerja diatas pada tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan pembangunan infrstruktur perdesaan dengan output yang dihasilkan adalah Meningkatnya rumah tangga pengguna air bersih.

Database Capaian Kinerja Bidang Perumahan Tahun 2016

NO	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rumah Layak Huni	Unit	117.698	120.052	126.012	130.326	136.914	137.020	138.391
2	Rumah Bersantiasi	Unit	120.258	106.169	107.413	108.911	119.765	121.555	122.771
3	Jalan Lingkungan yang dibangun	Meter	1.368.885	1.375.885	1.508.632	1.739.276,94	1.919.700,51	2.102.550	2.123.576,1
4	Luasan lingkungan permukiman kumuh	Ha	107,24	102,24	93,39	84,54	86,17	79,25	78,46



Database Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum 2016

NO	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Penduduk Terlayani Air Bersih	Jiwa	59.120	61.514	66.350	70.970	72.150	80.830	81.639
2	Desa Terlayani Air Bersih	Desa	109	119	158	158	160	162	164
3	Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih	RT	105.360	105.540	107.650	109.000	109.650	111.480	112.596
4	Perpipaan	Meter	628.022,3	650.733	672.423	685.717	709.565	733.413	754.413
5	Intake	Unit	18	19	24	27	33	35	39
6	Pompa	Unit	28	32	35	35	40	45	50
7	Saringan Pasir Lambat	SPL	12	12	12	14	15	15	15
8	Sumur Bor	Unit	25	25	25	25	25	25	25
9	Ground Reservoir	Unit	39	47	52	54	64	68	72
10	Hidran Umum	Unit	168	119	139	149	169	173	177
11	Kran Umum	Unit	75	75	83	83	88	95	102
12	Genset	Unit	8	12	13	17	17	17	17
13	MCK	Unit	39	71	93	101	110	114	118
14	Drainase Kota	Meter	92.635	100.741	100.841	101.231	110.359	119.487	120.683
19	TPA	Buah	1	1	1	1	1	1	1
20	Tempat Sampah Permanent	Buah	5	6	7	4	4	4	4
21	Armroll Truck	Buah	3	3	3	3	3	4	4
22	Truck Sampah	Buah	2	2	2	5	5	5	5
23	Container	Buah	15	21	21	22	31	28	28
24	Gerobak Sampah	Buah	126	126	126	136	136	140	190
25	Mobil Tangga	Unit	1	1	1	1	1	1	1
26	Kendaraan Roda Tiga	Unit	6	9	9	9	11	11	11
27	Truck Tangki	Unit	2	2	4	4	5	4	4
28	Mobil Pick Up	Unit	3	2	2	2	3	4	4
29	Diesel Air	Unit	2	5	5	5	5	7	7
30	Mesin Pemotong Rumput Dorong	Unit	8	8	8	8	13	15	15
31	Mesin Pemotong Rumput Gendong	Unit	9	9	9	9	14	15	15
32	Jalur Hijau Yang Tertala	m ³	20.586	21.286	21.491	22.985	24.283,91	24.503,27	24.748,67
33	Luas Taman	m ²	35.420	35.920	36.022	79,231	24.161,17	25.250,20	26.714,96
34	Penanganan Sampah	m ³	23,0	2,5	88,00	88,00	139,73	132,79	135,03
35	Pengangkutan Sampah	m ³	90,10	120,5	11,09	111,09	113,03	114,06	115,09
36	Daya Tampung TPS	m ³	130,68	132,2	132,2	154,85	169,65	171,54	173,43
37	Jumlah PJU	titik	5.367	5.399	5.728	2.466	2.821	3.449	4.549



Database Capaian Kinerja Bidang Penataan Ruang 2016

NO	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dokumen RDTR Kota	Dokumen	4	4	4	4	5	5	5

Dengan kerja sama yang baik antar stakeholder terkait, skor/nilai Program Adipura dapat dipertahankan sehingga dalam rentang waktu tahun 2008-2016 Pacitan mendapatkan anugerah Piala Adipura secara berturut-turut dari Presiden RI. Seiring dengan peningkatan passing grade bagi skor penerima Adipura di waktu yang akan datang, perlu segera dirumuskan strategi kebijakan dan kegiatan inovatif dalam bidang pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup yang diharapkan dapat meningkatkan capaian nilai/skor Adipura sehingga Pacitan akan tetap mendapatkan anugerah Piala Adipura dari Presiden RI. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan, lembaga legislatif, LSM hingga warga masyarakat Pacitan pada umumnya. Skor adipura 2015 tidak tercapai karena adanya perubahan dalam system penilaian adipura 2015. Penurunan nilai skor dan ketidaktercapaian target pada tahun 2015 ini merupakan pengaruh dari berubahnya bobot penilaian terhadap beberapa titik pantau yang dijadikan indikator penentu, dari 14 titik pantau diantaranya seperti bank sampah, TPA, perumahan, jalan, pasar, serta pertokoan, mayoritas mengalami kenaikan bobot penilaian. Meski beberapa diantaranya juga ada yang menurun. Dari beberapa titik pantau tersebut, seperti bank sampah yang semula 0, sekarang bobotnya naik menjadi 7. Demikian juga dengan TPA, yang semula 9 sekarang ditingkatkan menjadi 11. Meskipun demikian dari beberapa komponen penilaian tersebut, beberapa diantaranya juga mengalami penurunan, misalnya jalan yang semula 9 turun menjadi 5, pasar yang semula 9 turun menjadi 8, dan pertokoan yang semula 5 sekarang turun menjadi 4. Adapun skala prioritas yang perlu diperhatikan, terkait pengelolaan Bank Sampah, Pace Sewu. Pada pantau satu lalu, memang terdapat sedikit kendala, akan tetapi persoalan kecil tersebut sudah bisa teratasi dengan keberadaan TPA yang dinilai sudah memenuhi



standar spesifikasi yang ditentukan, misalnya seperti pengelolaan air lindi (limbah cair hasil degradasi dari sampah yang terpapar air hujan), dimana sudah tersedia IPAL sangat memadai. Selain itu, keberadaan rumah kompos, juga sangat membantu mengolah sampah menjadi bahan penyubur tanaman, serta memanfaatkan lahan-lahan pasif menjadi lahan-lahan aktif sebagai lokasi penampungan sampah.

Dalam upaya pencapaian piala adipura selain pemerintah, peran aktif masyarakat juga sangat diharapkan. Sebab selama ini, penghargaan Adipura, seakan-akan hanya milik pemerintah. Padahal sejatinya, peran aktif masyarakat sangat menentukan, khususnya pada fase pengelolaan sampah skala kota.

Beberapa langkah telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam upaya mempertahankan dan meraih kembali piala adipura antara lain melalui:

- Sosialisasi untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa sampah adalah potensi sumber daya yang dapat dikelola menjadi hasil positif. Pembangunan TPA Sanitary Landfill disertai prasarana pendukungnya.
- Optimalisas sosialisasi, asistensi, pemberdayaan masyarakat dan pemberian stimulan sarana pengelolaan persampahan metode 3 R (reduce, reuse dan recycle).
- Menggerakkan semua potensi dan sumber daya terkait untuk bersama-sama mempertahankan dan meningkatkan skor Adipura.
- Sosialisasi, asistensi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Sosialisasi, penyuluhan dan kerja sama lintas sektor untuk penegakan peraturan wajib memiliki dokumen lingkungan berikut pelaksanaan dan pengawasannya bagi sektor usaha/industri.

Indikator Kinerja Pengolahan sampah mulai tahun 2011 sampai dengan 2016 mengalami perubahan pada tahun 2011 hingga 2012 pengolahan sampah menggunakan model open dumping sehingga tidak perlu diadakan pengolahan sampah 3R (Reduse, Reuse, Recycle) sehingga pada tahun 2011 dan 2012 persentase capaian sampah kita cukup tinggi karena hanya diukur dari penampungan sampah yang masuk ke TPA. Sejak tahun 2013 hingga 2016 pola



pengolahan sampah menggunakan sistem 3R sehingga sampah – sampah yang masuk ke TPA mengalami pengolahan sejak dari rumah tangga, kontainer/ TPA 3R, bank - bank sampah /pengepul sampah sehingga hasil evaluasi ditemukan hampir 30% sampah – sampah yang berasal dari rumah tangga dan sampah – sampah sejenis rumah tangga berkurang masuk ke TPA. Hal ini dilihat dari capaian sejak tahun 2013 hingga akhir 2016 indikator pengolahan sampah cukup meningkat/tercapai dibandingkan target yang tercantum di RPJMD

Indikator Kinerja Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada awal periode tahun 2011 mencapai 50% dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai 100%, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Karena Cakupan pengawasan AMDAL ini akan terus dilaksanakan karena disinilah fungsi esensi KLH sebagai pengawas institusi pengawas lingkungan. Dengan melakukan pengawasan pada pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL diharapkan potensi pencemaran dan perusakan lingkungan akan dapat dieliminasi.

a. AMDAL

Secara umum pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang wajib AMDAL di Kabupaten Pacitan sudah terlaksana dengan baik (100%). Pengawasan yang dilakukan adalah terhadap :

- Pembangunan Jalur Lintas Selatan ruas Pacitan
- Pabrik Pengolahan Hasil Tambang Cu dan Zn PT. Dragon Fly Mineral Industry (PT. DFMI),
- IUP PT. Gemilang Limbah Internusa (PT. GLI) di Desa Kluwih Kecamatan Tulakan
- IUP PT. Gemilang Limbah Internusa (PT. GLI) di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo
- PLTU Sudimoro
- Waduk Tukul Desa Karanggede Kecamatan Arjosari.

b. UKL-UPL

Pengawasan sudah dilaksanakan baik secara rutin/periodik, spot check/sampling/sidak maupun karena aduan masyarakat.

Berikut Disajikan Database Kinerja Bidang Lingkungan Hidup



NO	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas daerah layanan kebersihan	Ha	3.159,65	3.159,65	3.159,65	3.159,65	3.159,65	3.159,65	3.159,65
2	Luas Hutan Kota	Ha	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Sampah terangkut ke TPA	m ³ /hari	90,5	115	137	137	131,7	159,3	159,5
4	Individual septic tank	KK	99.751	109.726	179.116	179.116	179.116	179.116	179.116
5	Luas tutupan terumbu karang	Ha	10,97	10,97	10,05	10,05	11	11	11

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 4 (empat) program, antara lain:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 6

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program Lingkungan Sehat Perumahan	4,220,000,000.00	4,113,939,000.00	97.49	106,061,000.00
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	975,000,000.00	459,063,160.00	47.08	515,936,840.00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,785,463,000.00	1,691,310,432.00	94.73	94,152,568.00
Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	984,071,157.00	817,135,717.00	83.04	166,935,440.00
JUMLAH	7,964,534,157.00	7,081,448,309.00	80.58	883,085,848.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 6 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 6 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 6 tahun 2016 mencapai 100,30% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 6 yang pada tahun 2016 mencapai 80,58% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 883.085.848,00.

TUJUAN 4:

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN



SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan” diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan” capaian indikator kinerja dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tabel Target Indikator Kinerja Sasaran 7

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka usia harapan hidup	71.48	71.69	71.71	71.80	70.75	72.00	70.83	98.38



Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan dengan indikator kinerja utama adalah tercapainya angka usia harapan hidup dengan beberapa indikator pendukung sebagai berikut uraiannya:

Kesejahteraan penduduk selalu menjadi prioritas setiap negara ataupun daerah-daerah. Banyak indikator yang bisa digunakan untuk menilai kesejahteraan



penduduk, bisa dari dimensi pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia untuk melihat perkembangan dari ketiga dimensi tersebut. Ukuran standar tersebut dikenal dengan sebutan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di dalam IPM terdapat komponen Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai indikator dari dimensi kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan lama hidup rata – rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidupnya. Semakin tinggi AHH yang diperoleh saat baru lahir di suatu daerah, maka derajat kesehatan daerah tersebut semakin baik. Target Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pacitan yang tercantum dalam RPJMD untuk tahun 2014 sebesar 71,8 tahun dan dapat terealisasi 71,8 Tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2013 adalah 71,71 tahun, Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2012 adalah 71,69. Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2011 adalah 71,48. Sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2015 dari target 72 tahun terealisasi 70,75 dan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2016 dari target 72 tahun terealisasi 70,83 tahun. Hal ini terjadi Karena perubahan metode perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga secara menyeluruh ada penurunan level angka harapan hidup serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan perhitungan metode baru dibandingkan metode lama. Angka Harapan Hidup (AHH) Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 adalah 70,68 tahun, sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Indonesia pada tahun 2015 adalah 70,84 tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pacitan sudah lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Propinsi Jawa Timur. Angka Harapan Hidup (AHH) sangat berhubungan erat dengan tingkat kesehatan bayi dan ibu, otomatis berkaitan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Seperti yang kita ketahui,



Angka kematian dipengaruhi berbagai hal yang bisa menunjukkan keadaan suatu daerah khususnya kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Indikator Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup pada awal periode tahun 2011 mencapai 11,57 mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2016 mencapai 8,45 dan per 1000 kelahiran hidup.

Capaian kinerja ini pada tahun 2016 mencapai 8,45 atau 84,50% dari target RPJMD tahun 2016 yang berarti sudah mencapai target RPJMD tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung oleh program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Jumlah peserta Audit kematian Ibu Maternal di Kabupaten
- Jumlah peserta Audit Kematian Perinatal di Kabupaten
- Jumlah peserta Refreshing Kader P4K Dalam Rangka Percepatan Penurunan AKI dan AKB
- Jumlah peserta Evaluasi Sistem Rujukan Puskesmas PONEC-Rumah Sakit PONEK
- Jumlah peserta Evaluasi Replikasi USAID Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten
- Jumlah peserta Replikasi Program USAID di Puskesmas Dalam Peningkatan Pelayanan Publik
- Jumlah peserta Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Hamil
- Jumlah peserta Validasi Data dan Evaluasi Akselerasi Penurunan AKI/AKB Bagi Bidan
- Jumlah peserta Validasi Data dan Evaluasi Pengelola Program KB/Kespro di Kabupaten
- Jumlah sasaran Pelacakan Kasus Kematian Ibu/Bayi Jumlah sasaran Bimtek program KIA Ke Puskesmas
- Jumlah peserta AMP Sosial di Puskesmas
- Jumlah peserta Refreshing Manajemen Asfiksia pada bayi baru lahir
- Jumlah peserta Refreshing Penatalaksanaan MTBM Bagi Nakes
- Jumlah peserta Refreshing Penatalaksanaan MTBS Bagi Nakes



- Jumlah peserta Orientasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Melalui Penggalakan PKRE dengan Lintas Program
- Jumlah peserta Seminar Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Payudara
- Jumlah cetak buku Modul KIA
- Jumlah peserta peningkatan Kapasitas SDM Dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB
- Jumlah peserta Pertemuan Orientasi Supervisi Fasilitatif
- Jumlah peserta Pertemuan Orientasi Kohort Ibu, Bayi, Balita & Apras
- Jumlah peserta Pertemuan refreshing Drill Emergensi Maternal dan Neonatal

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sebesar 11,57 dan sampai akhir tahun 2016 mencapai 8,45 per 1000 kelahiran hidup, telah terjadi penurunan selama 6 tahun sebesar 2,57 per 1000 kelahiran hidup pada akhir tahun 2016 sebesar 3,12 per 1000 kelahiran hidup. Penurunan angka disini berarti Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil menurunkan Angka Kematian Bayi yang merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat.

AKB Propinsi Jawa Timur tahun 2015 sebesar 25,3/1.000 kelahiran hidup, dan Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan AKB tahun 2015 sebesar 22,23/1.000 kelahiran hidup. Sedangkan target MDGs untuk AKB pada tahun 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Berarti Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pacitan lebih rendah dibanding propinsi, nasional maupun target MDGs.

Meskipun dikatakan aman namun terjadinya kematian bayi menunjukkan rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat persalinan dan masa nifas, status gizi dan penyakit infeksi ibu. Peningkatan kematian bayi terjadi karena BBLR (berat bayi lahir rendah). Penanganan kasus BBLR oleh tenaga kesehatan/bidan kurang maksimal karena bidan yang dilatih manajemen BBLR baru 10% dari jumlah bidan yang ada.

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Indikator Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada awal periode tahun 2011 mencapai 105,17 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada akhir tahun 2016 mencapai 125,12 per 100.000 kelahiran hidup.



Capaian kinerja ini pada tahun 2016 mencapai 125,12 per 100.000 kelahiran hidup atau 119,16% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 karena terjadi peningkatan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Capaian kinerja tahun 2016 didukung oleh program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah peserta Audit kematian Ibu Maternal di Kabupaten
- Jumlah peserta Audit Kematian Perinatal di Kabupaten
- Jumlah peserta Refreshing Kader P4K Dalam Rangka Percepatan Penurunan AKI dan AKB
- Jumlah peserta Evaluasi Sistem Rujukan Puskesmas PONEK-Rumah Sakit PONEK
- Jumlah peserta Evaluasi Replikasi USAID Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten
- Jumlah peserta Replikasi Program USAID di Puskesmas Dalam Peningkatan Pelayanan Publik
- Jumlah peserta Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Hamil
- Jumlah peserta Validasi Data dan Evaluasi Akselerasi Penurunan AKI/AKB Bagi Bidan
- Jumlah peserta Validasi Data dan Evaluasi Pengelola Program KB/Kespro di Kabupaten
- Jumlah sasaran Pelacakan Kasus Kematian Ibu/Bayi Jumlah sasaran Bimtek program KIA Ke Puskesmas
- Jumlah peserta AMP Sosial di Puskesmas
- Jumlah peserta Refreshing Manajemen Asfiksia pada bayi baru lahir
- Jumlah peserta Refreshing Penatalaksanaan MTBM Bagi Nakes
- Jumlah peserta Refreshing Penatalaksanaan MTBS Bagi Nakes
- Jumlah peserta Orientasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Melalui Penggalakan PKRE dengan Lintas Program
- Jumlah peserta Seminar Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Payudara
- Jumlah cetak buku Modul KIA



- Jumlah peserta peningkatan Kapasitas SDM Dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB
- Jumlah peserta Pertemuan Orientasi Supervisi Fasilitatif
- Jumlah peserta Pertemuan Orientasi Kohort Ibu, Bayi, Balita & Apras
- Jumlah peserta Pertemuan refreshing Drill Emergensi Maternal dan Neonatal

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sebesar 105,17 dan sampai akhir tahun 2016 mencapai 125,12 per 100.000 kelahiran hidup, telah terjadi kenaikan selama 6 tahun sebesar 19,95 per 100.000 kelahiran hidup pada akhir tahun 2016. Peningkatan angka disini berarti Pemerintah Kabupaten Pacitan belum berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu yang merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat.

Angka Kematian Ibu tahun 2016 mencapai 125,12/100.000 Kelahiran Hidup. Angka riil kematian ibu tahun 2016 adalah 8 orang dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.394 kelahiran. AKI tahun 2015 mencapai 76,42/100.000 kelahiran hidup. Angka riil kematian ibu tahun 2015 adalah 5 orang AKI. Tahun 2014 mencapai 118,17/100.000 kelahiran hidup, tahun 2013 mencapai 133,03/100.000 kelahiran hidup, tahun 2012 mencapai 95,01/100.000 kelahiran hidup, AKI tahun 2011 mencapai 105,17/100.000 kelahiran hidup, sedangkan tahun 2010 yang mencapai 128,38/100.000 KH. Ada kenaikan AKI pada tahun 2016 bila dibandingkan tahun 2015 dan 2014.

Permasalahan dalam menurunkan AKI di Kabupaten Pacitan adalah belum semua tenaga bidan terlatih Asuhan Persalinan Normal (APN), tingkat pengetahuan dan ekonomi ibu hamil relatif rendah terutama di daerah pedesaan sehingga pengetahuan tentang bahaya kehamilan dan risiko tinggi pada kehamilan masih rendah, masih ada persalinan ditolong oleh dukun, minimnya sarana transportasi dari rumah ibu ke sarana pelayanan kesehatan sehingga sering terlambat mendapat pertolongan. Penanganan kasus kematian ibu dan bayi memerlukan upaya komprehensif yang memerlukan partisipasi dukungan dan kerjasama lintas sektor. Kematian ibu banyak juga dipengaruhi oleh faktor non kesehatan, dan penyakit yang diidap oleh ibu yang tidak berhubungan dengan kehamilan dan persalinan. Upaya penurunan AKI terus dilakukan antara lain melalui peningkatan



cakupan, mutu pelayanan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan kerjasama lintas sektor dan lintas program serta peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Siaga. Salah satu kegiatan Desa Siaga sebagai upaya penurunan AKI AKB adalah melalui P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) dengan kegiatan penempelan stiker di rumah ibu hamil agar apabila ada kelainan pada ibu hamil/ibu risiko tinggi dapat segera diketahui. Diharapkan anggota keluarga, masyarakat, petugas kesehatan dapat mengetahui risiko ibu hamil sehingga selalu dalam kondisi SIAGA dalam ikut berperan menolong persalinan.

Angka Kematian Anak Balita per 1.000 Kelahiran Hidup

AKABA Kabupaten Pacitan tahun 2016 sebesar 0,47/1.000 kelahiran hidup dari target 0,5/1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah riil 3 balita per 6.394 kelahiran hidup. Tahun 2015 AKABA sebesar 0,92/1.000 kelahiran hidup dari target 0,5/1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah riil 6 balita per 6.543 kelahiran hidup. AKABA Kabupaten Pacitan tahun 2014 sebesar 0,74/1.000 kelahiran hidup, tahun 2013 sebesar 1,20/1.000 kelahiran hidup, tahun 2012 sebesar 0,68/1.000 kelahiran hidup, tahun 2011 sebesar 0,26/1.000 kelahiran hidup, tahun 2010 sebesar 0,64/1.000 Kelahiran Hidup. Capaian kinerja ini pada tahun 2016 mencapai 106% dari target RPJMD. Capaian ini telah sudah memenuhi target RPJMD dengan dukungan program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah peserta Audit kematian Ibu Maternal di Kabupaten
- Jumlah peserta Audit Kematian Perinatal di Kabupaten
- Jumlah peserta Refreshing Kader P4K Dalam Rangka Percepatan Penurunan AKI dan AKB
- Jumlah peserta Evaluasi Sistem Rujukan Puskesmas PONEC-Rumah Sakit PONEK
- Jumlah peserta Evaluasi Replikasi USAID Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten
- Jumlah peserta Replikasi Program USAID di Puskesmas Dalam Peningkatan



Pelayanan Publik

- Jumlah peserta Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Hamil
- Jumlah peserta Validasi Data dan Evaluasi Akselerasi Penurunan AKI/AKB Bagi Bidan
- Jumlah peserta Validasi Data dan Evaluasi Pengelola Program KB/Kespro di Kabupaten
- Jumlah sasaran Pelacakan Kasus Kematian Ibu/Bayi Jumlah sasaran Bimtek program KIA Ke Puskesmas
- Jumlah peserta AMP Sosial di Puskesmas
- Jumlah peserta Refreshing Manajemen Asfiksia pada bayi baru lahir
- Jumlah peserta Refreshing Penatalaksanaan MTBM Bagi Nakes
- Jumlah peserta Refreshing Penatalaksanaan MTBS Bagi Nakes
- Jumlah peserta Orientasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Melalui Penggalakan PKRE dengan Lintas Program
- Jumlah peserta Seminar Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Payudara
- Jumlah cetak buku Modul KIA
- Jumlah peserta peningkatan Kapasitas SDM Dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB
- Jumlah peserta Pertemuan Orientasi Supervisi Fasilitatif
- Jumlah peserta Pertemuan Orientasi Kohort Ibu, Bayi, Balita & Apras
- Jumlah peserta Pertemuan refreshing Drill Emergensi Maternal dan Neonatal

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sebesar 0,5 dan sampai akhir tahun 2016 mencapai 0,47 per 1000 kelahiran hidup, telah terjadi penurunan 0,03 per 1000 kelahiran hidup pada akhir tahun 2016.

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebesar 4/1.000 kelahiran hidup, dan angka nasional AKABA sebesar 26,29/1.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015). Sedangkan target nasional dan target MDGs untuk AKABA pada tahun 2015 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Berarti Angka Kematian Anak Balita (AKABA) Kabupaten Pacitan lebih rendah dibanding angka propinsi dan nasional serta sudah memenuhi target MDGs.

Upaya yang dilakukan dalam menekan AKABA di Kabupaten Pacitan adalah



peningkatan penanganan penyakit penyerta anak balita, terbentuknya kelas ibu balita sehingga meningkatkan pengetahuan ibu balita tentang kasus penyakit pada balita sehingga ibu cepat mencari pertolongan/pencegahan, peningkatan peran aktif kader posyandu posyandu dalam kegiatan pelayanan anak balita.

Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan lama hidup rata – rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidupnya. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup (AHH) yang diperoleh saat baru lahir di suatu daerah, maka derajat kesehatan daerah tersebut semakin baik. Target Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pacitan yang tercantum dalam RPJMD untuk tahun 2014 sebesar 71,8 tahun dan dapat terealisasi 71,8 Tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2013 adalah 71,71 tahun, Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2012 adalah 71,69. Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2011 adalah 71,48. Sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2015 dari target 72 tahun terealisasi 70,75 dan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2016 dari target 72 tahun terealisasi 70,83 tahun. Hal ini terjadi Karena perubahan metode perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga secara menyeluruh ada penurunan level angka harapan hidup serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan perhitungan metode baru dibandingkan metode lama. Angka Harapan Hidup (AHH) Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 adalah 70,68 tahun, sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Indonesia pada tahun 2015 adalah 70,84 tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pacitan sudah lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Propinsi Jawa Timur.

Angka ini diharapkan dapat mencerminkan derajat kesehatan penduduk, karena apabila seseorang mempunyai derajat kesehatan yang baik maka ia mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan orang yang derajat kesehatannya buruk. Usia Harapan Hidup tidak hanya dipengaruhi faktor kesehatan namun



kesehatan mempunyai peranan penting terhadap panjang pendek umur seseorang.

Prevalensi Balita Gizi Buruk

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam MDGs adalah status gizi balita. Status gizi balita dapat diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Gizi buruk anak balita adalah anak usia dibawah 5 tahun yang mengalami status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score < 3 dan atau dengan tanda tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor)

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 dari target <1% jumlah balita, realisasinya 0,18% sehingga capaian kinerjanya 182%. Jumlah riil balita gizi buruk ada 64 anak dari 34.834 anak balita yang ditimbang. Pada tahun 2015 dari target <1% jumlah balita, realisasinya 0,25% sehingga capaian kinerjanya 180%. Jumlah riil balita gizi buruk ada 67 anak dari 27.267 anak balita yang ditimbang. Pada tahun 2014 realisasinya 0,31%, tahun 2013 realisasi 0,03%, tahun 2012 realisasi 0,14%, tahun 2011 realisasi 0,14%. Sedangkan jumlah balita gizi buruk tahun 2010 ada 34 anak atau prevalensinya 0,13%. Partisipasi masyarakat yang memiliki balita untuk datang dan menimbang balitanya ke posyandu (D/S) masih dibawah target 80% yaitu baru mencapai 78,53% dari jumlah balita yang ada, sedangkan angka D/S Jawa Timur tahun 2014 adalah 80,32%. Meski prevalensi gizi buruk pada posisi aman tetapi perlu diwaspadai karenanya penemuan kasus balita gizi buruk masih perlu dimaksimalkan, karena memungkinkan adanya balita gizi buruk yang belum tercover pelayanan kesehatan karena tidak pernah datang ke posyandu.

Kasus gizi buruk di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 0,25%. Prevalensi gizi buruk secara nasional pada tahun 2014 sebesar 5,3% sedangkan standar WHO (World Health Organization) adalah 5%, berarti kondisi di Kabupaten Pacitan masih dibawah angka propinsi dan nasional serta sesuai dengan standar WHO.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan



Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk.

Target cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan tahun 2016 adalah 100% realisasinya juga mencapai 100% karena dari 64 balita gizi buruk yang ditemukan seluruhnya mendapat penanganan sesuai standar. Semua balita gizi buruk (berat badan sangat kurus) sudah mendapat perawatan sesuai standar dari tenaga kesehatan. Jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena semakin gencarnya kegiatan penemuan dari petugas gizi dan kader posyandu untuk menemukan secara dini kasus gizi buruk. Kegiatan pelatihan pemantauan pertumbuhan bagi petugas gizi Puskesmas, peningkatan surveilans dan kegiatan bulan timbang merupakan upaya penemuan kasus gizi buruk secara dini yang cukup efektif. Meski penanganan sudah 100% kasus tetapi masih terjadi permasalahan dalam penanganan balita gizi buruk sebagai berikut : Belum maksimalnya penanganan gizi buruk karena tidak semua balita gizi buruk mendapatkan pelayanan rawat inap baik di puskesmas maupun di rumah sakit sesuai dengan tatalaksana yang ditentukan. Belum maksimalnya peran petugas dalam melaksanakan surveilans epidemiologi pelacakan gizi buruk.

Upaya pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan adalah optimalisasi kerjasama program penanganan gizi buruk melalui pelatihan peningkatan kapasitas petugas kesehatan, memaksimalkan penganggaran dana puskesmas untuk penanganan balita gizi buruk dan bumil KEK.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penanganan dan perawatan pada balita gizi buruk antara lain Pemberian Makanan Tambahan (MP-ASI), pengobatan penyakit penyerta, melakukan rujukan keluar daerah, pemantauan perkembangan BB rutin setiap bulan, pengembangan Program Orang Tua Asuh Gizi Buruk, pengembangan Panti Pemulihan Gizi Buruk, Penyuluhan dan KIE, Pemberdayaan masyarakat serta kerjasama sektor terkait dan swasta. Kegiatan Panti Pemulihan Gizi Buruk/CFC (Community Feeding Centre) merupakan pengembangan program gizi inovatif untuk mengatasi masalah gizi buruk balita dengan memanfaatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Diluncurkan pertama



kali di Desa Ledok Lor Puskesmas Sukorejo. Kegiatan ini sudah dikembangkan dan diduplikasi di Puskesmas Gemaharjo pada tahun 2011 dan di Puskesmas Kalak pada tahun 2012. Ke depan kegiatan ini perlu diterapkan di seluruh puskesmas Kabupaten Pacitan.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin ke sarana kesehatan strata 1 (puskesmas) baik rawat inap maupun rawat jalan.

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin tahun 2016 sebanyak 104.891 kunjungan dibandingkan jumlah seluruh masyarakat miskin sebanyak 201.976 jiwa atau sebesar 51,93%. Pada tahun 2015 sebanyak 93.720 kunjungan dibandingkan jumlah seluruh masyarakat miskin sebanyak 201.976 jiwa atau sebesar 46,40%. Pada tahun 2014 realisasinya 39,05%, tahun 2013 realisasi cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin sebesar 50,07%, tahun 2012 sebesar 38,17%, tahun 2011 sebesar 34,65%.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 (rumah sakit) baik rawat inap maupun rawat jalan.

Tahun 2016 target jumlah maskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit adalah 2,5% dari seluruh maskin di Kabupaten Pacitan sedangkan jumlah maskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit adalah yang berasal dari jumlah rujukan yang dilakukan puskesmas ke rumah sakit sebesar 4.627 kunjungan atau 2,54% dari seluruh maskin peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pacitan yaitu 201.976 jiwa.

Capaian Tahun 2015 5,14% Tahun 2014 sebesar 2,02%, Tahun 2013 sebesar 1,07%, Tahun 2012 sebesar 2,08% dan Tahun 2011 sebesar 0,98% maskin yang berobat ke rumah sakit.

Berarti ada peningkatan jumlah maskin Peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Dengan meningkatnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang BPJS Kesehatan maka



pemanfaatan kartu BPJS Kesehatan semakin meningkat

Cakupan peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB Aktif di Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 dari target 97% terealisasi sebesar 97,10% sehingga capaian kinerjanya 100,10%. Capaian indikator ini sudah memenuhi target SPM, target Renstra dan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan jumlah riil peserta KB aktif sebanyak 90.221 PUS.

Cakupan peserta KB aktif tahun 2015 di Propinsi Jawa Timur sebesar 76,68% sedangkan angka nasional sebesar 75,10%. Berarti capaian di Kabupaten Pacitan lebih tinggi dibandingkan angka propinsi dan nasional.

Data keikutsertaan PUS sebagai peserta KB aktif semakin lama ada kecenderungan semakin meningkat karena PUS yang memilih menggunakan metode non MPKJ seperti pil, kondom, pantang berkala semakin banyak yang tercatat di petugas kesehatan melalui kader kesehatan di desa. Ini berarti peran serta masyarakat di bidang kesehatan semakin meningkat.

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut adalah jumlah penduduk usia lanjut (>55 tahun) yang mendapat pelayanan kesehatan dibandingkan jumlah seluruh penduduk usia lanjut.

Capaian tahun 2016 sebesar 31,50% dari target RPJMD 22%. Angka riil lansia yang mendapat pelayanan kesehatan adalah 62.189 orang dibandingkan proyeksi jumlah lansia sebanyak 197.442 orang. Sedangkan Capaian tahun 2015 sebesar 55,11% dari target 21% sehingga capaian kinerjanya 262,42% dan untuk capaian tahun 2014 adalah 37,72% dari target 20% sehingga capaian kinerjanya 188,60%.

Cakupan pelayanan kesehatan lansia di Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 adalah 56,49% sehingga capaian Kabupaten Pacitan sudah lebih baik dibanding capaian propinsi. Puskesmas dan Dinas Kesehatan perlu membuat program inovatif agar lansia aktif dalam kegiatan posyandu lansia. Meningkatnya capaian indikator ini didukung semakin aktif dan berkembangnya posyandu lansia di Kabupaten Pacitan.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 7 (tujuh) program, antara lain:



Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 7

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6,998,752,000.00	6,736,468,416.00	96.25	262,283,584.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	35,956,362,837.00	31,119,671,868.00	86.55	4,836,690,969.00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	290,000,000.00	275,274,105.00	94.92	14,725,895.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	320,000,000.00	319,422,650.00	99.82	577,350.00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1,424,020,000.00	787,856,226.00	55.33	636,163,774.00
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	25,000,000.00	24,870,000.00	99.48	130,000.00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25,000,000.00	24,839,825.00	99.36	160,175.00
JUMLAH	45,039,134,837.00	39,288,403,090.00	90.24	5,750,731,747.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 7 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 7 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 7 tahun 2016 mencapai 98,38% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 7 yang pada tahun 2016 mencapai 90,24% akan tetapi masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.750.731.747,00.

SASARAN STRATEGIS 8

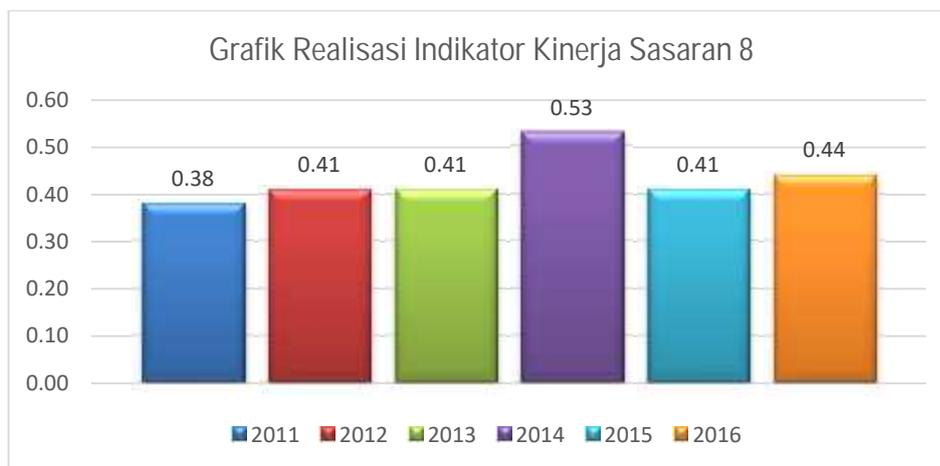
Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kesehatan



Sasaran "Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kesehatan" diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pencapaian sasaran "Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kesehatan" capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.38	0.41	0.41	0.53	0.41	0.44	0.44	100.00



Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dengan indikator utama yaitu rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dan beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk (%)

Rasio ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes dan poskesdes, rumah bersalin dan balai pengobatan serta klinik swasta per jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Diharapkan sarana Pelayanan kesehatan yang ada dapat terjangkau oleh masyarakat terutama di pedesaan.

Target tahun 2016 sebesar 0,44 terealisasi 0,44 per 1000 penduduk dengan capaian



kinerja 100%. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Pacitan adalah 241 unit sedangkan jumlah penduduk 557.725 jiwa. Terdiri 24 puskesmas, 54 puskesmas pembantu, 59 polindes, 97 poskesdes, 1 rumah sakit umum, 2 rumah sakit ibu dan anak, dan 9 klinik swasta. Sehingga rasionya 1 sarana kesehatan melayani 2.292 penduduk.

Capaian ini telah memenuhi target RPJMD tahun 2016 dengan dukungan program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah Pengadaan Media Promosi Kesehatan
- Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan
- Jumlah peserta Bimtek Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
- Jumlah Siaran Radio Kesehatan
- Jumlah Kuis Kesehatan
- Jumlah peserta Bimtek Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Puskesmas
- Jumlah peserta Temu Kader SBH Se-Kabupaten
- Jumlah peserta Pengiriman Kontingen Pertinas
- Jumlah peserta Refreshing kader posyandu
- Jumlah peserta Evaluasi Kegiatan PHBS dan UKBM
- Jumlah kader posyandu mendapat insentif
- Pengadaan kostum Promosi Kesehatan
- Jumlah peserta Pertemuan Pemberdayaan Tingkat Kecamatan
- Jumlah peserta Pembinaan Pokjanal Posyandu
- Jumlah peserta Rakor Tingkat Kabupaten
- Jumlah peserta Rakor Tingkat Kecamatan
- Jumlah pendamping Taman Posyandu
- Jumlah peserta Magang Kader
- Jumlah peserta Penguatan Advokasi
- Jumlah peserta Rapat Evaluasi Pendamping Taman Posyandu
- Jumlah sasaran monev Taman Posyandu
- Jumlah peserta Refreshing Kader Taman Posyandu



Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sebesar 0,38 dan pada akhir tahun 2016 mencapai 0,44, telah terjadi peningkatan selama 6 tahun sebesar 0,06. Semakin bertambahnya sarana pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta di Kabupaten Pacitan menjadikan banyak pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Standar nasional dalam Permenkes Nomor 81/Menkes/SK/II/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit adalah 1 orang dokter spesialis melayani 16.000 penduduk dan 1 orang dokter umum melayani 2.500 penduduk, sedangkan 1 orang dokter gigi melayani 9.000 penduduk. Target nasional tahun 2014, rasio dokter spesialis adalah 10 per 100.000 penduduk, dokter umum 40 per 100.000 penduduk. Secara umum jumlah tenaga medis di Kabupaten Pacitan sampai tahun 2016 masih sangat kurang sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2016 jumlah dokter baik pemerintah maupun swasta sebanyak 108 orang, sedangkan jumlah penduduk 552.307 jiwa. Rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 0,20 dari target 0,2 sehingga capaian kinerjanya adalah 105,00%. Terdiri dari 27 dokter spesialis, 64 dokter umum dan 17 dokter gigi. Rasio dokter spesialis per penduduk di Kabupaten Pacitan 1 dokter spesialis melayani 20.456 jiwa atau rasio 4,89 per 100.000 penduduk, 1 dokter umum melayani 8.630 jiwa atau rasio 11,59 per 100.000 penduduk dan 1 dokter gigi melayani 32.489 jiwa atau rasionya 3,08 per 100.000 penduduk.

Capaian kinerja ini pada tahun 2016 sebesar 0,20 atau 100% dari target RPJMD tahun 2016 dengan dukungan program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah pengiriman peserta pelatihan kesehatan
- Pengiriman Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Propinsi
- Jumlah peserta Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
- Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Data Profil SDM Kes



- Jumlah dokumen profil SDM Kesehatan
- Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dalam rangka peningkatan kinerja
- Jumlah sasaran pembinaan dan monitoring Ponkesdes
- Workshop bagi tenaga bidan
- Jumlah sasaran Pembinaan dan Monitoring Ponkesdes

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sebesar 0,17 dan padaakhir tahun 2016 mencapai 0,20 telah terjadi peningkatan selama 6 tahun sebesar 0,03. Pada tahun 2015 Rasio dokter spesialis di Jawa Timur adalah 16,83 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum 13,16 per 100.000 penduduk. Sedangkan jumlah tenaga medis di Indonesia yang memiliki STR tahun 2014 sebanyak 157.393 orang, dengan rincian 102.180 dokter umum, dan 26.896 dokter spesialis dan dokter gigi spesialis 2.436 orang serta 25.881 dokter gigi. Rasio dokter sebesar 51,19 per 100.000 penduduk, dan rasio dokter gigi sebesar 11,23 per 100.000 penduduk.

Upaya yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan adalah mengusulkan penambahan formasi tenaga dokter baik dokter umum maupun dokter gigi kepada Badan Kepegawaian Daerah, tetapi sampai saat ini belum ada rekrutmen CPNS Daerah. Usulan penambahan tenaga dokter di puskesmas sebanyak 24 orang dokter umum, tiap puskesmas mendapat tambahan 1 orang dokter umum, sedangkan usulan untuk dokter gigi adalah 17 orang, masing-masing puskesmas memiliki 1 orang dokter gigi. Dasar usulan penambahan tenaga medis tersebut adalah : Dengan adanya penambahan puskesmas rawat inap menjadi 13 di tahun 2015 diperlukan dokter di puskesmas rawat inap minimal 3 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi.

Untuk mendukung Program Puskesmas Siaga dengan UGD 24 jam diperlukan tenaga dokter umum minimal sejumlah 2 orang dan 1 orang dokter gigi untuk tiap Puskesmas Rawat Jalan.

Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk.

Standar nasional dalam Permenkes Nomor 81/Menkes/SK/II/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit adalah 1 orang perawat melayani 850 penduduk, 1 orang bidan melayani 1.000 penduduk dan 1 orang perawat gigi melayani 3.300



penduduk. Target nasional 2014 rasio perawat sebesar 158 per 100.000 penduduk dan rasio bidan 100 per 100.000 penduduk. Capaian kinerja ini telah melampaui target RPJMD tahun 2016 dengan dukungan program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah pengiriman peserta pelatihan kesehatan
- Pengiriman Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Propinsi
- Jumlah peserta Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
- Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Data Profil SDM Kes
- Jumlah dokumen profil SDM Kesehatan
- Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dalam rangka peningkatan kinerja
- Jumlah sasaran pembinaan dan monitoring Ponkesdes
- Workshop bagi tenaga bidan
- Jumlah sasaran Pembinaan dan Monitoring Ponkesdes

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sebesar 1,14 dan sampai akhir tahun 2016 mencapai 1,37, telah terjadi peningkatan selama 6 tahun sebesar 0,23. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pacitan tahun 2016 dari target 1,36 terealisasi 1,37 per 1.000 penduduk dengan capaian kinerja 100,74%. Jumlah riil tenaga paramedis baik pemerintah maupun swasta sebanyak 755 orang bidan dan perawat. Rasio paramedis terhadap penduduk pada tahun 2016 adalah 1 orang paramedis melayani 692 penduduk.

Rasio tenaga bidan di Propinsi Jawa Timur tahun 2014 sebanyak 36,08 orang per 100.000 penduduk, sedangkan rasio perawat 65,73 per 100.000 penduduk. Sedangkan secara nasional pada tahun 2014 rasio perawat terhadap penduduk sebesar 94,07 per 100.000 penduduk dan rasio bidan sebesar 49,56 per 100.000 penduduk

Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan sampai di tingkat kecamatan. Wilayah kerja puskesmas meliputi wilayah kerja administratif, yaitu satu wilayah kecamatan atau beberapa desa/kelurahan di satu wilayah kecamatan. Dalam



RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dan Renstra Dinas Kesehatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Cakupan Puskesmas adalah jumlah puskesmas yang ada dibandingkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Pacitan target dan capaian pada tahun 2011-2015 sama yaitu 200% sehingga capaian kinerjanya 100%. Sampai saat ini jumlah puskesmas di Kabupaten Pacitan adalah 24 unit yang terdapat di 12 kecamatan sehingga di setiap kecamatan ada 2 puskesmas. Merujuk pada standar nasional Permenkes setiap puskesmas idealnya melayani 30.000 penduduk, maka jumlah puskesmas di Kabupaten Pacitan telah memadai, yaitu setiap puskesmas melayani 23.013 jiwa penduduk sehingga tidak ada penambahan puskesmas baru. Tahun 2015 jumlah puskesmas di Propinsi Jawa Timur sebanyak 960 unit. Dengan jumlah penduduk sebanyak 38.847.561 jiwa maka rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 40.466, artinya setiap puskesmas melayani 40.466 jiwa penduduk. Sedangkan jumlah puskesmas di Indonesia tahun 2014 sebanyak 9.731 unit, dengan jumlah penduduk 252.124.458 jiwa maka rasio 1 : 25.909 yaitu setiap puskesmas melayani 25.909 penduduk

Cakupan Puskesmas Pembantu

Cakupan Puskesmas Pembantu mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah perbandingan jumlah puskesmas pembantu yang ada dibagi jumlah desa/kelurahan se kabupaten. Target Cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 adalah 32,16% terealisasi 32,16% sehingga capaian kinerjanya 100 %. Sedangkan pada tahun 2015 ada perubahan status 1 unit bangunan Puskesmas Pembantu dialihfungsikan menjadi Poskesdes sehingga jumlah bangunan puskesmas pembantu berkurang menjadi 54 unit. Jumlah Puskesmas Pembantu saat ini adalah 54 unit tersebar di 12 kecamatan atau di 171 desa/kelurahan. Rasio Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pacitan adalah 1 unit Pustu melayani 10.228 jiwa penduduk

Kunjungan Puskesmas/Visit Rate

Puskesmas dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penderita melalui pelayanan rawat jalan dan rawat inap bagi puskesmas dengan tempat tidur (puskesmas perawatan). Visit rate adalah angka kunjungan pasien sehat



dan sakit baik di pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada puskesmas / puskesmas perawatan, puskesmas pembantu dan jaringannya dibandingkan dengan jumlah penduduk disuatu wilayah dalam satu tahun.

Visit rate (kunjungan puskesmas) di Kabupaten Pacitan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 target kunjungan puskesmas sebesar 70,19% terealisasi 86,70% dengan capaian kinerja 123,52%. Artinya sebanyak 86,70% penduduk di Kabupaten Pacitan memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya selama tahun 2016, dengan angka riil 478.850 orang dari 557.725 jumlah penduduk. Visit Rate tahun 2015 target kunjungan puskesmas sebesar 70,19% terealisasi 85,75%. Visit Rate tahun 2014 target kunjungan puskesmas sebesar 70,19% terealisasi 76,25%. Tahun 2013 kunjungan puskesmas adalah 77,52%, tahun 2012 sebesar 70,19%, tahun 2011 sebesar 65,69%, sedangkan tahun 2010 sebesar 58,59%.

Kunjungan Puskesmas di Propinsi Jawa Timur tahun 2015 mencapai 86,1%, sehingga dapat dikatakan capaian Kabupaten Pacitan diatas angka propinsi.

Meningkatnya kunjungan puskesmas menandakan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana kesehatan baik gedung puskesmas, pustu, polindes, poskesdes, tenaga kesehatan, obat, alat kesehatan serta sarana transportasi puskesmas keliling. Semakin bertambah jumlah tenaga kesehatan bidan dan perawat yang menjangkau polindes dan poskesdes juga memberi andil terhadap peningkatan kunjungan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya

Prosentase puskesmas bersertifikat ISO

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan yaitu melalui Puskesmas yang pelayanannya bersertifikasi ISO. Prosentase puskesmas berstandar ISO adalah jumlah puskesmas yang telah lolos standarisasi internasional (ISO) dibagi jumlah seluruh puskesmas. Sampai akhir tahun 2016 di Kabupaten Pacitan sudah ada 7 puskesmas yang bersertifikat ISO dari 24 puskesmas yang ada sehingga realisasi kinerjanya adalah 29,17% dari target 25%. Capaian kinerja indikator ini adalah 116,68%. Sampai akhir tahun 2016 Puskesmas ISO adalah Puskesmas Punung,



Ngadirojo, Kebonagung, Tulakan, Arjosari, Tegalombo dan Tanjungsari.

Rasio Posyandu Per Satuan Balita

UKBM yang memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah posyandu. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama ibu, bayi dan anak balita. Posyandu memiliki 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare.

Tahun 2016 target rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Pacitan adalah 21,76‰ terelisasi sebesar 23,63‰ sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,59%. Jumlah posyandu tahun 2016 sebanyak 823 posyandu dan proyeksi jumlah balita ada 34.834 jiwa. Dengan rasio 1 : 42 artinya 1 posyandu melayani 42 balita.

Tahun 2015 target rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Pacitan adalah 21,76‰ terelisasi sebesar 23,17‰ sehingga capaian kinerjanya sebesar 106,48%. Jumlah posyandu tahun 2015 sebanyak 821 posyandu dan proyeksi jumlah balita ada 35.432 jiwa. Dengan rasio 1 : 43 artinya 1 posyandu melayani 43 balita.

Tahun 2014 target rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Pacitan adalah 21,76‰ terelisasi sebesar 21,79‰ sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,14%. Jumlah posyandu tahun 2014 sebanyak 812 posyandu dan proyeksi jumlah balita ada 37.265 jiwa. Berarti rasio jumlah Posyandu dengan jumlah balita adalah 1 : 46 yang artinya 1 posyandu dimanfaatkan 46 balita.

Tahun 2013 rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Pacitan terelisasi sebesar 21,25‰, tahun 2012 sebesar 21,76‰, tahun 2011 sebesar 21,61‰.

Jumlah posyandu di Propinsi Jawa Timur sampai tahun 2015 adalah 46.267 unit dengan rasio posyandu per satuan balita di Propinsi Jawa Timur adalah 14,92 per 1.000 balita. Berarti rasio jumlah Posyandu dengan jumlah balita adalah 1 : 67 yang artinya 1 posyandu dimanfaatkan 67 balita. Sedangkan standar nasional untuk 1 posyandu melayani 80 balita, berarti angka di Kabupaten Pacitan sudah memenuhi standar yang ditetapkan, lebih baik dari angka propinsi dan nasional.

Rasio Posyandu di Kabupaten Pacitan sudah memenuhi target karena meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mendirikan posyandu serta meningkatnya kesadaran



masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak, sehingga jumlah Posyandu bertambah di lokasi yang belum ada. Harapannya agar masyarakat mudah menjangkau sarana pelayanan tersebut.

Peningkatan kualitas Posyandu sebagai UKBM harus terus dijaga dan dilestarikan dengan penguatan kelembagaan posyandu melalui peningkatan kinerja Pokjanal Posyandu di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Selain itu adanya peningkatan kinerja dari para pengelola posyandu seperti kader posyandu melalui beberapa kegiatan antara lain mengikuti pelatihan peningkatan kinerja dan magang kader. Keberadaan petugas kesehatan di posyandu tidak dapat optimal tanpa peran aktif dari kader posyandu

Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit (%)

Indikator Kinerja Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit pada tahun 2016 sebesar 12,20 % atau mencapai 128,56% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 di capai melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan output yang dihasilkan adalah Terlaksananya pemenuhan kebutuhan insentif dokter spesialis definitif, jasa pelayanan spesialis residen dan jasa spesialis MoU.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 12,20% dan mengalami peningkatan sebesar 1,76% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Selama tahun 2016 jumlah pengunjung rumah sakit sebanyak 67.914 orang dengan proyeksi penduduk Kabupaten Pacitan 556.500 orang hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit.

Ambulan/mobil jenazah

Indikator Kinerja Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik untuk Ambulan/mobil jenazah pada tahun 2016 sebesar 80% atau mencapai 106,66% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 di capai melalui Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengadaan



Ambulance/mobil jenazah dengan output yang dihasilkan adalah Tersedianya ambulance rumah sakit dalam kondisi baik

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 80% dan mengalami peningkatan sebesar 2,22% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Ruang rawat inap/rawat jalan/penunjang medis/kantor

Indikator Kinerja Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik untuk Ruang rawat inap/rawat jalan/penunjang medis/kantor pada tahun 2016 sebesar 72% atau mencapai 105,23% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 di capai melalui Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengadaan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit dengan output tersedianya pagar rumah sakit yang representatif.
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III dengan output Tersedianya ruang rawat inap kelas III representatif.
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit dengan output Tersedianya gedung kantor rumah sakit yang representatif.
- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dengan output tersedianya rumah dinas rumah sakit representatif.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 72% dan mengalami peningkatan sebesar 2,43% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Peralatan pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik untuk Peralatan pelayanan kesehatan pada tahun 2016 sebesar 89,48% atau mencapai 104,84% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun



2016 di capai melalui Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan pengadaan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit dengan output tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit.
- Kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok melalui pengembangan ruang rawat inap, pengadaan alat kesehatan dan/atau pengadaan perlengkapan ruang pasien dengan output tersedianya peralatan kesehatan untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok.
- Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) dengan output tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 89,48% dan mengalami peningkatan sebesar 3,51% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Karyawan rumah sakit yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun Indikator Kinerja Karyawan rumah sakit yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun pada tahun 2016 sebesar 39,31% atau mencapai 151,02% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 di capai melalui Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan .

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis dengan output yang dihasilkan adalah Jumlah dokter yang mengikuti pendidikan dokter spesialis program kemitraan.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 39,31% dan mengalami penurunan sebesar 5,11% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 1 (satu) program, antara lain:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 8



PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	18,793,033,370.00	17,302,389,967.00	92.07	1,490,643,403.00
JUMLAH	18,793,033,370.00	17,302,389,967.00	92.07	1,490,643,403.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 8 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 8 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 8 tahun 2016 mencapai 100% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 8 yang pada tahun 2016 mencapai 92,07% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.490.643.403,00.

TUJUAN 5:

“MEMPERMUDAH AKSES PENDIDIKAN”



SASARAN STRATEGIS 9

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan

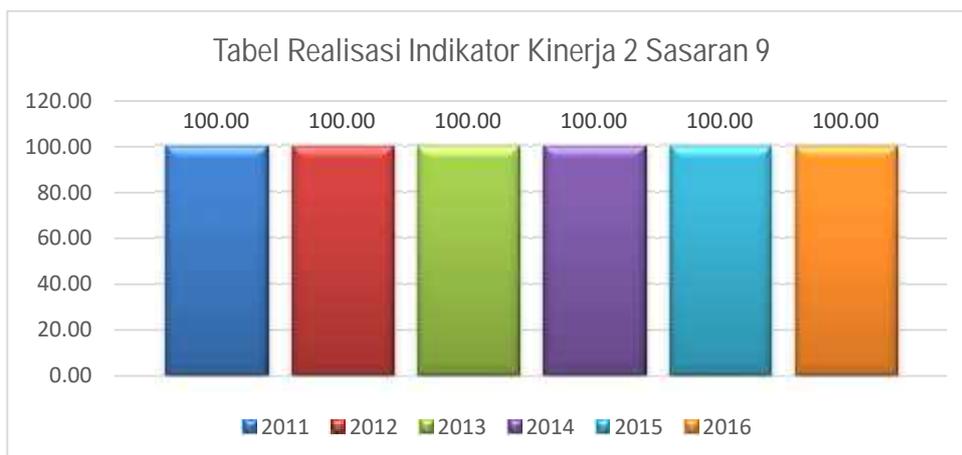
Sasaran “Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan” diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan guna pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat. Pencapaian sasaran “Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan” capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil								
	a. SD/MI	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	b. SMP/MTs	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Tabel Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 9





Keberhasilan pencapaian sasaran Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan dengan indikator utama yaitu tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil telah tercapai 100% sehingga penduduk di seluruh wilayah dapat mengakses pendidikan setingkat SD/MI maupun SMP/MTs tanpa harus ke kota, capaian ini juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

Fasilitas Pendidikan

Indikator kondisi ruang kelas baik untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun 2016 adalah 96,09%, 96,13%, dan 93,12% atau mencapai 100,34% untuk SD/MI, 102,15% untuk SMP/MTs, 100,56% untuk SMA/SMK/MA dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 95,76% untuk SD/MI, 94,11% untuk SMP/MTs, dan 92,6% untuk SMA/SMK/MA. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 96,09% untuk SD/MI, 96,13% untuk SMP/MTs, dan 93,12% untuk SMA/SMK/MA atau 3.095 ruang kelas SD/MI, 918 ruang kelas SMP/MTs, 650 ruang kelas SMA/SMK/MA dalam kondisi baik dan mengalami kenaikan sebesar 0,11% untuk SD/MI, 1,42% untuk SMP/MTs, dan 0,31% untuk SMA/SMK/MA apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Ketersediaan satuan pendidikan

Indikator ketersediaan satuan pendidikan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2016 adalah 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016.



Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100%. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100% dan sama dengan capaian tahun sebelumnya.

Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombel

Indikator jumlah peserta didik dalam setiap rombel SD/MI dan SMP/MTs adalah 100% dan 100% atau mencapai 100% untuk SD/MI dan 100% untuk SMP/MTs dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pembatasan kuota pada saat penerimaan siswa baru.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100% untuk SD/MI dan 100% untuk SMP/MTs atau 520 SD/MI dan 121 SMP/MTs mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 0% untuk SD/MI dan 0,96% untuk SMP/MTs apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Ketersediaan ruang kelas

Indikator ketersediaan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs adalah 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pembangunan ruang kelas baru dan sehab sedang/berang ruang kelas.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100% untuk SD/MI dan SMP/MTs atau 520 SD/MI, 121 SMP/MTs sudah memenuhi indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 0% untuk SD/MI dan SMP/MTs apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Ketersediaan Alat praktek IPA

Indikator ketersediaan alat praktek IPA adalah 78,86% atau mencapai 78,86% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pengadaan alat praktek dan peraga siswa.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 78,86% atau 97 SMP/MTs mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 11,65% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Ketersediaan Laboratorium

Indikator ketersediaan laboratorium SMP/MTs adalah 84,30% atau mencapai



84,30% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pembangunan ruang laboratorium dan pengadaan meubelair.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 84,30% atau 102 SMP/MTs sudah mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 3,81% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Ketersediaan Mebelair ruang guru

Indikator ketersediaan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs adalah 100% dan 100% atau mencapai 100% dan 100% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD untuk jenjang SD/MI dan hampir mencapai target untuk jenjang SMP/MTs. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pengadaan meubelair sekolah.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100% untuk SD/MI dan 100% SMP/MTs atau 520 SD/MI, 121 SMP/MTs sudah mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 0% untuk SD/MI dan 2,44% untuk SMP/MTs apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Ketersediaan Ruang Kepala Sekolah

Indikator ketersediaan ruang kepala sekolah adalah 88,43% atau mencapai 88,43% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pembangunan ruang guru.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 88,43% atau 107 SMP/MTs mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 1,44% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Ketersediaan buku SD/MI

Indikator rencana pengembangan kurikulum adalah 92,69% atau mencapai 92,69% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pengadaan buku oleh sekolah melalui dana BOS.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 92,69% atau 482 SD/MI sudah mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 1,15% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.



Ketersedian buku SMP/MTs

Indikator rencana pengembangan kurikulum adalah 87,80% atau mencapai 87,80% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pengadaan buku oleh sekolah melalui dana BOS.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 87,80% atau 108 SMP/MTs sudah mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 7,37% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Ketersedian alat peraga IPA SD/MI

Indikator rencana pengembangan kurikulum adalah 92,69% atau mencapai 92,69% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pengadaan buku oleh sekolah melalui dana BOS.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 92,69% atau 482 SD/MI sudah mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 1,15% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Ketersedian buku pengayaan dan referensi

Indikator ketersediaan buku pengayaan dan referensi SD/MI dan SMP/MTs adalah 89,23% dan 90,08% atau mencapai 89,23% untuk SD/MI dan 90,08% untuk SMP/MTs dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pengadaan buku oleh sekolah melalui dana BOS

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 89,23% untuk SD/MI dan 90,08% untuk SMP/MTs atau 464 SD/MI, 109 SMP/MTs sudah mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 2,31% untuk SD/MI dan 2,28% untuk SMP/MTs jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Jumlah kunjungan Taman Bacaan Masyarakat

Indikator jumlah kunjungan taman bacaan masyarakat adalah 110.658 atau mencapai 102,13% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 108.347. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan kegiatan penyelenggaraan implementasi budaya baca. Selain itu kenaikan ini didukung dengan semakin banyaknya kunjungan ke Rumah Pintar dan terkelolanya rumah pintar mini yang dikelola swadaya oleh masyarakat.



Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 110.658 dan mengalami kenaikan sebesar 6.426 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 3 (tiga) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 9

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,652,336,000.00	3,554,332,100.00	97.32	98,003,900.00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	24,489,446,143.00	21,858,033,506.90	89.25	2,631,412,636.10
Program Pendidikan Menengah	6,912,217,923.00	6,793,423,000.00	98.28	118,794,923.00
JUMLAH	35,054,000,066.00	32,205,788,606.90	94.95	2,848,211,459.10

Dari tabel capaian kinerja sasaran 9 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 9 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 9 tahun 2016 mencapai 100,00% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 9 yang pada tahun 2016 mencapai 94,95% akan tetapi masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.848.211.459,00.



SASARAN STRATEGIS 10

Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau

Sasaran “Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau” diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan guna pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau” dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 10 :

NO	INDIKATOR	REALISASI						2016	
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka rata-rata lama sekolah	6.94	6.99	6.95	7.06	7.27	7.08	7.35	103.81



Keberhasilan pencapaian sasaran Tersedianya pendidikan yang terjangkau dengan indikator utama angka rata-rata lama sekolah dapat tercapai 7,27 tahun dengan angka capaian lebih dari 100% dari target yang ditetapkan. capaian ini juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

Angka Rata-rata lama sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 adalah 7,35 tahun atau mencapai 103,81% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 7,08%. Hal ini dapat diartikan rata-rata agregat penduduk Kabupaten Pacitan adalah hanya mengenyam pendidikan formal hingga lulus SMP



kelas 1. Meskipun sudah banyak penduduk yang sudah bersekolah hingga jenjang pendidikan menengah bahkan Perguruan Tinggi tapi proporsinya lebih kecil bila dibandingkan dengan mereka yang lulus sekolah dasar. Hal ini tak lepas dari peran serta Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui beberapa kegiatannya antara lain pelatihan kecakapan hidup, penyelenggaraan kegiatan kejar paket B dan C, serta rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun. Selain itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa timur juga ikut berperan dalam peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pacitan melalui dana dekonsentrasi ataupun dana blockgrant.

Angka Partisipasi Kasar

Indikator APK SD/MI/Paket A pada tahun 2016 adalah 103,12% atau mencapai 100,02% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 103,10%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah dan bertambahnya kuota untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 103,12% atau 45.731 siswa SD/MI/paket A dibagi 44.346 penduduk usia 7-12 tahun dan nilainya sama apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Indikator APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2016 adalah 98,96% atau mencapai 100,98% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 98%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah dan bertambahnya kuota untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 98,96% atau 23.689 siswa SMP/MTs/paket B dibagi 23.938 penduduk usia 13-15 tahun dan mengalami kenaikan sebesar 0,34% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Indikator APK SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2016 adalah 72,36% atau mencapai 102,35% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 70,7%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah, bertambahnya kuota



untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan meningkatnya daya tampung pendidikan menengah.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 72,36% atau 17.865 siswa SMA/SMK/MA/paket C dibagi 24.690 penduduk usia 16-18 tahun dan mengalami kenaikan sebesar 0,82% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Angka Partisipasi Murni

Indikator APM SD/MI/Paket A pada tahun 2016 adalah 99,21% atau mencapai 100,21% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 99%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah dan bertambahnya kuota untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 99,21% atau 43.997 siswa SD/MI/Paket A berusia 7-12 tahun dibagi dengan 44.346 penduduk usia 7-12 tahun dan mengalami kenaikan sebesar 0,18% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Indikator APM SMP/MTs/Paket B pada tahun 2016 adalah 85,54% atau mencapai 100,62% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 85,01%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah dan bertambahnya kuota untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 85,54% atau 20.476 siswa SMP/MTs/paket B berusia 13-15 tahun dibagi dengan 23.938 penduduk usia 13-15 tahun dan mengalami kenaikan sebesar 0,4% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Indikator APM SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2016 adalah 61,71% atau mencapai 102,85% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 60%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah, bertambahnya kuota untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan meningkatnya daya tampung pendidikan menengah.



Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 61,71% atau 13.513 siswa SMA/SMK/MA/paket C berusia 16-18 tahun dibagi dengan 24.690 penduduk usia 16-18 tahun dan mengalami kenaikan sebesar 1,27% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator APK PAUD pada tahun 2016 adalah 69,55% atau mencapai 124,98% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 55,65%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan pemberian Bantuan Operasional PAUD, program Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan beberapa bantuan sosial/ hibah/ bantuan keuangan antara lain pembangunan gedung, pengadaan peralatan edukatif (APE dalam dan luar), serta sarana dan prasarana lainnya. Pemerintah Kabupaten Pacitan secara konsisten telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD dengan memberikan bantuan insentif terhadap tenaga pendidik PAUD setiap bulannya.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 69,55% atau 26.677 siswa PAUD dibagi dengan 38.358 penduduk usia 0-6 tahun dan mengalami kenaikan sebesar 6,53% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Pacitan, khususnya akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, pada tahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui APBD Kabupaten cukup memberikan kontribusi terhadap perkembangan Pendidikan Anak usia Dini yaitu melalui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan beberapa bantuan sosial/ hibah/ bantuan keuangan antara lain pembangunan gedung, pengadaan peralatan edukatif (APE dalam dan luar), serta sarana dan prasarana lainnya. Pemerintah Kabupaten Pacitan secara konsisten telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD dengan memberikan bantuan insentif terhadap tenaga pendidik PAUD setiap bulannya.

Selain itu Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan melalui dana dekonsentrasi yang cukup besar terhadap peningkatan mutu peserta didik di lembaga PAUD antara lain berupa Unit Gedung Baru PAUD Terpadu, Pusat Kegiatan Guru PAUD, bantuan motivasi penyelenggaraan PAUD, Bantuan PAUD Berbasis Parenting,



BOP PAUD, Bantuan organisasi mitra PAUD, Rintisan kelompok Bermain dan Pengadaan APE. Dengan adanya peningkatan sarana prasarana di lembaga PAUD dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD maka secara tidak langsung dapat meningkatkan ketercapaian APK PAUD di Kabupaten Pacitan. Peningkatan capaian APK PAUD tidak terlepas dari telah meratanya akses PAUD di Kabupaten Pacitan yaitu tersebarnya lembaga Kelompok Bermain (397 lembaga), Tempat Penitipan Anak (12 lembaga), Satuan PAUD Sejenis (216 lembaga) dan Taman Kanak-Kanak (295 lembaga) di 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan. Hal ini menunjukkan sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Agama tentang pentingnya penanganan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 0-6 tahun yang merupakan periode emas dalam kehidupan mereka mendapat dukungan positif dari masyarakat baik berupa pendirian lembaga PAUD secara swadaya ataupun dengan menyekolahkan anak mereka usia 0-6 tahun di lembaga PAUD. Pada tahun berikutnya capaian APK PAUD dan mutu PAUD di Kabupaten Pacitan diharapkan dapat meningkat melalui Pendirian PAUD Holistik Terintegratif serta peningkatan kompetensi pendidik PAUD di Kabupaten Pacitan melalui pelatihan-pelatihan, workshop baik yang diselenggarakan di Kabupaten Pacitan ataupun di Propinsi Jawa Timur.

Angka Putus Sekolah

Indikator angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun 2016 adalah 0%, 0,18%, dan 0,21% atau mencapai 100% untuk SD/MI, 99,99% untuk SMP/MTs, 99,88 untuk SMA/SMK/MA dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 0% untuk SD/MI, 0,08% untuk SMP/MTs, dan 0,05% untuk SMA/SMK/MA. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah (Rp.800.000,00/siswa/tahun untuk SD/SDLB, Rp.1.000.000,00/siswa/tahun untuk SMP/SMPLB/ SMPT, Rp. 1.200.000/siswa/tahun untuk SMA/SMK/MA), bantuan Gerakan Orang Tua Asuh, Beasiswa Siswa Miskin SD (Rp.450.000,00/siswa/tahun), Beasiswa Siswa



Miskin SMP (Rp.750.000,00/siswa/tahun), Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK (Rp.1.000.000,00/siswa/tahun) bantuan pendidikan program grindulu mapan.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 0% untuk SD/MI, 0,18% untuk SMP/MTs, dan 0,21% untuk SMA/SMK/MA atau 44 siswa SMP/MTS, 37 siswa SMA/SMK/MA putus sekolah dan mengalami penurunan sebesar 0% untuk SD/MI, 0,01% untuk SMP/MTs, dan 0,01% untuk SMA/SMK/MA apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 2 (dua) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 10

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	24,489,446,143.00	21,858,033,506.90	89.25	2,631,412,636.10
Program Pendidikan Menengah	6,912,217,923.00	6,793,423,000.00	98.28	118,794,923.00
JUMLAH	31,401,664,066.00	28,651,456,506.90	93.77	2,750,207,559.10

Dari tabel capaian kinerja sasaran 10 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 10 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 10 tahun 2016 mencapai 103,81% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 10 yang pada tahun 2016 mencapai 93,77% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.750.207.559,10



TUJUAN 6:

“MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN”

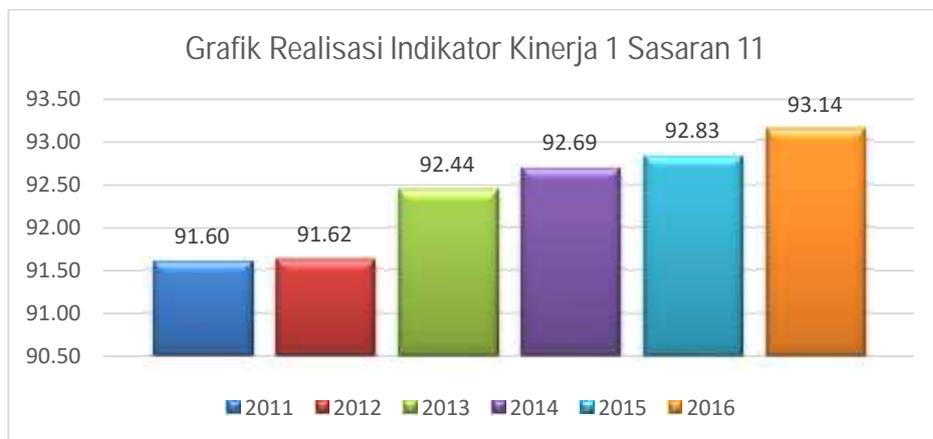
SASARAN STRATEGIS 11

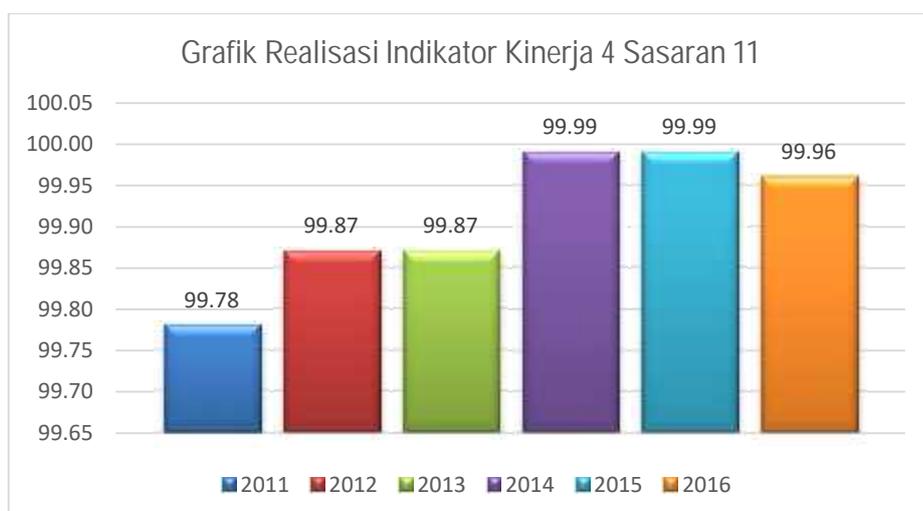
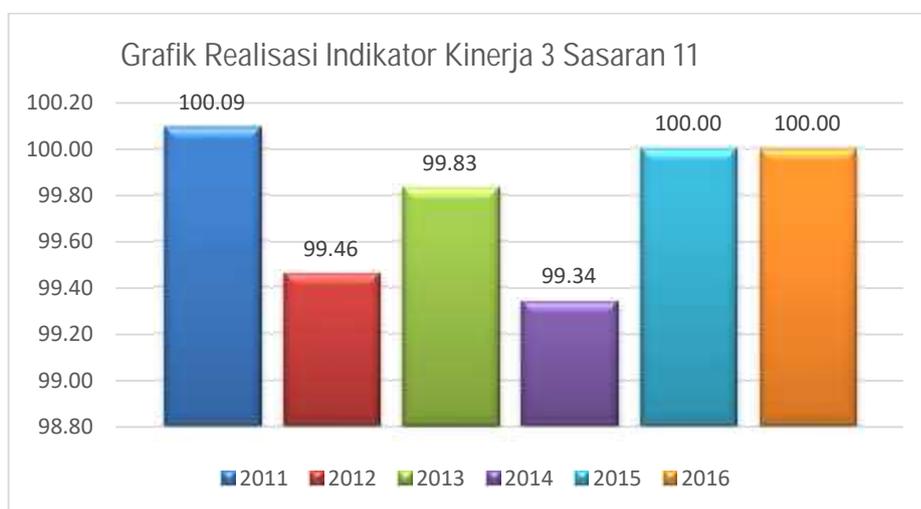
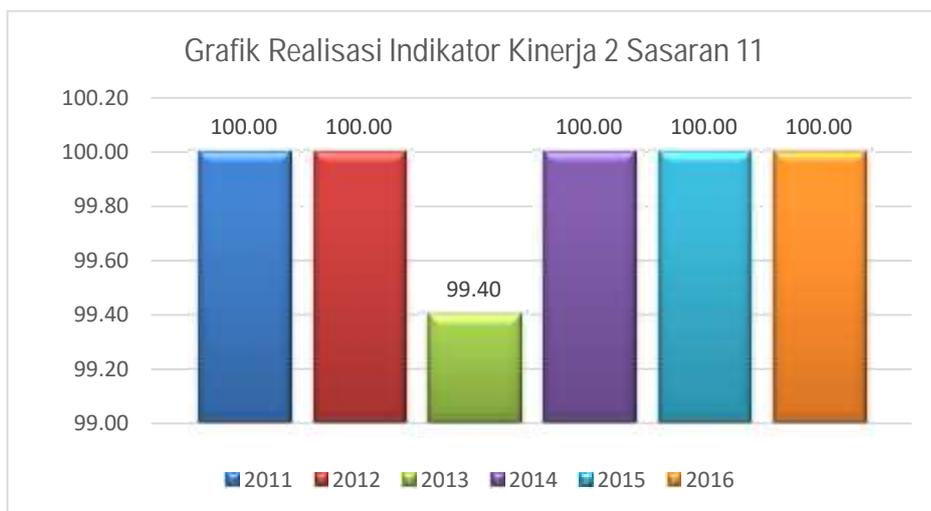
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan

Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Pendidikan” diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas hasil anak didik. Pencapaian kinerja sasaran “Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 11

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka melek huruf	91.60	91.62	92.44	92.69	92.83	91.65	93.14	101.63
	Angka kelulusan :								
	SD/MI	100.00	100.00	99.40	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	SMP/MTs	100.09	99.46	99.83	99.34	100.00	99.93	100.00	100.07
	SMA/SMK/MA	99.78	99.87	99.87	99.99	99.99	99.91	99.96	100.05
	Rata Rata Capaian Indikator Sasaran 11								100.44







Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan pendidikan dengan indikator utama angka melek huruf dan angka kelulusan siswa yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

Angka melek huruf

Indikator angka melek huruf pada tahun 2016 adalah 93,14% atau mencapai 101,63% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 91,65%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program seperti penyelenggaraan kejar paket A, B dan C serta melalui keaksaraan fungsional, mengadakan beberapa pelatihan kecakapan hidup serta meningkatkan kualitas pendidikan informal seperti pelatihan pengelolaan kursus-kursus yang ada di Kabupaten Pacitan.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 93,14% atau 424.343 dari 457.118 penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf dan mengalami kenaikan sebesar 0,31% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pacitan telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan kemampuan baca dan tulis masyarakat Pacitan baik itu melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, sehingga diharapkan yaitu beberapa beberapa kegiatannya yaitu penyelenggaraan kejar paket A, B dan C serta melalui keaksaraan fungsional, mengadakan beberapa pelatihan kecakapan hidup serta meningkatkan kualitas pendidikan informal seperti pelatihan pengelolaan kursus-kursus yang ada di Kabupaten Pacitan. Selain Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur juga berperan terhadap peningkatan angka melek huruf di Kabupaten Pacitan yaitu melalui dana dekonsentrasi/ blockgrant dan dana bantuan keuangan khususnya.

Angka Kelulusan

Indikator angka kelulusan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun 2016 adalah 100%, 100%, dan 99,96% atau mencapai 100% untuk SD/MI, 100,07% untuk SMP/MTs, 100,05% untuk SMA/SMK/MA dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100% untuk SD/MI, 99,93% untuk SMP/MTs, dan 99,91% untuk SMA/SMK/MA. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah



(Rp.800.000,00/siswa/tahun untuk SD/SDLB, Rp.1.000.000,00/siswa/tahun untuk SMP/SMPLB/ SMPT, Rp. 1.200.000/siswa/tahun untuk SMA/SMK/MA), bantuan Gerakan Orang Tua Asuh, Beasiswa Siswa Miskin SD (Rp.450.000,00/siswa/tahun), Beasiswa Siswa Miskin SMP (Rp.750.000,00/siswa/tahun), Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK (Rp.1.000.000,00/siswa/tahun) bantuan pendidikan program grindulu mapan.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100% untuk SD/MI, 100% untuk SMP/MTs, dan 99,96% untuk SMA/SMK/MA atau 7.681 siswa SD/MI, 7.505 siswa SMP/MTs, 4.518 siswa SMA/SMK/MA lulus dan mengalami kenaikan sebesar 0% untuk SD/MI, 0% untuk SMP/MTs, dan 0,03% untuk SMA/SMK/MA apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Nilai rata-rata ujian nasional

Indikator nilai rata-rata ujian nasional untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun 2016 adalah 7,58, 7,43, dan 7,81 atau mencapai 103,13% untuk SD/MI, 101,78% untuk SMP/MTs, dan 106,99% untuk SMA/SMK/MA dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 7,35 untuk SD/MI, 7,30 untuk SMP/MTs, dan 7,30 untuk SMA/SMK/MA. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pemberian hadiah untuk semua juara kelas dan peraih nilai ujian tertinggi sehingga siswa termotivasi untuk belajar lebih giat.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 7,58 untuk SD/MI, 7,43 untuk SMP/MTs, dan 7,81 untuk SMA/SMK/MA dan mengalami kenaikan sebesar 0,06% untuk SD/MI, 0,07% untuk SMP/MTs, dan 0,03% untuk SMA/SMK/MA apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Angka Melanjutkan

Indikator angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2016 adalah 102,66% dan 81,56 % atau mencapai 102,71% dan 106,41% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 99,85% untuk SD/MI ke SMP/MTs dan 76,64% untuk SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pemberian bantuan pendidikan untuk siswa miskin baik



dari dana APBD, APBD propinsi, dan APBN.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 102,56% untuk SD/MI ke SMP/MTs dan 81,56% SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dan mengalami kenaikan sebesar 2,39% untuk SD/MI ke SMP/MTs dan 1,33% untuk SMP/MTs ke SMA/SMK/MA apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun ini minat peserta didik lulusan SMP/MTs untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama SMK semakin meningkat, karena peserta didik selain diberikan wawasan pendidikan umum seperti di SMA, di SMK juga dibekali dengan program keahlian khusus yang nantinya akan bermanfaat sebagai bekal hidup di dunia kerja sehingga lulusan SMK langsung bisa bekerja di dunia usaha/wiraswasta. Selain itu peningkatan angka melanjutkan juga didukung dengan adanya Program Bantuan Khusus Siswa Miskin di tingkat pendidikan menengah yang ternyata terbukti dapat meningkatkan minat masyarakat miskin untuk tetap menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan menengah (biaya sekolah relatif lebih terjangkau).

Pemerintah Kabupaten Pacitan berkomitmen untuk lebih meningkatkan upaya rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun melalui penambahan lembaga SMK baru sehingga diharapkan di setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan minimal memiliki 1 lembaga SMK. Dengan tersebarnya lembaga SMK di 12 Kecamatan dan dengan konsistennya bantuan khusus siswa miskin di SMA/MA/SMK diharapkan APK, APM dan angka melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dapat meningkat.

Cakupan masyarakat terlayani pendidikan kecakapan hidup

Indikator cakupan masyarakat terlayani pendidikan kecakapan hidup adalah 0,471% atau mencapai 103,29% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 0,456%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 0,471% untuk dan mengalami kenaikan sebesar 0,009% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.



Cakupan anak berkebutuhan khusus yang mendapat pelayanan

Indikator cakupan masyarakat terlayani pendidikan kecakapan hidup adalah 54,48% atau mencapai 109,06% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 50%. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program pendidikan inklusi.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 54,48% untuk dan mengalami kenaikan sebesar 7,24% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Jumlah kunjungan Taman Bacaan Masyarakat

Indikator jumlah kunjungan taman bacaan masyarakat adalah 110.658 atau mencapai 102,13% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 108.347. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan kegiatan penyelenggaraan implementasi budaya baca. Selain itu kenaikan ini didukung dengan semakin banyaknya kunjungan ke Rumah Pintar dan terkelolanya rumah pintar mini yang dikelola swadaya oleh masyarakat.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 110.658 dan mengalami kenaikan sebesar 6.426 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 8 (delapan) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 11

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program pendidikan non formal	532,399,000.00	525,421,500.00	98.69	6,977,500.00
Program pendidikan luar biasa	118,508,900.00	107,497,900.00	90.71	11,011,000.00
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	180,660,000.00	171,244,800.00	94.79	9,415,200.00
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	433,000,000.00	431,291,850.00	99.61	1,708,150.00
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	24,489,446,143.00	21,858,033,506.90	89.25	2,631,412,636.10



program pendidikan menengah	6,912,217,923.00	6,793,423,000.00	98.28	118,794,923.00
program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	1,780,000,000.00	1,658,122,200.00	93.15	121,877,800.00
program manajemen pelayanan pendidikan	1,769,000,000.00	1,743,156,080.00	98.54	25,843,920.00
JUMLAH	36,215,231,966.00	33,288,190,836.90	95.38	2,927,041,129.10

Dari tabel capaian kinerja sasaran 11 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 11 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 11 tahun 2016 mencapai 100,44% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 11 yang pada tahun 2016 mencapai 95,38 sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.927.041.129,00



TUJUAN 7:
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DENGAN OPTIMALISASI POTENSI WILAYAH

SASARAN STRATEGIS 12

Terwujudnya Pusat Ekonomi Unggulan Daerah

Sasaran "Terwujudnya Pusat Ekonomi Unggulan Daerah" diarahkan untuk meningkatkan mewujudkan pusat-pusat ekonomi unggulan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Pencapaian kinerja sasaran "Terwujudnya Pusat Ekonomi Unggulan Daerah" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	1	1	1	2	4	3	4	133.33



Tercapainya sasaran terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah dengan indikator utama Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:



- Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif

Indikator Kinerja Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif sebesar 133,33% atau mencapai 4 Unit dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 4 unit dan sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)

Indikator Kinerja Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%) pada tahun 2016 sebesar 13,75% atau mencapai 122,22% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan output yang dihasilkan adalah Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 13,75% atau 11 Kelompok dan mengalami peningkatan sebesar 1,5% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Jumlah pameran/ expo produk unggulan dilaksanakan per tahun

Indikator Kinerja Jumlah pameran/ expo produk unggulan dilaksanakan per tahun pada tahun 2016 sebesar 6 kali atau mencapai 75% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 belum tercapainya target disebabkan ketersediaan anggaran untuk mengikuti berbagai event pameran belum mencukupi. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
- Pameran produk unggulan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 75% atau 6 kali dan mengalami penurunan sebesar 25 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Jumlah pameran/ ekspo produk unggulan yang dilaksanakan dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 yaitu:

NO	JUDUL PAMERAN / EXPO	LOKASI ACARA	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Gebyar Pasar Produ Daerah (GPPD Expo 2016	Grand Cty Surabaya	25 s/d 29 Mei 2016
2	Pameran Expo UKM	Surabya	11 s/d 14 Agustus 2016
3	Bazar Ramadhan Produk UMKM	PLUT KUMKM Kab.Pacitan	Juni 2016
4	Jogja Tourism Trade Invesment (Jogja TTI Expo)	Ambarukmo Plaza Jogjakarta	17 s/d 20 Nop 2016
5	Pameran Batik Bordir dan Aksesoris ke ii Provinsi Jawa Timur	Grand city Surabaya	11 s/d 15 Mei 2016
6	Pacitan Expo 2016 Gelar Produk Unggulan Daerah 20 s/d 26 Agustus 2016	Alon2 Kab.pacitan	20 s/d 26 Agustus 2016

- Pertumbuhan Industri (%)

Indikator Kinerja Pertumbuhan Industri (%) pada tahun 2016 sebesar 2,6% atau mencapai 104% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan pengembangan industri kecil menengah dan Program pengembangan sentra sentra industri potensial dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui peningkatan SDM bagi pelaku lindustri Kecil Menengah
- Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui Peningkatan SDM bagi Pelaku IKM
- Pengembangan produk unggulan



- Pendataan Industri Kecil Menengah

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 2,6% dan mengalami penurunan sebesar 1,35% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Cakupan bina kelompok pengrajin (%)

Indikator Kinerja Cakupan bina kelompok pengrajin 5,4(%)atau mencapai 100.55% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan pengembangan industri kecil menengah dan Program pengembangan sentra sentra industri potensial dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui peningkatan SDM bagi pelaku lindustri Kecil Menengah
- Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui Peningkatan SDM bagi Pelaku IKM.
- Pengembangan produk unggulan
- Pendataan Industri Kecil Menengah

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 5,4% dan mengalami peningkatan sebesar 1.45% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit)

Indikator Kinerja Jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit) mencapai 11.645 Unit dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan pengembangan industri kecil menengah dan Program pengembangan sentra sentra industri potensial dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui



peningkatan SDM bagi pelaku industri Kecil Menengah

- Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi bagi Industri Kecil Menengah
- Monitoring Industri Kecil Menengah

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 11.645 unit dan mengalami peningkatan sebesar 290 Unit apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Indikator Kinerja Jumlah Investor berskala nasional (PMDN / PMA) pada tahun 2016 sebanyak 187 investor Dalam Negeri (PMDN), atau mencapai 29,86%, capaian tersebut melampaui target RPJMD tahun 2016. Kegiatan ini dicapai melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan terhadap Penanam Modal yang mengajukan izin Usaha dengan nilai investasi minimal Rp 500.000.000,00 untuk diinvestasikan di Kabupaten Pacitan,

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program / kegiatan Fasilitasi dan koordinasi di bidang Investasi dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Terfasilitasinya Investor yang berminat melakukan kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Pacitan;
- Terfasilitasinya Pelayanan nonperizinan berupa informasi potensi dan peluang investasi,
- Terfasilitasinya pelayanan perizinan yang diajukan investor ;

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 187 investor (PMDN) yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Pacitan, dan mengalami peningkatan sebesar 44,96% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Nilai Realisasi Investasi (trilyun)

Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi pada tahun 2016 sebesar Rp 1.057 Trilyun atau menurun 60,11% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut



tidak mencapai target RPJMD tahun 2016 dikarenakan menurunnya realisasi investasi pemerintah pusat untuk pembangunan PLTU dan JLS pada 4 tahun terakhir.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program / kegiatan Manajemen Investasi Daerah dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terealisasinya nilai investasi swasta yang melakukan kegiatan Penanaman Modal;
- Terealisasinya nilai investasi pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan pembangunan; dan
- Terealisasinya nilai investasi pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Pacitan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai Rp. 1.057 Trilyun, dan mengalami peningkatan sebesar 52,5% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Data Nilai Investasi Kabupaten Pacitan s/d tahun 2016

N O	DATA BASE	SATU AN	TAHUN ANGGARAN						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Nilai Investasi	Rp. 000	3.156.867.868	3.500.576.666	2.442.591.046	82.911.267	547.920.113.026	693.846.020.000	1.057.000.000
2	Kegiatan Promosi Investasi	Kali	4	4	5	5	4	3	3
3	Jumlah Investor/ Unit Usaha	Unit	243	774	549	559	583	574	639
4	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	1.169	3.684	1.998	1972	1.9286	2.936	3231

- Daya Serap Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2016 sebesar 7.41 tenaga kerja atau menurun 97,79% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 dikarenakan berdirinya perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja banyak selama periode 2016 sangat terbatas, namun jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi



(UMKMK) yang rata – rata menyerap jumlah tenaga kerja yang relatif kecil menunjukkan peningkatan yang signifikan. Disamping itu menurunnya daya serap tenaga kerja dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah bahwa Perusahaan / pemberi kerja wajib mendaftarkan dan menanggung sebagian premi pekerja sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program / kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dengan output yang dihasilkan adalah terlaksanan pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal

Tetapi capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 7.41 tenaga kerja dan mengalami peningkatan sebesar 101,35% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)

Indikator Kinerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi pada tahun 2016 sebesar 52.4% atau mencapai 598.66% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 .Pencapaian ini dikarenakan adanya peningkatan nilai realisasi investasi swasta yang melakukan kegiatan penanaman Modal di Kabupaten Pacitan.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program / kegiatan Peningkatan manajemen Investasi Daerah dengan output yang dihasilkan adalah adanya kenaikan prosentase nilai realisasi PMDN.

Maka capaian kinerja kenaikan / penurunan nilai realisasi akhir tahun 2016 mencapai 52.4% dan mengalami peningkatan sebesar 95,2% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

Indikator Kinerja Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan pada tahun 2016 tersedia 2 informasi peluang usaha, atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016. Pencapaian ini dilakukan melalui penyusunan profil potensi dan peluang investasi dengan peluang usaha unggulan yang di informasikan kepada masyarakat dunia usaha adalah Industri pengolahan kayu dan jasa



pariwisata dan Perhotelan. Industri pengolahan kayu diinformasikan sebagai peluang usaha karena Pacitan memiliki potensi bahan baku yang cukup, sara prasarana yang memadai serta cukup tersedia tenaga kerja lokal. Sedang informasi peluang Usaha Perwisata dan Perhotelan karena Pacitan memiliki destinasi wisata yang menjanjikan dan berpotensi terjadi peningkatan kunjungan baik wisata domestik luar kota maupun mancanegara.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program / kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Terlaksananya fasilitasi masyarakat dunia usaha untuk mendapatkan informasi peluang usaha
- Terlaksananya koordinasi kerjasama antara pengusaha besar dengan pengusaha lokal

Maka capaian kinerja tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan akhir tahun 2016 mencapai 2 informasi usaha sektor/bidang usaha unggulan, dan capaiannya sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat kabupaten/ kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional

Indikator Kinerja Terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional pada tahun 2016 dilakukan 4 kali atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016. Pencapaian ini dilakukan melalui fasilitasi antar pengusaha lokal terhadap kebutuhan bahan baku dan pengusaha besar dengan pengusaha lokal.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program / kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Terlaksananya fasilitasi antar pengusaha lokal



- Terlaksananya fasilitasi kerjasama antara pengusaha besar dengan pengusaha lokal

Maka capaian kinerja Terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional akhir tahun 2016 mencapai 100% atau fasilitasi telah dilaksanakan 4 kali , dan capaiannya sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Terselenggaranya promosi peluang PM Kabupaten

Indikator Kinerja Terselenggaranya promosi peluang PM Kabupaten pada tahun 2016 dilaksanakan 3 kali pameran atau mencapai 200% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 Pencapaian ini dilakukan melalui Penyelenggaraan pameran investasi yang merupakan agenda rutin AITIS - Indonesia Investment Week 2016 Apkasi di Jakarta, dan pameran Batam Tourism, Trade and Investment Expo (Batam TTI Expo 2016).

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program / kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan output yang dihasilkan adalah Terinformasikannya peluang kegiatan penanaman Modal di Kabupaten Pacitan kepada masyarakat dunia usaha di berbagai daerah..

Maka capaian kinerja Terselenggaranya promosi peluang PM Kabupaten akhir tahun 2016 mencapai 3 kali pameran, dan capaiannya sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Terselenggaranya pendaftaran PMDN, Izin prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha PMDN, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usah Perusahaan, IMTA

Indikator Kinerja Terselenggaranya pendaftaran PMDN, Izin prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha PMDN, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usah Perusahaan, IMTA pada tahun 2016 sebesar 100 %, dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 .Pencapaian ini dilakukan melalui Penerbitan izin prinsip sebanyak 23 izin prinsip.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program / kegiatan



Penatalaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu dengan output yang dihasilkan adalah Ketepatan waktu pemrosesan izin sesuai Standar Layanan Perizinan Maka capaian kinerja Terselenggaranya pendaftaran PMDN, Izin prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha PMDN, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perusahaan, IMTA akhir tahun 2016 mencapai 100 %, dan capaiannya sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Lama Proses Perizinan

Indikator Kinerja lama proses perizinan pada tahun 2016 selama 5,2 hari kerja, atau mencapai 0,19% dari target RPJMD, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016. Kegiatan ini dicapai melalui peningkatan kompetensi petugas pelayanan perizinan, dan meningkatkan koordinasi dengan tim teknis Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program / kegiatan Penatalaksanaan pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan output yang dihasilkan adalah ketepatan waktu pemrosesan izin sesuai standart pelayanan.

Maka capaian kinerja lama proses perizinan akhir tahun 2016 mencapai 100% atau 5,2 hari kerja, dan sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Jumlah Perda / Perbup yang mendukung iklim usaha (dokumen)

Indikator Kinerja Jumlah Perda / Perbup yang mendukung iklim usaha (dokumen) pada tahun sebanyak 5 dokumen atau mencapai 25% dari target RPJMD, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016. Kegiatan ini dicapai melalui ketersediaan Regulasi yang masih relevan untuk mendukung iklim investasi yaitu:

- Perda No 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- Perbup. Nomor 13 A Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Pennaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- Peraturan Bupati No 9 Tahun 2013 Tentang Standart Pelayanan Publik



Bidang perizinan;

- Perbup No . 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pacitan No 7 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal,

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program / kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dengan output yang dihasilkan adalah terpenuhinya regulasi pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pacitan,

Maka capaian kinerja Jumlah Perda / Perbup yang mendukung iklim usaha akhir tahun 2016 mencapai 100% atau 5 dokumen, dan sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 9 (sembilan) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 12

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program perencanaan pembangunan ekonomi	1,335,000,000.00	1,327,518,100.00	99.44	7,481,900.00
Program kelitbangan	1,561,300,000.00	1,529,261,750.00	97.95	32,038,250.00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	160,000,000.00	155,495,365.00	97.18	4,504,635.00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	47,758,798.00	45,597,800.00	95.48	2,160,998.00
Program pengembangan pemasaran pariwisata	385,000,000.00	380,655,466.00	98.87	4,344,534.00
Program pengembangan destinasi wisata	2,468,708,000.00	2,460,794,041.00	99.68	7,913,959.00
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	627,628,000.00	624,942,852.00	99.57	2,685,148.00



Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	638,819,000.00	625,185,000.00	97.87	13,634,000.00
Program pengembangan sentra - sentra industri potensial	945,773,300.00	933,703,703.00	98.72	12,069,597.00
JUMLAH	8,169,987,098.00	8,083,154,077.00	98.31	86,833,021.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 12 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 12 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 12 tahun 2016 mencapai 133,33% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 12 yang pada tahun 2016 mencapai 98,31% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 86.833.021,00



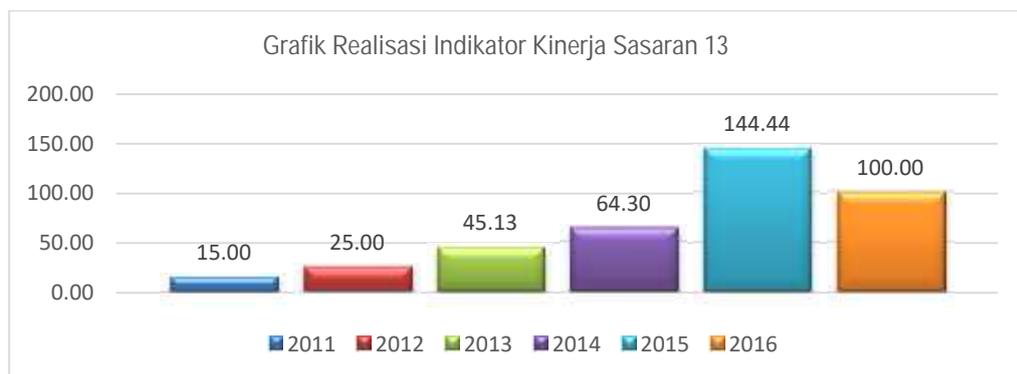
SASARAN STRATEGIS 13

Ketersediaan Pangan Daerah

Sasaran “Ketersediaan Pangan Daerah” diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan daerah untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pencapaian kinerja sasaran “Ketersediaan Pangan Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penguatan cadangan pangan	15.00	25.00	45.13	64.30	144.44	65.00	100.00	153.85



Tercapainya sasaran ketersediaan pangan daerah dengan indikator utama penguatan cadangan pangan yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Penguatan Cadangan Pangan

Indikator kinerja penguatan cadangan pangan pada tahun 2016 mencapai 100 dari target RPJMD tahun 2016 sebesar 65 atau sebesar 153,85, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 melalui penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebesar 100 ton.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan pengembangan lumbung pangan desa, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut ;



Jumlah lumbung dan lantai jemur yang dibangun. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 153,85% atau 100 ton beras.

- Regulasi ketahanan pangan

Indikator Kinerja regulasi ketahanan pangan pada tahun 2016 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan). Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100%.

- Ketersediaan energi dan protein perkapita

Indikator kinerja ketersediaan energi dan protein per kapita pada tahun 2016 sebesar 7.174 kkal/kapita/hari untuk kalori dan protein 137 gram/kapita/hari dengan rata-rata 282,85% atau mencapai 282,85% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 melalui peningkatan kalori dan protein dari kegiatan produksi perikanan darat dan laut serta bahan pangan nabati yang berasal dari kelompok padi-padian terutama beras dan jagung dan makanan berpati seperti ubi kayu.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang dapat menyumbang ketersediaan protein nabati dan hewani bagi penduduk dan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan untuk mengolah data produksi menjadi ketersediaan beserta analisisnya, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut ;

- Peningkatan ketersediaan beras 129.750 ton, jagung 108.613 ton dan ubi kayu 244.937 ton.
- Jumlah dokumen data pangan yang dihasilkan meliputi data produksi, data ketersediaan, informasi harga, informasi pasokan dan akses pangan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 282,85% dan mengalami peningkatan sebesar 0,18% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

Indikator kinerja ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di



daerah pada tahun 2016 sebesar 94,63% atau mencapai 100,2% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 melalui survei dan olah data pasokan, harga dan akses pangan.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Penyusunan data base potensi produksi pangan, dengan output yang dihasilkan adalah data pasokan, harga dan akses pangan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100,2% dan mengalami peningkatan sebesar 3,18% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Stabilitas harga dan pasokan pangan

Indikator kinerja stabilitas harga dan pasokan pangan pada tahun 2016 sebesar 99,5% atau mencapai 107,53% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 melalui survei dan olah data pasokan, harga dan akses pangan.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Penyusunan data base potensi produksi pangan, dengan output yang dihasilkan adalah Data pasokan, harga dan akses pangan.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 107,53% dan mengalami penurunan sebesar 2% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

PPH Konsumsi

Indikator kinerja PPH konsumsi pada tahun 2016 sebesar 79,85 atau mencapai 107,96% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 melalui serangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman di masyarakat.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut ;



- Terlaksananya sosialisasi dan edukasi pangan 3BA melalui PMTAS, Lomba Cipta Menu dan Apresiasi Pangan 3 BA
- Terlaksananya pemberdayaan kelompok KRPL

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 107,96% atau 79,85 dan mengalami peningkatan sebesar 0,01 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

PPH Ketersediaan

Indikator kinerja PPH ketersediaan pada tahun 2016 sebesar 88,91 atau mencapai 93,59% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 karena target yang ditetapkan mengacu target nasional dan terlalu tinggi sedangkan kondisi di Pacitan tidak memungkinkan untuk mencapainya seperti produksi pangan nabati yang masih didominasi oleh beras, jagung dan ubi kayu sedangkan pangan hewani seperti ikan, daging sapi dan unggas serta pangan nabati dari kacang-kacangan juga masih terbatas dan belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Pacitan.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Penyusunan data base potensi produksi pangan, dengan output yang dihasilkan adalah Tersedianya data Neraca Bahan Makanan dan PPH ketersediaan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 88,91 dan mengalami peningkatan sebesar 0,01% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Indikator kinerja pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada tahun 2016 sebesar 89,10% atau mencapai 106,07% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 melalui kegiatan pengambilan sampel makanan dan minuman secara acak di pasar tradisional, pedagang makanan minuman, warung dan toko sembako. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dengan output yang dihasilkan adalah Persentase sampel pangan yang aman.



Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 106,07% dan mengalami peningkatan sebesar 0,10% dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Penanganan daerah rawan pangan

Indikator kinerja penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2016 sebesar 94% atau mencapai 156,67% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 melalui pendampingan desa P2KP tahun 2015 dan 2016 sejumlah 33 desa.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Penanganan Daerah Rawan pangan, dengan output yang dihasilkan adalah Jumlah desa P2KP (desa rawan pangan) yang diberdayakan sebanyak 33 desa.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 156,67% atau 33 desa (dengan target 36 desa) dan mengalami peningkatan sebesar 2,33% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

NO	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	KETERSEDIAAN								
1	Beras	Ton	96.710	98.658	100.031	111.241	112.930	116.717	129.750
2	Jagung	Ton	108.761	94.353	121.550	145.370	85.201	102.256	108.613
3	Ubi Jalar	Ton	704	706	1.015	449	465	224	162,80
4	Ubi Kayu	Ton	434.975	479.771	533.202	598.437	338.672	381.531	244.937
5	Gula Merah	Ton	11.441	10.165	10.167	10.276		20.765	10.494
6	Kacang Tanah	Ton	8.720	8.582	8.533	10.309	8.130	6.381	18.696
7	Kedelai	Ton	3.160	3.760	3.621	3.463	49.140	6.026	3.328
8	Daging	Ton	1.905	1.959	1.940	1.902	1.956	2.4667	1.831
9	Telur	Ton	289	293	295	581	311	373	481
10	Ikan	Ton	4.828	5.467	5.956	5.956	5.132	8.521	9.499
B	KONSUMSI RIIL								
1	Beras	Ton	52.708	38.478	67.447	45.402	45.565	58.878	57.079
2	Jagung	Ton	3.598	151	1.904	1.985	2.354	2.408	2.335
3	Ubi Jalar	Ton	1.195	292	615	676	691	698	677
4	Ubi Kayu	Ton	6.681	1.509	19.059	2.260	3.369	3.431	3.408
5	Gula Merah	Ton	173	1.157	1.164	63	65	66	64
6	Kacang Tanah	Ton	391	595	598	211	216	219	212
7	Kedelai	Ton	5.883	2.753	2.769	11.699	11.965	33.575	32.549
8	Daging	Ton	2.721	346	1.670	2.914	2.980	2.941	2.851
9	Telur	Ton	3.028	1.725	2.502	3.463	2.980	3.503	3.396
10	Ikan	Ton	7.944	9.135	6.277	7.243	3.542	8.818	8.548



- Produksi perikanan (ton)

Indikator kinerja produksi perikanan tahun 2016 sebesar 13.813,35 ton atau mencapai 172,38% dari target RPJMD tahun 2016 dengan dukungan program pengembangan budidaya perikanan dan pengembangan perikanan tangkap dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana budidaya 9 paket
- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 paket
- Terlaksananya pelatihan dan bintek 7 kali

Kinerja produksi perikanan pada awal periode tahun 2011 mencapai 6.244,07 ton mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2016 mencapai 13.813,35 ton.

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai dengan 2016 sebesar 221,22% telah terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar 121,22% pada akhir tahun 2016. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 18,1%.

- Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)

Indikator Kinerja produksi perikanan kelompok nelayan pada awal periode tahun 2011 mencapai 6.224,07 ton mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi tahun 2016 mencapai 12.513,08 ton. Capaian kinerja ini pada tahun 2016 mencapai 177,82 % dengan dukungan program pengembangan perikanan tangkap dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 paket
- Terlaksananya restocking ikan 12 kecamatan
- Terlaksananya pelatihan dan bintek 1 kali
- Terlaksananya registrasi kapal 7 kecamatan pesisir
- Terlaksananya rabat jalan 2 paket di lingkungan pesisir

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai dengan 2016 sebesar 201,04% telah terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar 101,04% pada akhir tahun 2016. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 meningkat sebesar 14,9%.

- Produksi perikanan budidaya (kolam, Keramba, Minapadi) (Kg)

Indikator Kinerja produksi perikanan budidaya (kolam, karamba, minapadi) pada



awal periode tahun 2011 mencapai 353.792 kg mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan pencapaian tahun 2016 mencapai 925.292,50 kg.

Capaian kinerja ini pada tahun 2016 mencapai 120,93% dari target RPJMD tahun 2016. Dibandingkan dengan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan 15,5% dengan dukungan program pengembangan budidaya perikanan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana budidaya 9 paket
- Terlaksananya pelatihan dan bintek 7 kali
- Terlaksananya pengadaan sarana pembenihan 1 paket
- Tersalurkannya benih 16.000 ekor, pakan 480 kg dan bintek 1 kali bagi penerima program Anti Poverty Program (APP)
- Terlaksananya pengadaan calon induk dan bahan baku perikanan 3 paket
- Terlaksananya pendampingan budidaya rumput laut

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai dengan 2016 sebesar 261,54% dan telah terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar 161,54% pada akhir tahun 2016.

- Cakupan masyarakat pesisir yang mandiri (orang)

Indikator Kinerja cakupan masyarakat pesisir yang mandiri pada awal periode tahun 2011 mencapai 1.666 orang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2016 mencapai 4.611 orang. Capaian kinerja ini pada tahun 2016 mencapai 120,17%. Dibandingkan dengan tahun 2015 meningkat sebesar 2,15% dengan dukungan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terselenggaranya pelekangan, monitoring dan pembinaan 6 tpi
- Terlaksananya penguatan kelembagaan 7 kecamatan pantai
- Terlaksananya sertifikasi hak atas tanah nelayan dan pembudidaya sebagai jaminan permodalan 400 orang
- Tercetaknya kartu nelayan dan terverifikasinya kelembagaan nelayan
- Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan 3 kali

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 mencapai 276,77% telah terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar 176,77%



pada akhir tahun 2016.

- Jumlah pelanggaran yang tertangani (%)

Indikator Kinerja jumlah pelanggaran yang tertangani pada awal periode tahun 2011 mencapai 100% selalu tercapai target setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2016 dari jumlah 4 kasus yaitu pelanggaran jalur pelayaran, penggunaan bahan dan alat terlarang, pelanggaran terhadap permen No 1 tahun 2015 dan penangkapan penyu dapat tertangani 100%.

Capaian kinerja ini pada tahun 2016 mencapai 100 % dengan dukungan program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya patroli pengawasan dan pembinaan pokmaswas 7 kecamatan pantai
- Terpeliharanya mangrove, terumbu karang dan padang lamun 100%
- Terbangunnya pagar batas zona konservasi dan terlaksananya sosialisasi

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai dengan 2016 dengan jumlah kasus 28 kasus dan dapat terselesaikan dengan baik 100%

- Cakupan bina kelompok nelayan/pembudidaya/ pengolahan dan pemasaran (%)

Indikator Kinerja cakupan bina kelompok nelayan / pembudidaya / pengolahan dan pemasaran pada awal periode tahun 2011 mencapai 54.39% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2016 mencapai 100%. Jumlah kelompok nelayan, pembudidaya ikan maupun poklamsar sebanyak 352 terdiri dari 60 kelompok nelayan, 16 kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), 12 kelompok nelayan perairan umum, 182 kelompok pembudidaya ikan dan 82 kelompok pengolah pemasar hasil perikanan. Dari kelompok tersebut sebanyak 100% mendapat pembinaan baik oleh penyuluh lapangan maupun melalui pelatihan-pelatihan, magang dan penguatan kelembagaan kelompok.

Capaian kinerja ini pada tahun 2016 mencapai 100% dengan dukungan program pengembangan sistem penyuluhan perikanan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :



- Terlaksananya bintek, pelatihan dan magang 30 orang
- Terlaksananya bimbingan teknis kelembagaan pelaku usaha 60 orang

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai dengan 2016 jumlah kelompok yang dibina sebesar 100%.

- Cakupan penyuluh kelautan/perikanan yang kompeten (%)

Indikator Kinerja cakupan penyuluh kelautan / perikanan yang kompeten pada awal periode tahun 2011 mencapai 100% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2016 mencapai 100%.

Capaian kinerja ini pada tahun 2016 mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016 dengan dukungan program Pengembangan sistem penyuluhan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya bintek, pelatihan dan magang bagi penyuluh
- Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyuluh 12 paket

seluruh Penyuluh PNS kelautan dan perikanan wajib mengikuti diklat dasar kepenyuluhan. Mengingat rekrutmen penyuluh PNS Kelautan dan Perikanan terakhir tahun 2010 dan seluruh penyuluh kelautan dan perikanan sudah mengikuti diklat dasar ini sehingga capaian untuk cakupan penyuluh yang kompeten tercapai 100%.

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai akhir tahun 2016 mencapai 100%

- Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)

Indikator Kinerja produksi produk hasil olahan perikanan pada awal periode tahun 2011 mencapai 121,5 ton mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2016 mencapai 1.632,55 ton.

Capaian kinerja ini pada tahun 2016 mencapai 1.081% dari target RPJMD tahun 2016 dengan dukungan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya gemarikan 12 kecamatan
- Produk hasil olahan perikanan yang aman 100%

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengolahan 3 paket.

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016



mencapai 1343,66% telah terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar 1243,7% pada akhir tahun 2016. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 16,8%.

- Luas areal pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (Ha)

Indikator Kinerja luas areal pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar pada awal periode tahun 2011 mencapai 98,17 ha mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2016 mencapai 153,44 ha.

Capaian kinerja ini mencapai 118,90% dari target RPJMD tahun 2016 dengan dukungan program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Tersedianya sarana dan prasarana budidaya 2 paket
- Terlaksananya bintek dan pelatihan 60 orang

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai tahun 2016 mencapai 156,30% telah terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar 56,30% pada pada akhir tahun 2016. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 2%.

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung melalui 5 (lima) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 13

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Pogram Peningkatan cadangan pangan	1,376,603,701.00	1,355,851,156.00	98.49	20,752,545.00
Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	4,120,594,500.00	4,062,556,959.00	98.59	58,037,541.00
Program peningkatan produksi hasil peternakan	685,000,000.00	645,959,670.00	94.30	39,040,330.00
Program pengembangan budidaya perikanan	734,640,000.00	708,447,000.00	96.43	26,193,000.00
Program pengembangan perikanan tangkap	1,634,600,000.00	1,620,195,000.00	99.12	14,405,000.00
JUMLAH	8,551,438,201.00	8,393,009,785.00	97.39	158,428,416.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 13 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 13 tahun 2016 dapat dilihat bahwa



akumulasi capaian kinerja sasaran 13 tahun 2016 mencapai 153,85% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 13 yang pada tahun 2016 mencapai 97,39% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 158.428.416,00.



SASARAN STRATEGIS 14

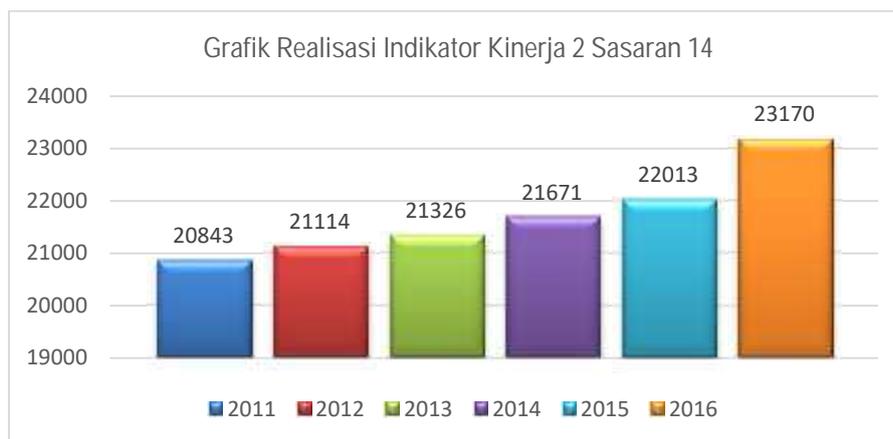
Lembaga UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Berdaya Saing

Sasaran “Lembaga UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Berdaya Saing” diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang diikuti dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “Lembaga UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Berdaya Saing” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Prosentase koperasi aktif	85.51	87.13	87.3	87.42	90.1	90.74	89.67	98.82
2	Jumlah UMKM	20843	21114	21326	21671	22013	22198	23170	104.38
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14									101.60





Tercapainya sasaran Lembaga UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Berdaya Saing dengan indikator utama koperasi aktif dan jumlah UMKM yang ada dan terbina di Kabupaten Pacitan yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

Koperasi aktif (%)

Indikator Kinerja Prosentase Koperasi aktif pada tahun 2016 sebesar 89,67% atau mencapai 98,82% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
- Diklat teknis perkoperasian
- Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 98,82% atau 495 unit dan mengalami peningkatan sebesar 2,17% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Jumlah UMKM (unit)

Indikator Kinerja Jumlah UMKM (unit) pada tahun 2016 sebesar 23.170 unit atau mencapai 104,37% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah



dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- Pameran Produk Unggulan
- Fasilitasi dana bergulir

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 104,37% atau 23.170 unit dan mengalami peningkatan sebesar 972 Unit apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Jumlah BPR/LKM (unit)

Indikator Kinerja Jumlah BPR/LKM (unit) pada tahun 2016 sebesar 5.534 unit atau mencapai 102.91% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan output yang dihasilkan adalah Fasilitasi dana bergulir.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 102.91% atau 5.534 unit dan mengalami peningkatan sebesar 91 Unit apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Cakupan bina UMKM

Indikator Kinerja Cakupan bina UMKM pada tahun 2016 sebesar 3.47% atau mencapai 190.65% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- Pameran Produk Unggulan
- Fasilitasi Dana Bergulir

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 6,45% atau 724 unit dan



mengalami peningkatan sebesar 85,88% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Peningkatan UMKM yang mendapat bantuan modal (%)

Indikator Kinerja Peningkatan UMKM yang mendapat bantuan modal (%) pada tahun 2016 sebesar 1.44% atau mencapai 83.72% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 belum tercapainya target disebabkan karena antara jumlah UMKM yang mengajukan pinjaman dan ketersediaan dana belum mencukupi.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan output yang dihasilkan adalah Fasilitasi Dana Bergulir.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 1.44% atau 289 unit dan mengalami peningkatan sebesar 0,01% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru (%)

Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru (%) pada tahun 2016 sebesar 5,25% atau mencapai 328,12% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- Pameran Produk Unggulan
- Fasilitasi Dana Bergulir

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,18 % dari tahun sebelumnya.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)

Indikator Kinerja Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%) pada tahun 2016 sebesar 13,75% atau mencapai 122,22% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2016



Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut

- Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 13,75% atau 11 Kelompok dan mengalami peningkatan sebesar 1,5% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 6 (enam) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 14

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	365,000,000.00	364,394,000.00	99.83	606,000.00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	543,000,000.00	542,505,150.00	99.91	494,850.00
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	330,000,000.00	326,269,000.00	98.87	3,731,000.00
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	-
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	295,775,000.00	289,515,500.00	97.88	6,259,500.00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	50,000,000.00	49,596,000.00	99.19	404,000.00
JUMLAH	1,603,775,000.00	1,592,279,650.00	99.28	11,495,350.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 14 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 14 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 14 tahun 2016 mencapai 101.60% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 14 yang pada tahun 2016 mencapai 99,28% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 11.495.350,00



SASARAN STRATEGIS 15

Pemasaran Komoditas Daerah

Sasaran “Pemasaran Komoditas Daerah” diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang diikuti dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “Pemasaran Komoditas Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Omsset penjualan komoditas unggulan (Milyar)	564.00	582.90	637.58	688.00	711.00	610.00	732.00	120.00



Tercapainya sasaran Pemasaran Komoditas Daerah dengan indikator utama omset penjualan komoditas unggulan (milyar) yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Jumlah pameran/ expo produk unggulan dilaksanakan per tahun

Indikator Kinerja Jumlah pameran/ expo produk unggulan dilaksanakan per tahun pada tahun 2016 sebesar 6 kali atau mencapai 75% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 belum tercapainya target disebabkan ketersediaan anggaran untuk mengikuti berbagai



event pameran belum mencukupi. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
- Pameran produk unggulan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 75% atau 6 kali dan mengalami penurunan sebesar 25 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Jumlah pameran/ ekspo produk unggulan yang dilaksanakan dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab.Pacitan pada tahun 2016 yaitu:

NO	JUDUL PAMERAN / EXPO	LOKASI ACARA	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Gebyar Pasar Produ Daerah (GPPD Expo 2016	Grand Cty Surabaya	25 s/d 29 Mei 2016
2	Pameran Expo UKM	Surabya	11 s/d 14 Agustus 2016
3	Bazar Ramadhan Produk UMKM	PLUT KUMKM Kab.Pacitan	Juni 2016
4	Jogja Tourism Trade Invesment (Jogja TTI Expo)	Ambarukmo Plaza Jogjakarta	17 s/d 20 Nop 2016
5	Pameran Batik Bordir dan Aksesoris ke ii Provinsi Jawa Timur	Grand city Surabaya	11 s/d 15 Mei 2016
6	Pacitan Expo 2016 Gelar Produk Unggulan Daerah 20 s/d 26 Agustus 2016	Alon2 Kab.pacitan	20 s/d 26 Agustus 2016

- Omset penjualan komoditas unggulan (milyar)

Indikator Kinerja Omset penjualan komoditas unggulan (milyar) pada tahun 2016 sebesar 732 M atau mencapai 120% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan output yang dihasilkan sebagai



berikut :

- Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
- Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
- Revitalisasi pasar daerah (DAK)

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 732 M dan mengalami peningkatan sebesar 21 M apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Omzet penjualan komoditas unggulan tahun 2016 berasal dari komoditas unggulan antara lain:

- 1 Olahan Kayu
- 2 Gula Kelapa
- 3 Batik
- 4 Batu Mulia
- 5 Olahan ikan
- 6 Olahan Ketela
- 7 Industri Pengolahan lain (olahan tanah, olahan kedelai, anyaman, makanan lainnya dan industri kreatif)

- Peningkatan promosi produk unggulan daerah (%)

Indikator Kinerja Peningkatan promosi produk unggulan daerah (%) pada tahun 2016 sebesar 85,71 % atau mencapai 76.75% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
- Pameran produk unggulan
- Pengembangan Produk Unggulan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 85,71 % atau 6 kali dan turun sebesar 28.57% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Jumlah PKL dan asongan yang mendapat modal usaha (%)

Indikator Kinerja Jumlah PKL dan asongan yang mendapat modal usaha (%) pada tahun 2016 sebesar 50% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun



2016, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ Peningkatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan output yang dihasilkan adalah Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 50% dan sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung melalui 4 (empat) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 15

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	295,775,000.00	289,515,500.00	97.88	6,259,500.00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	584,850,000.00	583,002,650.00	99.68	1,847,350.00
Program pengembangan kemitraan	1,102,710,000.00	1,100,278,000.00	99.78	2,432,000.00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	2,941,225,484.00	2,920,274,614.00	99.29	20,950,870.00
JUMLAH	4,924,560,484.00	4,893,070,764.00	99.16	31,489,720.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 15 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 15 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 15 tahun 2016 mencapai 120 % atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 15 yang pada tahun 2016 mencapai 99,16 sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 31.489.720,00



TUJUAN 8

MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DASAR

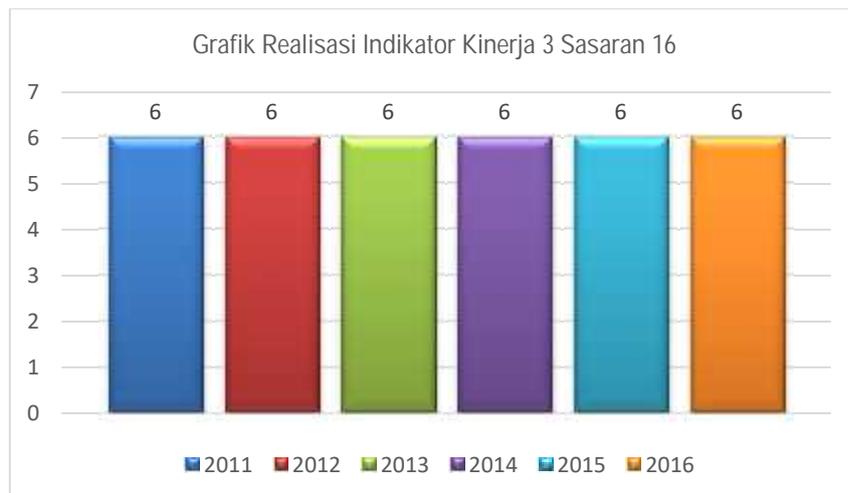
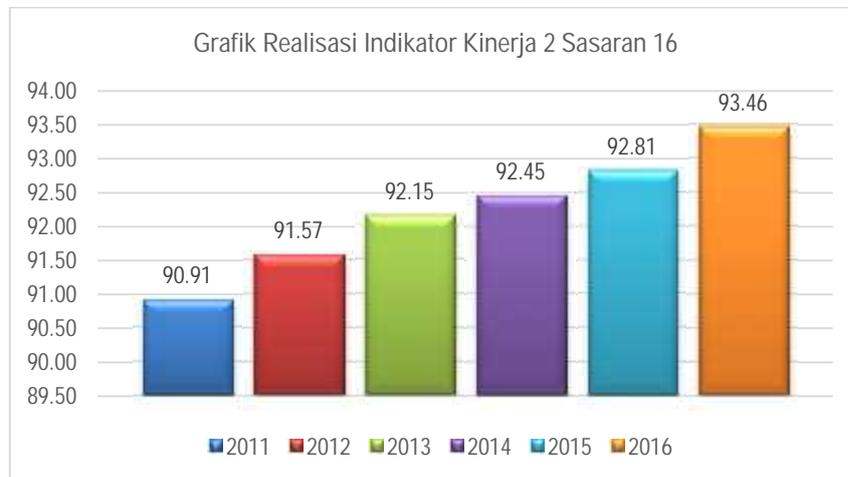
SASARAN STRATEGIS 16

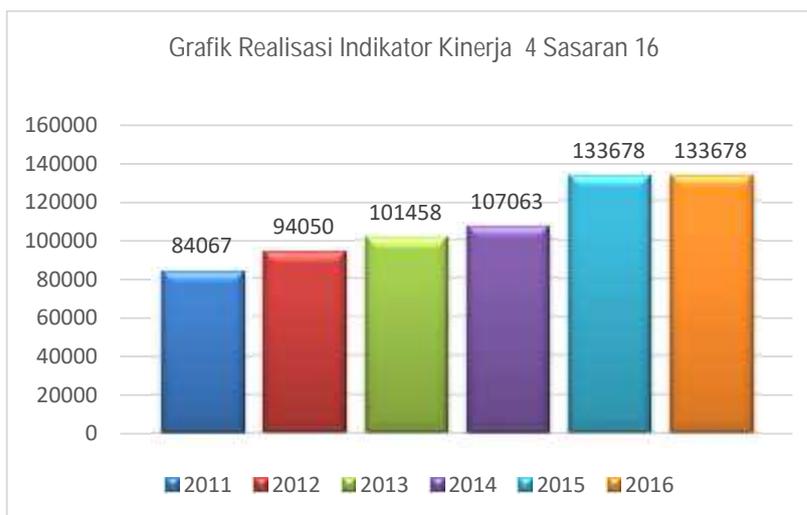
Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan Dan Perekonomian

Sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan Dan Perekonomian” diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrasturktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang dan jasa sehingga mampu menunjang akses perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan Dan Perekonomian” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	% jalan dan jembatan dalam kondisi baik:								
1	1) jalan	50.23	51.11	52.12	54.61	56.12	54.50	58.76	107.82
2	2) jembatan	90.91	91.57	92.15	92.45	92.81	92.30	93.46	101.26
3	Jumlah Terminal Bus/sub terminal	6	6	6	6	6	6	6	100.00
4	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	84.067	94.050	101.458	107.063	133.678	121.030	133.678	110.45
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16									104.88





Tercapainya sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan Dan Perekonomian dengan indikator utama jalan dan jembatan dalam kondisi baik, ketersediaan sarana dan prasarana terminal serta rumah tangga yang sudah terlayani kebutuhan listriknya yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Jalan dan jembatan dalam kondisi baik (%)

Capaian prosentase tahun 2016 Jalan dan jembatan dalam kondisi baik dihasilkan dari jumlah jalan kondisi baik sebanyak 468.900 m dan jembatan kondisi baik sebanyak 1.284,73 m (142 unit) dibandingkan dengan jumlah seluruh jalan tahun 2015 sebanyak 798.000 m dan jembatan sebanyak 1.378,83 m (153 unit). Capaian ini merupakan dampak dari :

- Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan pada tahun 2016 sebanyak 115.500 m
- Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan pada tahun 2016 sebanyak 623 m (21 unit)

Capaian kinerja Jalan dan jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2016 mencapai 58,76% mengalami peningkatan dengan target RPJM 2016 sebesar 54,50%, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 meningkat yaitu sebesar 4,26%.

- Panjang jalan kabupaten dilalui roda 4 (m)

Panjang jalan kabupaten dilalui roda 4 (m) pada tahun 2016 terealisasi 798,000 km maka indikator capaian kinerja jalan kabupaten (dilalui roda 4) telah mencapai



target yang ditetapkan yaitu 798,000 km. Target ini didukung oleh Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan sehingga capaian kinerja sama dengan capaian pada tahun 2015.

- Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota pada tahun 2016 terealisasi 100% sebesar 798,0 Km, sesuai dengan target sebesar 100%. Capaian ini didukung kegiatan Pembangunan Jalan dan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan. Realisasi ini sama dengan tahun 2015 sebesar 100%.

- Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan pada tahun 2016 terealisasi 100%, sesuai dengan target sebesar 100%. Capaian ini didukung oleh Kegiatan Pembangunan Jalan dan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Realisasi ini sama dengan tahun 2015 sebesar 100%.

- Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) pada tahun 2016 terealisasi 798.000 m, maka telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 547.004 m. Target tahun 2016 ini mengalami peningkatan sebesar 3.487 m dari capaian kinerja tahun 2016 sebesar 794.513 m

Tercapainya target ini didukung oleh Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan.

- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) pada tahun 2016 terealisasi 448.091 m, telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 381.732 m. Indikator ini didukung oleh Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, capaian tahun 2016 mengalami peningkatan



sebesar 12.328 m bila dibandingkan dengan capain kinerja tahun 2014 sebesar 435.763 m

- Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat pada tahun 2016 terealisasi 27, 502%, tidak dapat memenuhi target sebesar 60%. Hal ini dikarenakan sesuai standar SPM Jalan secara Nasional, hanya beberapa ruas jalan di Kabupaten Pacitan yang memenuhi standar keselamatan. Indikator ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Jalan dan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan. Namun demikian Capaian tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 15,42% dibanding capaian tahun 2015 sebesar 11,92%

- Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman pada tahun 2016 sebesar 60,87 %, maka telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 60%. Capaian ini didukung oleh kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan mengalami peningkatan sebesar 6,192% dari realisasi tahun 2015 sebesar 59,62%

- Jalan dan jembatan yang dibangun (%)

- Jalan yang dibangun pada tahun 2016 terealisasi 39,80%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 39,80%, berdasarkan panjang jalan yang dibangun sebesar 35,41 km dibanding dengan kebutuhan panjang jalan yang dibangun sebesar 88,96 km. Capaian ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Jalan dan meningkat sebesar 0,12% dari realisasi tahun 2015 sebesar 39,68%.

- Jembatan yang dibangun pada tahun 2016 terealisasi 85,60%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85,60%, berdasarkan jembatan yang telah dibangun sebesar 922,10 m dibandingkan kebutuhan jembatan yang dibangun sebesar 1.077 m. Capaian ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Jembatan, kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan dan



Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan. Realisasi ini meningkat sebesar 0,66% dari realisasi tahun 2015 sebesar 84,94%.

- Cakupan panjang jalan dan jembatan yang diinspeksi
 - Cakupan panjang jalan yang diinspeksi realisasi tahun 2016 sebesar 100%, telah mencapai target sebesar 100%, berdasarkan panjang jalan yang diinspeksi sebesar 798,00 km dibanding panjang jalan kabupaten sebesar 798,00 km. Capaian ini didukung kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan dan tercapai realisasi yang sama sebesar 100% dari realisasi tahun 2015.
 - Cakupan jumlah jembatan yang diinspeksi realisasi tahun 2016 sebesar 100%, telah mencapai target sebesar 100%, berdasarkan jumlah jembatan yang diinspeksi sebesar 153 unit dibanding panjang jalan kabupaten sebesar 153 unit. Capaian ini didukung kegiatan Inspeksi Kondisi Jembatan dan tercapai realisasi yang sama sebesar 100% dari realisasi tahun 2015..
- Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik (%)
Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik, meliputi :
 - Kondisi alat berat pada tahun 2016 terealisasi sebesar 68,57%, telah mencapai dari target sebesar 62,40%. Hal ini berdasarkan jumlah alat berat dalam kondisi baik sebesar 26 unit dibandingkan jumlah keseluruhan alat berat kebinamargaan sebesar 35 unit. Capaian ini didukung kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin Alat-alat Berat yang mampu mempertahankan kondisi dari tahun 2015 sehingga capaian tahun 2016 sama dengan capaian tahun 2015 sebesar 68,57%
 - kondisi alat laboratorium pada tahun 2016 terealisasi sebesar 93,55%, telah mencapai target sebesar 93,20%. Hal ini berdasarkan jumlah alat laboratorium dalam kondisi baik sebesar 29 unit dibandingkan jumlah keseluruhan alat laboratorium kebinamargaan sebesar 31 unit. Capaian ini didukung kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan alat – alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dan kegiatan Pengadaan alat – alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang mampu mempertahankan kondisi dari tahun 2015 sehingga capaian tahun 2016 sama dengan capaian tahun



2015 sebesar. 93,55%

- Jalan poros desa dan jembatan perdesaan dalam kondisi baik (%)
 - Jalan poros desa dalam kondisi baik pada tahun 2016 terealisasi sebesar 24,75% telah tercapai target sebesar 18,10%. Capaian ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan. Realisasi ini meningkat sebesar 2,74% dari realisasi tahun 2015 sebesar 22,01%.
 - Jembatan perdesaan dalam kondisi baik pada tahun 2016 terealisasi sebesar 50,10% sesuai dengan target sebesar 50,10%. Capaian ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan dan realisasi ini meningkat sebesar 5,6% dari realisasi tahun 2015 sebesar 44,50%
- Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
Indikator kinerja jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum baik yang melalui terminal di halte atau tempat-tempat pemberhentian angkutan umum pada tahun 2016 sebesar 10.855.174 atau 91,43% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016. Hal ini disebabkan penurunan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. Semakin mudahnya dalam kepemilikan kendaraan pribadi mempengaruhi juga mempengaruhi indikator kinerja ini.
Maka capaian kinerja pada tahun 2016 mencapai 10.855.174 telah terjadi penurunan sebesar 0,16% dibanding capain kinerja tahun sebelumnya.
- Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun
Indikator Kinerja Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun pada tahun 2016 sebesar 495.256 atau 17,34% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016. Hal ini disebabkan semakin mudahnya dalam kepemilikan angkutan pribadi.
Maka capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 495.256 telah terjadi penurunan sebesar 5,96% dibanding capaian tahun sebelumnya.
- Jumlah pelabuhan laut/ udara
Indikator Kinerja jumlah pelabuhan laut/udara pada tahun 2016 sebesar 3 lokasi atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah



mencapai target RPJMD tahun 2016. Pada tahun 2014 s/d 2016 tidak ada penambahan maupun jumlah pelabuhan laut maupun udara.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan Pelayanan Perhubungan Laut dengan output yang dihasilkan adalah terlaksananya pelayanan perhubungan laut 1 tahun.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100% atau 3 lokasi dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Jumlah Terminal Bis/ sub terminal

Indikator Kinerja jumlah terminal bis/sub terminal pada tahun 2016 sebesar 6 lokasi atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016. dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengujikan kendaraannya. Pada tahun 2016 tidak ada penambahan maupun jumlah terminal bis/sub terminal.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Uji Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan dengan output yang dihasilkan adalah terlaksananya rehanilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan dalam 1 tahun.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100% atau 6 lokasi dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota

Indikator kinerja tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota pada tahun 2016 sebesar 73,40 atau mencapai 97,86% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016. Sampai tahun 2016, dilihat dari panjang jalan kabupaten di Pacitan secara keseluruhan 1.031 km, jalur yang telah dibuka trayek secara keseluruhan sebesar 910 km.

Maka Capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 97,86% atau 73,40 dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 3,40% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.



- Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota

Indikator kinerja tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota pada tahun 2016 sebesar 62,80 atau mencapai 104,66% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan output yang dihasilkan adalah % angkutan laik jalan (lulus uji)

Maka Capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 62,80 atau 104,66% dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Indikator kinerja tersedianya halte pada setiap kab/kota yang dilayani angkutan umum dalam trayek pada tahun 2016 sebesar 108 atau mencapai 108% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016.

Pada tahun 2016 tidak ada pembangunan halte baru. Jumlah halte yang ada di Kabupaten Pacitan adalah 13 halte yang tersebar di 12 kecamatan.

Maka Capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 108 atau 108% dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Indikator kinerja tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek pada tahun 2016 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan



Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan dengan output yang dihasilkan adalah terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan dalam 1 tahun

Maka Capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100% dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guarddrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota

Indikator kinerja tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guarddrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota sebesar 60 atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengamanan Lalu Lintas dengan output yang dihasilkan adalah terlaksananya pengadaan pemasangan rambu-rambu lalu lintas 60 buah, marka 1000 m², guardrail 100 m, dan warning light 2 unit dalam 1 tahun

Maka Capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 60 atau 100% dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kab/kota pada tahun 2016 sebesar 97,8 atau mencapai 97,8% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016.

Capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 97,8 dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan data trayek yang ada sejumlah 639 yang ada di Kabupaten Pacitan terutama angkutan pedesaan, sedangkan jumlah trayek yang masih berlaku sebesar 482 dan angkutan umum yang laik jalan sebesar 625.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 97,8 dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya



- Prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik (%)
Indikator kinerja Prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik (%) pada tahun 2016 sebesar 81 atau mencapai 98,78% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016.
Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dengan output yang dihasilkan adalah % prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik
Maka Capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 81% dan mengalami penurunan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kondisi fasilitas traffic light sudah tua berjumlah 2 unit tidak beroperasi, 1 warning light tidak beroperasi.
- Angkutan laik jalan (%)
Indikator kinerja Angkutan laik jalan (%) pada tahun 2016 sebesar 75 atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016.
Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan output yang dihasilkan adalah % Angkutan laik jalan (lulus uji)
Maka Capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 75% dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengujikan kendaraannya. Keadaan tersebut dapat diatasi dengan pengadaan alat uji portable sehingga kegiatan uji dapat menjangkangkau daerah – daerah pelosok di Kabupaten Pacitan sehingga angkutan di Kabupaten Pacitan lebih terjamin laik jalannya.
- Jumlah rumah tangga pengguna listrik
Indikator Kinerja Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik pada tahun 2016 sebesar 81,17% atau mencapai 114,2% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut (sudah) mencapai target RPJMD tahun 2016 (dicapai melalui) Program Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik
Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program kegiatan



pengembangan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya pembangunan sumber energi alternatif.
- Terlaksananya pengembangan jaringan listrik.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 81,17% atau 133.678 dan mengalami (peningkatan) sebesar 6,11% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran indikator kinerja tersebut didukung melalui 7 (tujuh) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 16

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10,200,000,000.00	9,940,934,500.00	97.46	259,065,500.00
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan jembatan	113,960,649,484.00	112,454,952,992.61	98.68	1,505,696,491.39
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	65,120,000.00	61,886,150.00	95.03	3,233,850.00
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	91,798,454,761.00	89,798,016,450.00	97.82	2,000,438,311.00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	255,000,000.00	254,922,700.00	99.97	77,300.00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	53,000,000.00	51,066,000.00	96.35	1,934,000.00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	5,085,690,500.00	5,031,190,850.00	98.93	54,499,650.00
JUMLAH	221,417,914,745.00	217,592,969,642.61	97.75	3,824,945,102.39

Dari tabel capaian kinerja sasaran 16 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 16 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 16 tahun 2016 mencapai 104,88% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 16 yang pada tahun 2016 mencapai 97,75% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.824.945.102,39.



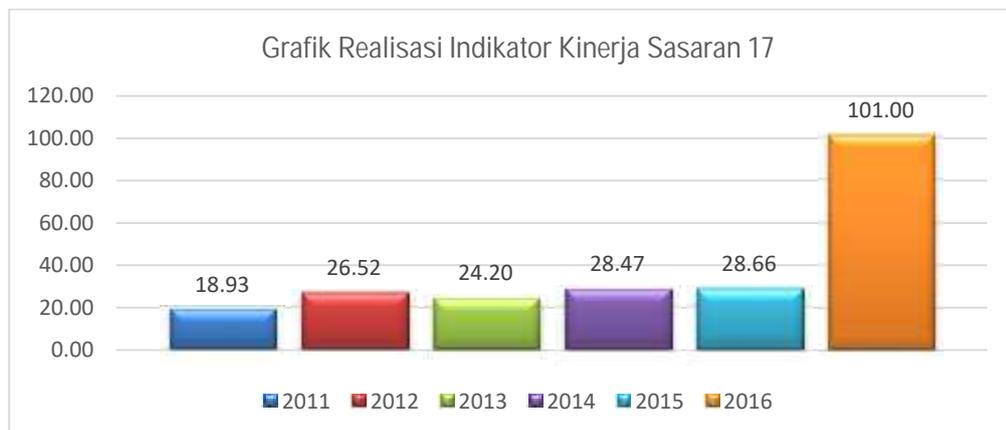
SASARAN STRATEGIS 17

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dasar

Sasaran “Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dasar” diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastuktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang dan jasa sehingga mampu menunjang akses perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dasar” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	18.93	26.52	24.2	28.47	28.66	18.77	101.00	538.09



Tercapainya sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dasar dengan indikator utama peran swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:



- Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD)

Indikator Kinerja Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD) pada tahun 2016 sebesar 5,82% atau mencapai 114% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan kegiatan Penguatan Pokjnal Posyandu (SIP) Sistem Informasi Posyandu dan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Optimalisasi Pokja Pengaduan Masyarakat TKPK, dan Penguatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD dan KPMD) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :
Terbentuknya Pokjnal Posyandu dan meningkatnya cakupan gizi anak sekolah SD terpencil

- Terfasilitasinya pengaduan masyarakat
- Terlaksananya Lomba Kinerja LPMD/K dan Lomba KPMD/K

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 5,82% atau 1.991 kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan mengalami kenaikan sebesar 0,37% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Indikator Kinerja Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2016 sebesar 87,07% atau mencapai 101,78% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan kegiatan Tim Penggerak PKK dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dengan output yang dihasilkan adalah Terlaksananya kegiatan Tim Penggerak PKK dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 87,07% atau 15.934 kelompok binaan PKK dan mengalami sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.



- LPM Berprestasi (%)

Indikator Kinerja LPM Berprestasi (%) pada tahun 2016 sebesar 0,40% atau mencapai 173% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan kegiatan Tim Penggerak PKK dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dengan output yang dihasilkan adalah Terlaksananya kegiatan Tim Penggerak PKK dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

Adanya LPM berprestasi tahun 2016 :

NO	PENGHARGAAN	DITERIMA	INSTANSI
1	Juara I UP2K PKK Tk. Provinsi Jawa Timur	Desa Nogosari Kec. Ngadirojo	TP-PKK Provinsi Jawa Timur
2	Pakarti Utama I Lomba UP2K Tingkat Nasional Kategori Kabupaten Tahun 2016	Desa Nogosari Kec. Ngadirojo	TP-PKK Pusat
3	Terbaik I Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016	Desa Gemaharjo Kec. Tegalombo	TP-PKK Provinsi Jawa Timur
4	Pakarti Utama I Lomba Posyandu Tingkat Nasional Kategori Kabupaten Tahun 2016	Desa Gemaharjo Kec. Tegalombo	TP-PKK Pusat
5	Juara I Kategori Penghargaan Kreativitas Menu Seimbang Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Sumberdaya Lokal Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016		TP-PKK Provinsi Jawa Timur
6	Juara II Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur	Desa Bogoharjo Kec. Ngnadirojo	TP-PKK Provinsi Jawa Timur

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 0,40% atau 8 LPM berprestasi dan mengalami kenaikan sebesar 0,17% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- PKK aktif (%)

Indikator Kinerja PKK aktif (%) pada tahun 2016 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan kegiatan Tim Penggerak PKK dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dengan output yang dihasilkan adalah Terlaksananya kegiatan Tim



Penggerak PKK dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100% atau 171 Tim Penggerak PKK (TP-PKK Desa/Kel,) Aktif dan mengalami sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Posyandu aktif(%)

Indikator Kinerja Posyandu aktif (%) pada tahun 2016 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan kegiatan Penguatan Pokjanal Posyandu (SIP) Sistem Informasi Posyandu dan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dengan output yang dihasilkan adalah Terbentuknya Pokjanal Posyandu dan meningkatnya cakupan gizi anak sekolah SD terpencil.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100% atau 823 Posyandu Aktif dan mengalami sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)

Indikator Kinerja Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%) pada tahun 2016 sebesar 101% atau mencapai 538% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dengan output yang dihasilkan adalah Terlaksananya kegiatan BBGRM dan Lomba Gotong Royong.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 101% atau swadaya masyarakat Rp 6.509.960.000 dan mengalami kenaikan sebesar 72,34 apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%)

Indikator Kinerja Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat (%) pada tahun 2016 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD



tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan kegiatan Pemeliharaan Pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) , Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan, Penerapan TTG dan Gelar TTG Nasional, dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pemetaan asset PNPM-MPd
- Tertib bantuan keuangan dan hibah serta monev bantuan keuangan dan hibah APBD Kabupaten Pacitan, Feminisasi Kemiskinan dan monev TMMD.
- Pengenalan hasil produk yang digelar.
- Terlaksananya kegiatan BBGRM dan Lomba Gotong Royong.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100% atau 5 Program pemberdayaan yang dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat dan mengalami sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Teknologi Tepat Guna (TTG) diterapkan (%)
Indikator Kinerja Tehnologi Tepat Guna (TTG) diterapkan (%) pada tahun 2016 sebesar 0% atau mencapai 0% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan kegiatan Penerapan TTG dan Gelar TTG Nasional dengan output yang dihasilkan adalah Pengenalan hasil produk yang digelar.
Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 0% atau tidak ada alat TTG yang dibantukan karena ada regulasi bahwa penerima bantuan harus berbadan hukum dan mengalami Penurunan sebesar 5,26 apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan (%)
Indikator Kinerja Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan (%) pada



tahun 2016 sebesar 100% atau mencapai 173,6% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan Kegiatan Pemeliharaan Pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan, Tilik Warga Pemerintah Kabupaten Pacitan, Identifikasi Sumber Mata Air (SMA), dan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pemetaan Aset PNPM-MPd.
- Tertib bantuan keuangan dan hibah serta money bantuan keuangan dan hibah APBD Kabupaten Pacitan, Feminisasi Kemiskinan dan Money TMMD.
- Terlaksananya pendataan identifikasi Sumber Mata Air (SMA)
- Terpenuhinya bantuan keuangan khusus kepada RTSM, PFK dan PK2

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100% atau 850 sarana prasarana pedesaan yang dibangun dan mengalami penurunan sebesar 1,19 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Lembaga ekonomi pedesaan (%)
Indikator Kinerja Lembaga Ekonomi Pedesaan (%) pada tahun 2016 sebesar 2,17% atau mencapai 116% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pendirian BUMDes, Program Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM), dan Pelatihan Manajemen Pasar Desa dan Pendataan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :
 - Terselenggaranya pembinaan dan pendampingan di 6 BUMDes dan terlaksananya lomba BUMDes.
 - Meningkatkan kemandirian masyarakat/pengelola UPK.
 - Jumlah pengurus pasar desa yang dibina dan teridentifikasinya Lembaga



Keuangan Mikro (LKM).

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 2,17% atau 82 Lembaga Ekonomi Pedesaan Baru dan mengalami penurunan sebesar 1,19 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung melalui 2 (dua) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 17

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	522,500,000.00	521,461,987.00	99.80	1,038,013.00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	235,000,000.00	234,388,910.00	99.74	611,090.00
JUMLAH	757,500,000.00	755,850,897.00	99.77	1,649,103.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 17 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 17 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 17 tahun 2016 mencapai 538,09% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 17 yang pada tahun 2016 mencapai 99,77 sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.649.103,00.



Tujuan 9:
MENINGKATKAN TATANAN SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG BERBUDAYA, BERBUDI LUHUR DAN DAMAI

SASARAN STRATEGIS 18

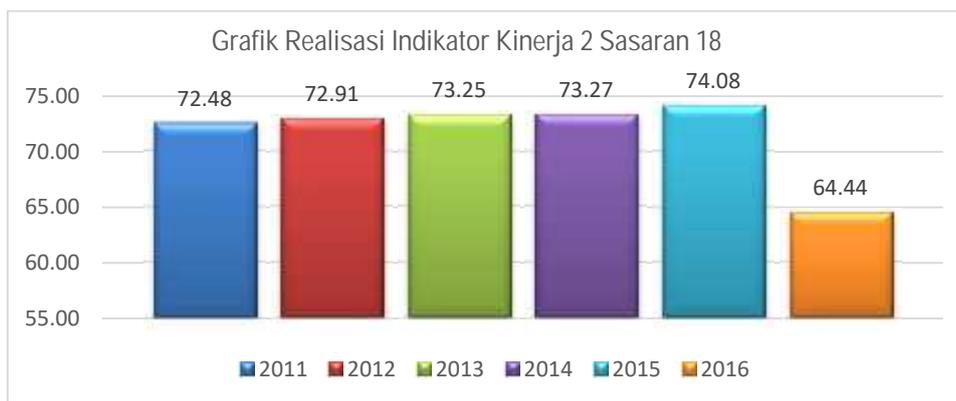
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Rukun Dan Damai

Sasaran “Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Rukun Dan Damai” diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang dan jasa sehingga mampu menunjang akses perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Rukun Dan Damai” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka kriminalitas	18.93	26.52	24.20	28.47	1.90	1.5	1.4	107.14
2	IPM	72.48	72.91	73.25	73.27	74.08	73.41	64.44	87.78
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18									97.46





Tercapainya sasaran Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Rukun Dan Damai dengan indikator utama penurunan angka kriminalitas dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut

Kasus tindak kriminal di Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 sebanyak 132 kasus. Dengan demikian angka kriminalitas di Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 mengalami penurunan 0,5% dibanding tahun 2015, yaitu tahun 2015 angka kriminalitas 1,9 dan tahun 2016 ada 1,4. Capaian kinerja indikator Angka Kriminalitas tahun 2016 mencapai 107,14% dari target 1,5

Capaian indikator kinerja ini didukung oleh :

- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui kegiatan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui kegiatan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pacitan tahun 2016 ada 67 orang. Jika dibanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2016, sejumlah 577.725 jiwa, maka rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada tahun 2016 adalah 1,03. Dengan demikian dari target 0,99 yang ditetapkan tahun 2016 sudah lebih 0,004 dari target.

Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (%)

Jumlah Petugas LINMAS di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 ada 5.402 orang, Jika dibanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sejumlah



599.476 jiwa, maka rasio jumlah LINMAS per 10.000 penduduk pada tahun 2016 adalah 90. Dengan demikian dari target 99 yang ditetapkan tahun 2016 masih belum tercapai, namun jika dibanding capaian Tahun 2015 mengalami perkembangan 7%.

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan

Jumlah pos siskamling di Kabupaten Pacitan pada Tahun 2016 ada 3884 pos siskamling. Dari data tersebut Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan pada tahun 2016 mencapai 22,71 sehingga capaian kinerja Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan tidak tercapai target yang ditetapkan pada tahun 2016.

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Di Kabupaten Pacitan

Capaian target cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Pacitan pada akhir tahun 2016 mencapai 104%, yaitu dari target 90% yang ditetapkan daerah di Tahun 2016 terealisasi 94%. Perhitungan tersebut diperoleh dari jumlah pelanggaran PERDA di Tahun 2016 sebanyak 242 pelanggaran dan terselesaikan 229. Dan jika disesuaikan target secara nasional yaitu 100% di Tahun 2016, di Kabupaten Pacitan telah mencapai 94%. Capaian target tersebut didukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2016 yaitu :

- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, melalui kegiatan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat.
- 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui kegiatan :
 - Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
 - Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda.
 - Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda

Cakupan patroli petugas Satpol PP

Capaian cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sampai dengan akhir tahun 2016 adalah 100%. yaitu dari 12 jumlah kelompok patroli yang ada di Kabupaten Pacitan dalam sehari telah melaksanakan 2 kali patroli, sehingga jika dibanding dengan jumlah kecamatan yang ada yaitu 12 Kecamatan sudah mencapai target yang telah ditetapkan di Tahun 2016.



Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten pada tahun 2016 ada 256 pelanggaran. Dari jumlah pelanggaran tersebut yang dapat terselesaikan ada 214 pelanggaran, sehingga realisasi dari indikator kinerja tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten pada tahun 2016 adalah 90%, dengan demikian capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten pada tahun 2016 adalah 100% dari target 90% yang ditetapkan Tahun 2016.

6Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Indikator kinerja Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota pada tahun 2016 sebesar 0,001 atau mencapai 50% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 0,002 dan capaian tahun 2016 sebesar 0,001.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Operasional pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran (PMK) dengan output yang dihasilkan adalah Kelancaran dan kenyamanan dala pelaksanaan tugas PMK

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 0,001 dan sama dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)

Indikator kinerja Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (menit) pada tahun 2016 sebesar 7 atau mencapai 70% dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 dicapai melalui perbandingan target tahun 2016 sebesar 10 dan capaian tahun 2016 sebesar 7.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan Operasional pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran (PMK) dengan output yang dihasilkan adalah Kelancaran dan kenyamanan dala pelaksanaan tugas PMK

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 7 sama dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010 mencapai 72,07 dan



diproyeksikan sebesar 64,44 pada akhir tahun 2016. Angka IPM ini bersumber dari keempat komponen pendukungnya yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

- Menurunnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini bersumber dari ke empat komponen pendukungnya yaitu angka harapan hidup (AHH), angka melek huruf (AMH), Rata rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut secara umum dapat menunjukkan kemajuan pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 11 (sebelas) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 18

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	160,000,000.00	154,600,000.00	96.63	5,400,000.00
Program pengembangan wawasan kebangsaan	510,000,000.00	469,024,710.00	91.97	40,975,290.00
Program pendidikan politik masyarakat	395,000,000.00	386,689,425.00	97.90	8,310,575.00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	760,000,000.00	755,920,000.00	99.46	4,080,000.00
Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	430,000,000.00	429,984,500.00	100.00	15,500.00
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	811,075,000.00	792,997,000.00	97.77	18,078,000.00
Program pengembangan nilai budaya	365,000,000.00	361,268,300.00	98.98	3,731,700.00
Program pengelolaan kekayaan budaya	195,000,000.00	133,573,000.00	68.50	61,427,000.00
Program peningkatan peran serta kepemudaan	495,000,000.00	490,408,850.00	99.07	4,591,150.00
Program pembinaan dan pasyarakatatan olahraga	445,000,000.00	445,000,000.00	100.00	-
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	205,000,000.00	205,000,000.00	100.00	-
JUMLAH	4,771,075,000.00	4,624,465,785.00	95.48	146,609,215.00



Dari tabel capaian kinerja sasaran 18 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 18 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 18 tahun 2016 mencapai 97,76% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 18 yang pada tahun 2016 mencapai 95,48% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 146.609.215,00



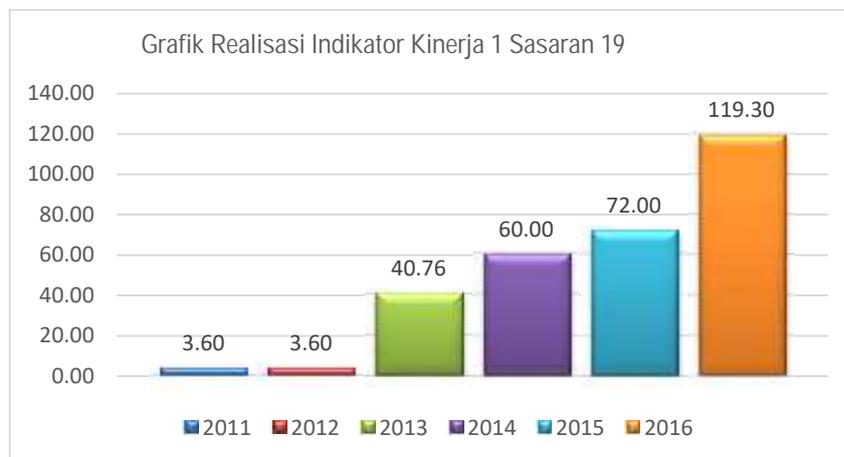
SASARAN STRATEGIS 19

Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat

Sasaran “Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat” diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang dan jasa sehingga mampu menunjang akses perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 19

NO	INDIKATOR	REALISASI					2016		
		2011	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	3.6	3.6	40.76	60	72	80	119.3	149.13
2	Prosentase kader bina ketahanan keluarga	62.61	62.61	76.22	77.4	87	92	92.2	100.22
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 19									124.67





Tercapainya sasaran Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat dengan indikator utama Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Prosentase kader bina ketahanan keluarga yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial

Capaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial dihasilkan dari tahun 2016 sebanyak 117,8% dibandingkan dengan target tahun 2016 sebanyak 100%. Capaian ini merupakan dampak dari Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial sesuai dengan melebihi target Capaian kinerja PMKS yang bantuan kebutuhan dasar pada tahun 2016 mencapai 100 % sama dengan target RPJM 2016 sebesar 100 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 meningkat yaitu sebesar 116%.

- PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)

Capaian PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE dihasilkan dari tahun 2016 sebanyak 100,3% dibandingkan dengan target tahun 2016 sebanyak 80 % Capaian ini merupakan dampak dari Kegiatan program pemberdayaan sosial melalui KUBE pada tahun 2016 meningkat Capaian kinerja PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE pada tahun 2016 mencapai 100,3% mengalami peningkatan (dengan



target RPJM 2016 sebesar 80%, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 meningkat yaitu sebesar 100,2 %.

- Panti sosial skala Kabupaten/Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)

Capaian Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dihasilkan 93,33 % dari tahun 2016 sudah mencapai target dibandingkan target tahun 2016 sebanyak 80 % Capaian ini merupakan dampak dari Kegiatan Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial meningkat karena adanya bantuan dari Pusat dan Propinsi.

Capaian kinerja 86,6 % Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan dengan target RPJM 2016 sebesar 80 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 93,33 %.

- Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)

Capaian Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dihasilkan dari tahun 2016 sebanyak 182% sudah mencapai target dibandingkan target tahun 2016 sebanyak 60% Capaian ini merupakan dampak dari Kegiatan Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial daerah meningkat karena lembaga yang ada sudah mulai berkembang

Capaian kinerja Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2016 mencapai 183 % mengalami (peningkatan/ penurunan/ sama) dengan target RPJM 2016 sebesar 183%, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 82,8 %.



- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)

Indikator Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2016 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100 %.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan P2TP2A dan kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
- Meningkatnya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Bantuan Hukum

Pada tahun 2016 jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti oleh pelayanan terpadu adalah sebesar 32 orang sedangkan pelayanan yang masuk kedalam unit pelayanan terpadu sebanyak 32 kasus, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100 % atau realisasi 100 % mengalami kesamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 100%.

- Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

Indikator Kinerja Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah pada tahun 2016 terealisasi sebesar 42,12% atau mencapai 92,45 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 sebesar 45,56 hal tersebut dikarenakan adanya moratorium yang merupakan kebijakan pemerintah pusat Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program Penguatan Kelembagaan dan Pengarus utamaan gender / kegiatan Pembinaan organisasi perempuan dan kegiatan penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan



- Meningkatnya pemahaman kelembagaan PUG bagi perempuan dan anak. Pada tahun 2016 jumlah perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah sebesar 4.132 orang sedangkan jumlah pekerja perempuannya adalah 9.809 orang yang tersebar diberbagai sektor antara lain pertanian, perdagangan, industri dan jasa, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 92,45 % atau realisasi 42,12% mengalami penurunan sebesar 0,07 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 42,19%.

- Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga(%)

Indikator Kinerja Rasio Kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2016 terealisasi sebesar 0,014 % atau mencapai 80,00 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu sebesar 11,2% hal ini dikarenakan semakin menurun angka capaian semakin bagus sehingga semakin sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga disuatu wilayah semakin bagus nilainya Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/kegiatan P2WKSS dan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi perempuan dalam rangka penguatan ekonomi keluarga dan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender dan Anak serta Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Lingkungan Pabrik Rokok dan Perkebunan Tembakau

- Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pada tahun 2016 kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Pacitan sebanyak 22 kasus dari 153.554 kepala keluarga, dari jumlah kasus KDRT tersebut sebanyak 22 kasus telah ditangani dengan baik termasuk yang ditangani secara kekeluargaan, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 80,00 % atau realisasi 0,014 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)

Indikator Kinerja Jumlah tenaga kerja di bawah umur pada tahun 2016



sebesar 0 % atau mencapai 0 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 38,75% karena semakin menurun angka capaian semakin bagus

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan gender dan anak dengan output yang dihasilkan sebagai berikut Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak.

Pada tahun 2016 jumlah pekerja umur 5-14 tahun di Kabupaten Pacitan sebanyak 36 anak sedangkan jumlah pekerja usia 15 tahun keatas sebanyak 333.778 anak, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 0 % atau realisasi 0% mengalami penurunan sebesar 0,01 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 0,01%.

- Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

Indikator Kinerja Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2016 sebesar 79,32 % atau mencapai 88,62 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 89,51 %

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu kegiatan pengarus utamaan gender dan kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi perempuan dalam rangka penguatan ekonomi keluarga di lingkungan industri rokok dan perkebunan tembakau serta kegiatan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan permodalan dan sarana produksi dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
- Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Lingkungan Pabrik Rokok dan Perkebunan Tembakau
- Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan dan menguatnya



ekonomi keluarga miskin di lingkungan bahan baku industri hasil tembakau (IHT, CUKAI)

Pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Pacitan sebanyak 169.212 orang sedangkan jumlah pekerja perempuan usia 15 tahun keatas sebanyak 212.242 orang, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 88,62 % atau realisasi 79,32 mengalami penurunan sebesar 0,12 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 79,2%

- Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)

Indikator Kinerja Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2016 sebesar 100 % atau mencapai 132,89 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 75,25%

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera serta kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya pemahaman kelembagaan PUG bagi perempuan dan anak.
- Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan
- Meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Bantuan Hukum

Pada tahun 2016 jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang terselesaikan sebesar 32 orang sedangkan yang mengajukan pengaduan perlindungan perempuan dan akan sebanyak 32 orang, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 132,89 % atau realisasi 100 % tidak mengalami perubahan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 132,89%.



- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)

Indikator Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2016 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 100 %.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan P2TP2A dan kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
- Meningkatnya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Bantuan Hukum

Pada tahun 2016 jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti oleh pelayanan terpadu adalah sebesar 32 orang sedangkan pelayanan yang masuk kedalam unit pelayanan terpadu sebanyak 32 kasus, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100 % atau realisasi 100 % mengalami kesamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 100%.

- Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)

Indikator Kinerja Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2016 sebesar 100 % atau mencapai 133,33 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 75%.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung oleh kegiatan P2TP2A dengan output yang dihasilkan sebagai berikut Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak



Pada tahun 2016 jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani sebanyak 32 korban dan jumlah korban yang membutuhkan layanan bimbingan rohani sebanyak 32 korban, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 133,33 % atau realisasi 100 % tidak mengalami perubahan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)

Indikator Kinerja Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2016 sebesar 100 % atau mencapai 125 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 80,00 %.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan P2TP2A dan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
- Meningkatnya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Bantuan Hukum

Pada tahun 2016 jumlah korban kekerasan yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 15 perkara sedangkan jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan sebanyak 15 perkara. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 125 % atau realisasi 100 % tidak mengalami perubahan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)

Indikator Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2016 sebesar 100 % atau



mencapai 117,20 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 yaitu 85,32 %.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak serta kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
- Meningkatnya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Bantuan Hukum

Pada tahun 2016 jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah sebanyak 15 orang sedangkan jumlah seluruh perempuan dan anak korban kekerasan adalah sebanyak 15 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 112,54 % atau realisasi 100 % mengalami kenaikan sebesar 9,38 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 90,62%.

- Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan (%)

Indikator Kinerja Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan pada tahun 2016 sebesar 37,12 % atau mencapai 100,32 % dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 37%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 adalah 37%.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender dengan output yang dihasilkan sebagai berikut Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak.

Pada tahun 2016 jumlah advokasi dan fasilitasi PUG adalah sebanyak 86.194 orang sedangkan jumlah seluruh perempuan adalah sebanyak 233.181 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100,32 % atau realisasi 37,12 % mengalami kenaikan sebesar 0,16



% jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 36,96%.

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)

Indikator Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2016 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2016, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 adalah 100%.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan P2TP2A dan Pemberdayaan lembaga berbasis gender dengan output yang dihasilkan adalah Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak.

Pada tahun 2016 jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti oleh pelayanan terpadu sebanyak 29 kasus sedangkan pelayanan yang masuk ke unit pelayanan terpadu sebanyak 32 kasus. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100 % atau realisasi 100 % mengalami kesamaan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 100%.

- Rata-rata jumlah anak per keluarga (%)

Indikator Kinerja Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2016 sebesar 2,1 % atau mencapai 71,42 % dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 1,5 %, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 hal ini dikarenakan semakin kecil rata-rata jumlah anak per keluarga hasilnya semakin baik.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan kegiatan pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi dan penyusunan data kependudukan dan keluarga dan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Bagi pasangan usia subur untuk menjadi peserta KB



- Meningkatnya Peserta KB aktif

Pada tahun 2016 jumlah jiwa dalam rumah tangga sebanyak 566.683 jiwa sedangkan jumlah keluarga sebanyak 121.922 KK. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 71,42 % atau realisasi 2,1 % mengalami penurunan 0,35 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 1,20%.

- Peserta KB aktif (%)

Indikator Kinerja Peserta KB aktif pada tahun 2016 sebesar 80,11 % atau mencapai 100,08 % dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 80,04%, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 dikarenakan akseptor banyak yang Drop out dan ingin mempunyai anak lagi.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan pelayanan konseling KB dan kegiatan Pembinaan Keluarga dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya cakupan PUS yang menjadi peserta KB menggunakan metode efektif
- Meningkatnya sasaran pasangan usia subur yang menjadi peserta KB secara efektif

Pada tahun 2016 jumlah akseptor KB sebanyak 97.671 akseptor sedangkan jumlah pasangan usia subur sebanyak 121.922 orang jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100,08 % atau realisasi 80,04 % mengalami kenaikan 2,13 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 97,95%.

- Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)

Indikator Kinerja Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2016 sebesar 35,4 % atau mencapai 100,85 % dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 35,7%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dikarenakan semakin sedikit keluarga pra-sejahtera disuatu wilayah maka semakin baik.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah



dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan pembinaan ketahanan keluarga terpadu bersumberdaya masyarakat dan kegiatan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kualisi kependudukan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatkan komitmen steac holders dalam pemenuhan peserta KB aktif
- Memperkuat dukungan masyarakat dalam penggarapan program KB

Pada tahun 2016 jumlah Pra-sejahtera dan KS-I sebanyak 50.063 KK sedangkan jumlah keluarga sebanyak 179.754 KK. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100,85 % atau realisasi 35,4 % mengalami kenaikan sebesar 27,34% jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 128,19 %.

- Kader bina ketahanan keluarga (%)

Indikator Kinerja Kader bina ketahanan keluarga pada tahun 2016 sebesar 92,2 % atau mencapai 100,22 % dari target RPJMD tahun 2016 sebesar 92%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Kegiatan Peningkatan kapasitas kader dan lomba posdaya serta pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan (BKB, BKR, BKL) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya cakupan anggota Tri Bina (BKB, BKR, BKL, BKL, Keluarga Harmonis, UPPKS)
- Meningkatnya cakupan anggota Tri Bina (BKB, BKR, BKL) ber KB

Pada tahun 2016 jumlah kader bina ketahanan keluarga yang telah dilatih ketrampilan sebagai kader tribina sebanyak 4.785 orang sedangkan jumlah kader tribina di kabupaten Pacitan adalah 5.190 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100,22 % atau realisasi 92,2 % mengalami kenaikan sebanyak 0,08 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 100,14%.



- Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun (%)

Indikator Kinerja Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun pada tahun 2016 sebesar 17,46 % atau mencapai 20,04 % dari target RPJMD tahun 2016 sebesar 3,5% capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 dikarenakan semakin sedikit PUS dibawah usia 20 tahun disuatu wilayah maka capaiannya semakin baik.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan KIE tentang pendewasaan usia perkawinan (KRR), Pengadaan sarana prasarana pengelolaan program KB, Pembinaan keluarga berencana dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya cakupan sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja
- Meningkatnya sarana prasarana pengelolaan program KB
- Meningkatnya sasaran pasangan usia subur yang menjadi peserta KB secara aktif

Pada tahun 2016 jumlah PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun adalah 117.520 orang sedangkan jumlah PUS seluruhnya adalah 120.210 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 20,04 % atau realisasi 17,46 % mengalami kenaikan sebanyak 16 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 1,47%.

- Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)

Indikator Kinerja Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif pada tahun 2016 sebesar 80,11 % atau mencapai 123,25 % dari target RPJMD tahun 2016 adalah 65%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pelayanan KB dan pelayanan Konseling KB dan Kegiatan Penunjang Harganas dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB



dengan kontrasepsi mantap

- Meningkatnya cakupan PUS yang menjadi peserta KB menggunakan metode efektif
- Meningkatnya komitmen penggarapan program KB dan PP di Kabupaten Pacitan

Pada tahun 2016 jumlah Peserta KB aktif adalah sebanyak 97.671 orang sedangkan jumlah PUS sebanyak 121.922 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 123,25 % atau realisasi 80,11 % mengalami kenaikan sebanyak 1,71 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 78,40%.

- Cakupan Pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)

Indikator Kinerja Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) pada tahun 2016 sebesar 9,31 % atau mencapai 53,65 % dari target RPJMD tahun 2016 sebesar 5%, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 dikarenakan tingginya drop out kesertaan ber KB sebesar 9,31 % dan angka kehamilan sebesar 2,20% serta PUS yang benar-benar ingin punya anak tidak menggunakan kontrasepsi karena faktor lain yang mempengaruhinya, misalnya karena disebabkan alasan kesehatan ibu dan lain sebagainya. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengadaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan output yang dihasilkan sebagai adalah Meningkatnya peserta KB aktif Pada tahun 2016 jumlah Pasangan Usia Subur yang belum terlayani alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin anak lagi dan ingin anak tapi ditunda sebanyak 11.996 akseptor sedangkan PUS yang ada sebesar 120.210 akseptor. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 53,65 % atau realisasi 9,98 % mengalami peningkatan sebanyak 0,82 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 9,16%.

- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%)

Indikator Kinerja Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB pada



tahun 2016 sebesar 72,4 % atau mencapai 103,43 % dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 70%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB dengan output yang dihasilkan adalah Meningkatkan pengetahuan PPKBD / Sub PPKBD untuk mensukseskan program KB

Pada tahun 2016 jumlah anggota BKB ber KB sebanyak 13.470 orang sedangkan jumlah anggota BKB seluruhnya sebanyak 18.605 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 72,4% mengalami penurunan sebesar 7,21% jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 79,61%.

- Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber KB (%)

Indikator Kinerja Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber KB pada tahun 2016 sebesar 87,4 % atau mencapai 100,46 % dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 87%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, kegiatan penguatan ekonomi masyarakat anggota kelompok UPPKS lingkungan industri tembakau dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Meningkatnya anggota UPPKS ber KB mandiri
- Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan dan menguatnya ekonomi keluarga miskin di lingkungan bahan baku industri hasil tembakau (IHT, CUKAI)

Pada tahun 2016 jumlah Anggota UPPKS ber KB adalah sebanyak 966 orang sedangkan jumlah anggota UPPKS setatus PUS sebanyak 1.105 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 103,43 % atau realisasi 87,4 % hanya sedikit mengalami perubahan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 87,76%.



- Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 1 petugas setiap 2 Desa/Kelurahan
Indikator Kinerja Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 1 petugas setiap 2 desa/kel pada tahun 2016 sebesar 0,22 atau mencapai 11 % dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 2, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2016 dikarenakan adanya moratorium sebagai kebijakan pemerintah pusat
Pada tahun 2016 jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Penyuluh Keluarga Berencana adalah sebanyak 39 orang sedangkan jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan sebanyak 171 Desa/Kelurahan. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 11 % atau realisasi 0,22 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 0,22.
- Petugas PPKBD per desa (%)
Indikator Kinerja Petugas PPKBD per desa pada tahun 2016 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 100, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016
Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Operasional PPKBD dan sub PPKBD dengan output yang dihasilkan adalah Meningkatnya pengetahuan PPKBD / Sub PPKBD untuk mensukseskan program KB.
Pada tahun 2016 jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan adalah sebanyak 171 Desa/Kelurahan sedangkan jumlah PKBD sebanyak 171 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100 % atau realisasi 100 % mengalami kesamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 100%.
- Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)
Indikator Kinerja Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat pada tahun 2016 sebesar 2,68 % atau mencapai 8,93 % dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 30 %, capaian tersebut



belum mencapai target RPJMD tahun 2016 yang dikarenakan terbatasnya penyediaan dana APBD dalam belanja pengadaan alat dan obat kontrasepsi sebagai kewajiban pemenuhan SPM 30% tiap tahunnya.

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan pengadaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan output yang dihasilkan adalah Meningkatnya pelayanan program dan kesertaan KB aktif.

Pada tahun 2016 jumlah Pemasangan kontrasepsi yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah sebanyak 270 akseptor sedangkan jumlah pasangan suami istri (peserta KB baru) di Kabupaten Pacitan sebanyak 10.045 pasang, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 8,93 % atau realisasi 2,68 % tidak mengalami perubahan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 8,93%.

- Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel setiap tahun

Indikator Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel setiap tahun pada tahun 2016 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 100%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengelolaan data dan informasi program KB dengan output yang dihasilkan adalah Tersedianya data mikro di Desa / Kelurahan tiap-tiap keluarga

Pada tahun 2016 jumlah seluruh data mikro yang ada di desa/kelurahan adalah sebanyak 171 buku/set sedangkan jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan sebanyak 171 Desa/Kelurahan, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100 % atau realisasi 100 % mengalami kesamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 100%.

- Sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE reproduksi remaja (%)

Indikator Kinerja Sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE reproduksi remaja pada tahun 2016 sebesar 35,05 % atau mencapai 100,14



% dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 35%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Advokasi KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan output yang dihasilkan adalah Meningkatnya cakupan sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja

Pada tahun 2016 jumlah sekolah yang diberikan KIE tentang reproduksi remaja adalah sebanyak 60 sekolah sedangkan jumlah sekolah dan organisasi kepemudaan yang menjadi sasaran KIE reproduksi remaja adalah sebanyak 123 sekolah dan organisasi kepemudaan. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100,14 % atau realisasi 35,05 % tidak mengalami perubahan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 35,05%.

- Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Indikator Kinerja Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri pada tahun 2016 sebesar 70,3 % atau mencapai 100,43 % dari target RPJMD tahun 2016 yaitu sebesar 70%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2016 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dengan output yang dihasilkan adalah Meningkatnya anggota UPPKS ber KB mandiri.

Pada tahun 2016 jumlah anggota UPPKS yang ber KB mandiri adalah sebanyak 681 akseptor sedangkan jumlah PUS anggota kelompok UPPKS sebanyak 969 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 100,43 % atau realisasi 70,3 % mengalami penurunan sebanyak 3,6 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 73,9%.



Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 4 (empat) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 19

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	EFISIENSI
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	555,000,000.00	547,552,000.00	98.66	7,448,000.00
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	4,057,320,000.00	3,651,107,450.00	89.99	406,212,550.00
Program peningkatan Kesempatan kerja	817,613,700.00	814,669,700.00	99.64	2,944,000.00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	10,786,000,000.00	686,308,150.00	6.36	10,099,691,850.00
JUMLAH	16,215,933,700.00	5,699,637,300.00	73.66	10,516,296,400.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 19 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 19 tahun 2016 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 19 tahun 2016 mencapai 124,67% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 19 yang pada tahun 2016 mencapai 73,66 % sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 10.516.296.400,00 '



2. PERMASALAHAN UMUM DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan untuk dapat mendukung tercapainya sasaran sebagaimana diuraikan di atas antara lain adalah:

- 1) Perencanaan (planning) yang sistematis dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 2) Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai;
- 3) Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan; baik berupa Peraturan Bupati, Peraturan Daerah maupun peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- 4) Kemampuan (kualitas dan kuantitas) Sumber Daya Manusia aparatur yang memadai;
- 5) Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
- 6) Terpenuhinya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan lintas sektor terkait yang terbina dengan baik dan harmonis.

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut.

Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2016 antara lain :

- 1) Masih kurang optimal koordinasi dalam menyusun perencanaan kegiatan sehingga masih terkesan parsial, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan). Masih adanya perbedaan persepsi tentang overlapping tugas dan fungsi antara SKPD/Unit Kerja bisa menyebabkan adanya kegiatan ganda.
- 2) Masih belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan, kualitas dan kuantitas SDM masih kurang, masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensinya sehingga kinerjanya tidak optimal dan



- mempengaruhi kinerja organisasi, masih adanya jabatan struktural yang belum terisi sehingga kinerja organisasi juga kurang maksimal;
- 3) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah (APBD Kabupaten) sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang teranggarkan;
 - 4) Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah yang masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya;
 - 5) Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan, masih banyak SKPD/Unit kerja yang belum memiliki Sistem Informasi yang terintegrasi sehingga sumber data kurang valid dan terukur; Kurangnya perhatian terhadap hasil-hasil penelitian, pengembangan dan statistik sebagai bahan usulan bagi pengambilan kebijakan.
 - 6) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektor terkait, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - 7) Belum optimalnya dukungan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Suatu permasalahan atau masalah pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul.

Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :

- 1) Sudah dimulai kegiatan pembinaan dan bimbingan kepada SKPD/Unit Kerja untuk memahami dan bisa mengukur indikator kinerjanya masing-masing dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian indikatornya.
- 2) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif; Dalam hal ini sudah dirintis dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016
- 3) Peningkatan dan pengembangan SDM selalu ditingkatkan baik melalui pembinaan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, penempatan pegawai (mutasi) menyesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Perlu



peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui diklat, seminar, studi banding, tugas belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);

- 4) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- 5) Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu perlu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas, sarana dan prasarana penunjang; mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
- 6) Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas data dan informasi di SKPD, pengembangan data statistik daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;
- 7) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi dan lintas sektor terkait dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik; Hal ini sudah dirintis dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Bupati dengan SKPD, Rapat Kerja Bupati dengan Instansi Vertikal, menjalin kerjasama yang baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa.
- 8) Perlu meningkatkan dukungan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di seluruh bidang pemerintahan dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Pacitan. Meningkatnya kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Grindulu Mapan, Posdaya, Bulan Bhakti Gotong Royong dan lain-lain.



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 yang dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 tahun 2016 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 tahun 2016 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2016.

1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah equitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber – sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2016 menekankan pada upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian daerah, disamping itu pemerintah daerah juga berupaya membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, swasta serta



masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan tetappada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
 - Pajak daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang syah.
- b. Dana Perimbangan, meliputi :
 - Dana bagi hasil pajak / bukan pajak;
 - Dana Alokasi Umum;
 - Dana Alokasi Khusus;
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang syah, meliputi :
 - Hibah;
 - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya;
 - Dana penyesuaian dan otonomi khusus;
 - Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Adapun dalam pengelolaan pendapatan daerah upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah beberapa diantaranya adalah melalui :

- a Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- b Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber – sumber pendapatan daerah
- c Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat
- d Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- e Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;



- f Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan politik

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/ kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi landasan utama target pendapatan sehingga pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

a. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sesuai target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan sebesar Rp. 1.649.390.896.801,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.527.531.210.970,59 kurang dari target sebesar Rp. 121.859.685.830,41 atau mencapai 92,61%.

Adapun realisasi Pendapatan Daerah kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 150.466.067.820,59;
- Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.087.172.953.668,00; dan
- Lain-lain Penerimaan yang sah sebesar Rp. 289.892.189.482,00

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PAD masih perlu ditingkatkan sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, pengendalian, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, disamping itu koordinasi baik dengan Pemerintah Propinsi maupun pusat guna meningkatkan dana transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima Pemerintah Kabupaten telah berjalan dengan baik, disamping peningkatan didukung pula kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.



Secara umum dalam rangka pemenuhan target APBD, hampir semua komponen pendapatan dapat melampaui target, kecuali dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dana alokasi khusus yang memang ada pemotongan dari pemerintah pusat dikarenakan mensikapi kondisi perekonomian secara nasional yang mengalami ketidak menentuan karena ekonomi global yang belum stabil, berdasarkan data realisasi pendapatan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.527.531.210.970,59 mengalami kenaikan sebesar Rp. 100.934.242.637,79 atau 7,08% dibandingkan pendapatan tahun anggaran 2015 yang hanya mencapai Rp. 1.426.596.968.332,80. Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.016.989.403,79 atau 18,99 % dibandingkan tahun 2015 karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 223.649.448.852,00 atau 25,9 % dibandingkan tahun 2015 karena adanya tambahan dana dari dana alokasi umum yang dialokasikan untuk kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil.
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp. 146.732.195.618,00 atau 33,61% dibandingkan tahun 2015 karena adanya pengurangan dana dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Secara lengkap perbandingan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dan 2016, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2015 dan 2016

NO	Pendapatan	Tahun				Growth (%)
		2015		2016		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	126.449.078.416,80	8,86	150.466.067.820,59	9,85	18,99
	Hasil Pajak Daerah1)	21.789.927.221,50	1,52	26.909.423.084,75	1,76	23,49
	Hasil Retribusi Daerah	20.411.292.109,75	1,43	25.854.036.796,69	1,69	26,67



	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.421.047.544,06	0,16	2.425.176.653,00	0,16	0,17
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.826.811.541,49	5,73	95.277.431.286,15	6,24	16,44
2	Dana Perimbangan	863.523.504.816,00	60,53	1.087.172.953.668,00	71,17	25,90
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.312.201.816,00	3,73	56.876.719.010,00	3,72	6,69
	Dana Alokasi Umum	714.847.233.000,00	50,1	807.907.686.000,00	52,89	13,02
	Dana Alokasi Khusus	95.364.070.000,00	6,68	222.388.548.658,00	14,56	133,20
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	436.624.385.100,00	30,6	289.892.189.482,00	18,98	(33,61)
	Pendapatan Hibah	1.050.000,00	7,36	10.000.000.000,00	0,65	952.280,95
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	60.742.249.100,00	4,25	64.636.665.482,00	4,23	6,41
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	281.230.973.000,00	19,71	144.932.284.000,00	9,49	(48,47)
	Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	94.650.113.000,00	6,63	70.323.240.000,00	4,60	(25,70)
	JUMLAH	1.426.596.968.332,80	100	1.527.531.210.970,59	100	7,08

Keterangan: - Data sebelum audit BPK

- % : Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah

- Growth : Pertumbuhan (persen) tahun 2015 ke tahun 2016

Dari data diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan struktur pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan masih menerima kontribusi dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam jumlah yang relatif cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.087.172.953.668,00 dari seluruh pendapatan daerah tahun anggaran 2016 yang meliputi :

- Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak Rp. 56.876.719.010,00
- Dana Alokasi Umum Rp. 807.907.686.000,00
- Dana Alokasi Khusus Rp. 222.388.548.658,00

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pendapatan daerah masih sangat kecil yaitu sebesar Rp 150.466.067.820,59 atau 9,85 % dari seluruh pendapatan daerah. Kondisi demikian, mendorong Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk lebih giat dalam meningkatkan potensi lokal dalam mendongkrak PAD demi terciptanya kemandirian daerah agar tidak tergantung pada Pemerintah Pusat.



Upaya yang dilakukan dalam memacu peningkatan PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- b. Peningkatan fasilitas, tampilan dan keamanan terhadap obyek pajak dan retribusi;
- c. Sosialisasi dan promosi terhadap obyek pelayanan pajak dan retribusi pada masyarakat;
- d. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- e. Upaya menjemput bola terhadap pemungutan obyek pajak maupun retribusi daerah.
- f. Pendapatan lain – lain yang syah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pemungutan serta meningkatkan perluasan sumber – sumber pendapatan daerah;
- g. Untuk dana Perimbangan dan pendapatan lain yang syah terus diupayakan dalam bentuk koordinasi ke pusat dan propinsi sehingga dapat meningkatkan DAU, DAK, Dana Bagi hasil Pajak/bukan pajak dan Bantuan Keuangan
- h. Menciptakan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi

b. **Target dan Realisasi Pendapatan**

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.527.531.210.970,59 atau mencapai 92,61 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.649.390.896.801,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2016

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian %
Pendapatan Asli Daerah	134.904.319.146,00	150.466.067.820,59	111,54
- Hasil Pajak Daerah1)	24.607.000.000,00	26.909.423.084,75	109,36
- Hasil Retribusi Daerah	24.619.570.658,00	25.854.036.796,69	105,01
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.425.176.653,00	2.425.176.653,00	100,00
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.252.571.835,00	95.277.431.286,15	114,44
Dana Perimbangan	1.207.300.244.218,00	1.087.172.953.668,00	90,05
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	60.512.273.218,00	56.876.719.010,00	93,99
- Dana Alokasi Umum	807.907.686.000,00	807.907.686.000,00	100,00
- Dana Alokasi Khusus	338.880.285.000,00	222.388.548.658,00	65,62
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	307.186.333.437,00	289.892.189.482,00	94,37
- Pendapatan Hibah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	81.930.809.437,00	64.636.665.482,00	78,89
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	144.932.284.000,00	144.932.284.000,00	100,00
- Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	70.323.240.000,00	70.323.240.000,00	100,00
JUMLAH	1.649.390.896.801,00	1.527.531.210.970,59	92,61

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 150.466.067.820,59 atau mencapai 111,54 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 134.904.319.146,00. Realisasi penerimaan PAD tersebut berasal dari:

- Pajak Daerah sebesar Rp. 26.909.423.084,75
- Retribusi daerah sebesar Rp. 25.854.036.796,69
- Pengelolaan Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.425.176.653,00
- Lain – lain PAD yang sah sebesar Rp. 95.277.431.286,15

Komposisi target dan realisasi masing-masing jenis pendapatan pada tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	Pajak Hotel	350.000.000,00	494.241.485,00	141,21
2	Pajak Restoran	1.050.000.000,00	1.568.762.273,75	149,41
3	Pajak Hiburan	50.000.000,00	65.068.900,00	130,14
4	Pajak Reklame	450.000.000,00	418.708.840,00	93,05
5	Pajak Penerangan Jalan	8.040.000.000,00	8.595.886.897,00	106,91
6	Pajak Parkir	17.000.000,00	20.196.000,00	118,80
7	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	62.133.200,00	124,27
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	550.000.000,00	872.522.903,00	158,64
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	13.250.000.000,00	13.835.993.936,00	104,42
10	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	800.000.000,00	975.908.650,00	121,99
JUMLAH		24.607.000.000,00	26.909.423.084,75	1248,83

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
A	Retribusi Jasa Umum	11.173.207.500,00	11.524.512.000,00	103,14
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.516.195.000,00	6.797.376.000,00	104,32
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	37.920.000,00	37.920.000,00	100,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.672.537.500,00	1.724.568.000,00	103,11
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.109.425.000,00	2.012.794.500,00	95,42
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	435.000.000,00	435.055.000,00	100,01
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.130.000,00	7.694.500,00	361,24
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	509.104.000,00	127,28
B	Retribusi Jasa Usaha	10.618.368.158,00	11.530.178.937,00	108,59
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	275.187.500,00	1.140.759.684,00	414,54
2	Retribusi Tempat Pelelangan	741.870.158,00	770.725.753,00	103,89
3	Retribusi Terminal	143.330.500,00	145.323.500,00	101,39
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	9.200.000,00	14.347.000,00	155,95
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	16.500.000,00	29.775.000,00	180,45
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	17.220.000,00	17.255.000,00	100,20
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.415.060.000,00	9.411.993.000,00	99,97



C	Retribusi Perizinan Tertentu	2.827.995.000,00	2.799.345.859,69	98,99
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	350.000.000,00	377.544.915,94	107,87
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	40.000.000,00	5.000.000,00	12,50
3	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	2.400.000.000,00	2.401.140.943,75	100,05
4	Retribusi Izin Trayek	37.995.000,00	15.660.000,00	41,22
JUMLAH		24.619.570.658,00	25.854.036.796,69	105,01

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Tabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD			
1	Bank Jatim	2.301.371.653,00	2.301.371.653,00	100
2	Bank Perkreditan Rakyat	123.805.000,00	123.805.000,00	100
JUMLAH		2.425.176.653,00	2.425.176.653,00	100

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Tabel Target dan Realiasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	Capaian %
A	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	296.100.000,00	467.488.500,00	157,88
	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	-	26.288.500,00	0
	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	35.900.000,00	63.400.000,00	176,60
	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00
	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	195.200.000,00	312.800.000,00	160,25
B	Penerimaan Jasa Giro	1.203.582.725,00	2.008.337.955,99	166,86
	Jasa Giro Kas Daerah	1.203.582.725,00	2.008.337.955,99	166,86
C	Pendapatan Bunga Deposito	11.083.082.602,00	9.733.944.509,38	87,83
	Rekening Deposito pada BPD	8.479.867.602,00	6.460.547.944,64	76,19
	Rekening Deposito Pada BRI	1.500.000.000,00	1.775.356.217,00	118,36
	Rekening Deposito Pada BNI	900.000.000,00	1.218.092.471,00	135,34
	Pendapatan Bunga Piutang	3.215.000,00	3.215.000,00	100,00
	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	200.000.000,00	276.732.876,74	138,37
D	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	523.503.048,00	0
	Bidang Pekerjaan Umum	-	523.503.048,00	0



NO	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	Capaian %
E	Pendapatan dari Pengembalian	1.871.659.508,00	2.612.790.622,46	139,60
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	15.017.645,00	262.320.031,00	1746,75
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas	500.000,00	92.458.600,00	18491,72
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja non gaji dan tunjangan	1.856.141.863,00	2.258.011.991,46	121,65
F	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000,00	616.975.919,90	123,40
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	500.000.000,00	616.975.919,90	123,40
G	Pendapatan dari BLUD	52.000.000.000,00	61.248.611.512,94	117,79
	Pendapatan Dari BLUD	52.000.000.000,00	61.248.611.512,94	117,79
H	Pendapatan Lain-lain	777.415.000,00	1.553.622.928,58	199,84
	Pendapatan Lain-Lain	228.961.000,00	1.412.914.928,58	617,10
	Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama	548.454.000,00	140.708.000,00	25,66
I	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP	15.520.732.000,00	16.512.156.288,90	106,39
	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan	15.520.732.000,00	16.512.147.221,90	106,39
	JUMLAH	83.252.571.835,00	95.277.431.286,15	114,44

Keterangan : Data sebelum audit BPK

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya :

- Terbatasnya kemampuan SDM pengelola PBB utamanya terkait penentuan basis data PBB (NJOP tanah dan Bangunan)
- Tingkat akurasi data pajak PBB dan BPHTB yang berpengaruh terhadap data wajib pajak belum akurat mengingat penetapan NJOP belum sesuai dengan harga pasar.
- Ketidakjelasan aturan yang menyatakan tentang penerimaan daerah yang tidak melalui Kas Daerah.



- d. Infrastruktur yang ada kurang memadai, khususnya akses jalan yang berdampak pada sedikitnya investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Pacitan.
- e. Pengelolaan pariwisata yang belum maksimal dengan belum adanya sistem yang transparansi dan akuntabel terhadap pemungutan retribusi masuk tempat wisata dan promosi wisata, maka pendapatan dari sektor pariwisata masih relatif kecil.

2. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan solusi/ langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat – diklat teknis terkait dengan pengelolaan PBB.
- b. Penyusunan regulasi yang terkait dengan penetapan NJOP PBB dan BPHTB melalui pemutakhiran data zona nilai tanah sebagai dasar penetapan besarnya PBB dan BPHTB;
- c. Melakukan Konsultasi dan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait dengan mekanisme pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Daerah.
- d. Meningkatkan kualitas infrastruktur, dalam rangka menarik investor agar menanamkan investasinya di Kabupaten Pacitan.
- e. Dibentuk menejemen pengelolaan pariwisata yang terintegrasi, tansparan dan akuntabel guna meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Secara definitif belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah Kabupaten Pacitan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program pembangunan daerah. Agar keuangan



Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan, dengan selalu menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana bagi pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari daerah sendiri, pemerintah pusat, provinsi, swasta, dan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri. Hal ini demikian penting karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2016 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan menekankan pada upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.



Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat;
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik terhadap administrasi maupun terhadap masyarakat;
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pacitan maka Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
2. Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;



3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar analisa belanja dan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawasan fungsional maupun masyarakat;
4. Meningkatkan akuntabilitas (accountability) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas oleh setiap Satuan Kerja serta penerapan Sistem Akuntansi yang sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2016 lebih menekankan pada upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2016 dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;



20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
23. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 tahun 2016 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016;
25. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;

Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi daerah untuk memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.7 struktur APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2016 proporsi belanja langsung mendapat alokasi sebesar 37,67 % dari total belanja daerah.

Tabel Struktur Belanja APBD Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2016

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	PROPORSI (%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.118.443.479.589,54	62,33
1	Belanja Pegawai	810.351.127.991,10	45,16
2	Belanja Hibah	26.081.925.000,00	1,45



3	Belanja Bantuan Sosial	7.782.736.616,00	0,43
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	5.350.538.338,00	0,30
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Parpol	267.848.135.916,00	14,93
6	Belanja Tidak Terduga	1.029.015.728,44	0,06
	BELANJA LANGSUNG	675.932.320.982,00	37,67
1	Belanja Pegawai	52.770.752.600,00	2,94
2	Belanja Barang Dan Jasa	223.504.152.355,00	12,46
3	Belanja Modal	399.657.416.027,00	22,27
	JUMLAH BELANJA	1.794.375.800.571,54	100,00

Keterangan : Data sebelum audit BPK

b. Target dan Realisasi Belanja

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.794.375.800.571,54 realisasinya mencapai Rp. 1.644.719.320.619,15 atau 91,66 % yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 999.717.047.413,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 645.002.273.206,15 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp. 149.656.479.952,39

Dari kelompok belanja tidak langsung selain dipergunakan untuk belanja pegawai, pada tahun 2016 juga dialokasikan untuk:

1. Belanja Hibah yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non – profesional.
2. Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga



dan /atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

3. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.
Belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/ RW, bantuan Operasional BPD, bantuan semen, PNPM, Purna Tugas Perangkat Desa, bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan dan lain sebagainya;
5. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kelompok belanja langsung di alokasikan untuk :

1. Belanja Pegawai yaitu untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
3. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.



Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja langsung diarahkan pada :

1. Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik;
2. Belanja Prioritas SKPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya urusan pemerintahan;
3. Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;
5. Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain : pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja;
6. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
 - a Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat
 - b Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

Setelah dilakukan operasionalisasi kebijakan belanja daerah dengan memperhatikan Kebijakan Nasional, Propinsi, Daerah dan faktor lain, maka target dan realisasi belanja daerah tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :

Tabel Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN		REALISASI	
		JUMLAH	PROPORSI (%)	JUMLAH	PROPORSI (%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.118.443.479.589,54	62,33	999.717.047.413,00	60,78
1	Belanja Pegawai	810.351.127.991,10	45,16	696.547.418.733,00	42,35
2	Belanja Hibah	26.081.925.000,00	1,45	24.282.642.656,00	1,48
3	Belanja Bantuan Sosial	7.782.736.616,00	0,43	6.599.373.506,00	0,40



NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN		REALISASI	
		JUMLAH	PROPORSI (%)	JUMLAH	PROPORSI (%)
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	5.350.538.338,00	0,30	4.576.300.137,00	0,28
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	267.848.135.916,00	14,93	266.846.408.881,00	16,22
6	Belanja Tidak Terduga	1.029.015.728,44	0,06	864.903.500,00	0,05
	BELANJA LANGSUNG	675.932.320.982,00	37,67	645.002.273.206,15	39,22
1	Belanja Pegawai	52.770.752.600,00	2,94	52.206.025.090,20	3,17
2	Belanja Barang Dan Jasa	223.504.152.355,00	12,46	213.629.250.899,39	12,99
3	Belanja Modal	399.657.416.027,00	22,27	379.166.997.216,56	23,05
	JUMLAH BELANJA	1.794.375.800.571,54	100,00	1.644.719.320.619,15	100,00

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah yang ada, maka target dan realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	PENDAPATAN DAERAH	1.649.390.896.801,00	1.527.531.210.970,59	92,61
1	Pendapatan Asli Daerah	134.904.319.146,00	150.466.067.820,59	111,54
2	Dana Perimbangan	1.207.300.244.218,00	1.087.172.953.668,00	90,05
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	307.186.333.437,00	289.892.189.482,00	94,37
	BELANJA	1.794.375.800.571,54	1.644.719.320.619,15	91,66
1	Belanja tidak langsung	1.118.443.479.589,54	999.717.047.413,00	89,38
2	Belanja langsung	675.932.320.982,00	645.002.273.206,15	95,42
	Surplus/ Defisit	(144.984.903.770,54)	(117.188.109.648,56)	80,83
	PEMBIAYAAN	144.984.903.770,54	145.494.591.270,54	100,35
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	146.434.903.770,54	146.444.591.270,54	100,01
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.450.000.000,00	950.000.000,00	65,52
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	28.306.481.621,98	0

Keterangan : Data sebelum audit BPK



Sesuai Target dan realisasi sebagaimana tabel diatas, APBD tahun anggaran 2016 telah dilaksanakan secara proposional. Disamping itu, masih terjadi selisih anggaran sehingga dapat melakukan penghematan dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA), Siklus APBD terjaga sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tetap berada pada jalur prioritas visi dan misi daerah yang diharapkan dapat memberikan semaksimal mungkin manfaat bagi masyarakat Pacitan.

Sedangkan alokasi pendapatan dan belanja per Satuan kerja menurut urusan wajib dan urusan pilihan dapat disajikan pada tabel berikut :



Tabel Rekapitulasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2016

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	URUSAN WAJIB	1.648.536.948.643,00	1.526.641.517.217,59	92,61	1.098.656.806.281,34	980.782.225.407,00	89,27	628.309.326.763,00	598.155.746.268,03	95,20	1.726.966.133.044,34	1.578.937.971.675,03	91,43
1.01.	PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	603.294.552.938,10	497.403.029.777,00	82,45	47.814.567.966,00	44.701.052.147,90	93,49	651.109.120.904,10	542.104.081.924,90	83,26
1.01.1.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0	603.294.552.938,10	497.403.029.777,00	82,45	47.814.567.966,00	44.701.052.147,90	93,49	651.109.120.904,10	542.104.081.924,90	83,26
1.02.	KESEHATAN	74.036.927.000,00	84.558.143.801,84	114,21	62.723.174.517,40	60.755.267.378,00	96,86	148.360.374.923,00	144.985.023.455,24	97,72	211.083.549.440,40	205.740.290.833,24	97,47
1.02.1.02	DINAS KESEHATAN	22.036.927.000,00	23.309.532.288,90	105,77	43.353.120.615,00	41.941.331.418,00	96,74	71.097.983.513,00	63.444.061.648,00	89,23	114.451.104.128,00	105.385.393.066,00	92,08
1.02.1.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	52.000.000.000,00	61.248.611.512,94	117,79	19.370.053.902,40	18.813.935.960,00	97,13	77.262.391.410,00	81.540.961.807,24	105,54	96.632.445.312,40	100.354.897.767,24	103,85
1.03.	PEKERJAAN UMUM	629.917.500,00	1.075.961.915,94	170,81	10.623.331.913,60	10.132.939.504,00	95,38	268.819.644.845,00	263.686.586.928,73	98,09	279.442.976.758,60	273.819.526.432,73	97,99
1.03.1.03	DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN	239.867.500,00	652.802.500,00	272,15	4.329.189.171,00	4.091.277.867,00	94,50	174.116.409.984,00	171.726.094.573,61	98,63	178.445.599.155,00	175.817.372.440,61	98,53
1.03.1.03	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	390.050.000,00	423.159.415,94	108,49	6.294.142.742,60	6.041.661.637,00	95,99	94.703.234.861,00	91.960.492.355,12	97,10	100.997.377.603,60	98.002.153.992,12	97,03
1.04.	PERUMAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00	5.170.730.160,00	89,15	5.800.000.000,00	5.170.730.160,00	89,15
1.04.1.03	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00	5.170.730.160,00	89,15	5.800.000.000,00	5.170.730.160,00	89,15
1.05.	PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000.000,00	1.572.583.095,00	81,48	1.930.000.000,00	1.572.583.095,00	81,48
1.05.1.03	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000.000,00	1.572.583.095,00	81,48	1.930.000.000,00	1.572.583.095,00	81,48
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	0,00	2.871.481.407,20	2.772.669.206,00	96,56	7.975.000.000,00	7.905.439.085,00	99,13	10.846.481.407,20	10.678.108.291,00	98,45
1.06.1.06	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	2.871.481.407,20	2.772.669.206,00	96,56	7.975.000.000,00	7.905.439.085,00	99,13	10.846.481.407,20	10.678.108.291,00	98,45
1.07.	PERHUBUNGAN	2.698.063.000,00	2.844.057.500,00	105,41	3.357.607.734,00	3.226.878.241,00	96,11	3.240.751.600,00	3.221.997.963,00	99,42	6.598.359.334,00	6.448.876.204,00	97,73
1.07.1.07	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.698.063.000,00	2.844.057.500,00	105,41	3.357.607.734,00	3.226.878.241,00	96,11	3.240.751.600,00	3.221.997.963,00	99,42	6.598.359.334,00	6.448.876.204,00	97,73
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	2.400.000.000,00	2.401.140.943,75	100,05	1.388.414.750,20	943.835.165,00	67,98	3.313.534.157,00	2.994.388.620,00	90,37	4.701.948.907,20	3.938.223.785,00	83,76



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.08.1.08	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	2.400.000.000,00	2.401.140.943,75	100,05	1.388.414.750,20	943.835.165,00	67,98	3.313.534.157,00	2.994.388.620,00	90,37	4.701.948.907,20	3.938.223.785,00	83,76
1.09.	PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00	2.215.700.196,00	96,33	2.300.000.000,00	2.215.700.196,00	96,33
1.09.1.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	497.694.000,00	99,54	500.000.000,00	497.694.000,00	99,54
1.09.1.02	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	319.247.500,00	91,21	350.000.000,00	319.247.500,00	91,21
1.09.1.17	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	89.125.000,00	89,13	100.000.000,00	89.125.000,00	89,13
1.09.1.20	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	563.400.946,00	93,90	600.000.000,00	563.400.946,00	93,90
1.09.2.01	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	746.232.750,00	99,50	750.000.000,00	746.232.750,00	99,50
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	1.757.792.610,20	1.700.620.215,00	96,75	1.892.625.000,00	1.843.810.208,00	97,42	3.650.417.610,20	3.544.430.423,00	97,10
1.10.1.10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	1.757.792.610,20	1.700.620.215,00	96,75	1.892.625.000,00	1.843.810.208,00	97,42	3.650.417.610,20	3.544.430.423,00	97,10
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	5.712.910.022,60	5.465.686.935,00	95,67	663.000.000,00	657.835.510,00	99,22	6.375.910.022,60	6.123.522.445,00	96,04
1.11.1.12	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	0,00	5.712.910.022,60	5.465.686.935,00	95,67	663.000.000,00	657.835.510,00	99,22	6.375.910.022,60	6.123.522.445,00	96,04
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125.472.789,00	4.917.864.337,00	95,95	5.125.472.789,00	4.917.864.337,00	95,95
1.12.1.12	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125.472.789,00	4.917.864.337,00	95,95	5.125.472.789,00	4.917.864.337,00	95,95
1.13.	SOSIAL	0,00	0,00	0,00	3.116.777.452,00	2.978.418.217,00	95,56	2.862.000.000,00	2.826.633.324,00	98,76	5.978.777.452,00	5.805.051.541,00	97,09
1.13.1.13	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	3.116.777.452,00	2.978.418.217,00	95,56	2.862.000.000,00	2.826.633.324,00	98,76	5.978.777.452,00	5.805.051.541,00	97,09



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.14.	KETENAGAKERJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152.758.700,00	4.736.368.300,00	91,92	5.152.758.700,00	4.736.368.300,00	91,92
1.14.1.13	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152.758.700,00	4.736.368.300,00	91,92	5.152.758.700,00	4.736.368.300,00	91,92
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	562.150.000,00	640.625.919,90	113,96	2.998.856.155,20	2.845.147.975,00	94,87	2.572.036.625,00	2.549.018.621,00	99,11	5.570.892.780,20	5.394.166.596,00	96,83
1.15.1.15	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	562.150.000,00	640.625.919,90	113,96	2.998.856.155,20	2.845.147.975,00	94,87	2.572.036.625,00	2.549.018.621,00	99,11	5.570.892.780,20	5.394.166.596,00	96,83
1.16.	PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	0,00	1.963.690.059,80	1.875.098.107,00	95,49	880.625.000,00	872.518.150,00	99,08	2.844.315.059,80	2.747.616.257,00	96,60
1.16.1.20	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN	0,00	0,00	0,00	1.963.690.059,80	1.875.098.107,00	95,49	880.625.000,00	872.518.150,00	99,08	2.844.315.059,80	2.747.616.257,00	96,60
1.17.	KEBUDAYAAN	9.548.180.000,00	9.564.467.500,00	100,17	3.788.302.177,40	3.641.455.437,00	96,12	3.170.000.000,00	3.073.990.126,00	96,97	6.958.302.177,40	6.715.445.563,00	96,51
1.17.1.17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	9.548.180.000,00	9.564.467.500,00	100,17	3.788.302.177,40	3.641.455.437,00	96,12	3.170.000.000,00	3.073.990.126,00	96,97	6.958.302.177,40	6.715.445.563,00	96,51
1.18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000.000,00	1.140.408.850,00	99,60	1.145.000.000,00	1.140.408.850,00	99,60
1.18.1.17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000.000,00	1.140.408.850,00	99,60	1.145.000.000,00	1.140.408.850,00	99,60
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	0,00	0,00	0,00	5.889.088.229,80	5.687.578.855,00	96,58	17.611.000.000,00	7.402.838.390,00	42,04	23.500.088.229,80	13.090.417.245,00	55,70
1.19.1.19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	1.693.591.859,80	1.635.626.814,00	96,58	2.765.000.000,00	2.711.010.368,00	98,05	4.458.591.859,80	4.346.637.182,00	97,49
1.19.1.19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	3.431.328.764,40	3.313.767.060,00	96,57	3.456.000.000,00	3.413.819.956,00	98,78	6.887.328.764,40	6.727.587.016,00	97,68
1.19.1.19	BADAN PENANGGULANGAN	0,00	0,00	0,00	764.167.605,60	738.184.981,00	96,60	11.390.000.000,00	1.278.008.066,00	11,22	12.154.167.605,60	2.016.193.047,00	16,59



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja									
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja			
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
	BENCANA DAERAH													
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	1.558.661.711.143,00	1.425.557.119.636,16	91,46	384.362.865.524,64	376.708.910.130,00	98,01	91.902.531.958,00	85.958.817.918,16	93,53	476.265.397.482,64	462.667.728.048,16	97,14	
	BUPATI/ WAKIL BUPATI	0,00	0,00	0,00	715.832.871,00	669.415.242,00	93,52	0,00	0,00	#DIV/0!	715.832.871,00	669.415.242,00	93,52	
	DPRD	0,00	0,00	0,00	8.445.624.478,00	7.918.613.962,00	93,76	0,00	0,00	#DIV/0!	8.445.624.478,00	7.918.613.962,00	93,76	
	PPKD	1.514.486.577.655,00	1.377.065.143.150,00	90,03	308.092.351.598,44	303.169.628.680,00	98,40	0,00	0,00	#DIV/0!	308.092.351.598,44	303.169.628.680,00	98,40	
1.20.1.20	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	11.790.579.775,00	11.381.214.586,00	96,53	30.301.347.000,00	28.116.969.342,00	92,79	42.091.926.775,00	39.498.183.928,00	93,84	
1.20.1.20	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	2.634.153.584,20	2.550.278.203,00	96,82	19.621.600.000,00	17.165.947.041,00	87,48	22.255.753.584,20	19.716.225.244,00	88,59	
1.20.1.20	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	44.175.133.488,00	48.491.976.486,16	109,77	11.167.510.686,00	9.635.924.936,00	86,29	26.050.311.878,00	25.402.192.679,16	97,51	37.217.822.564,00	35.038.117.615,16	94,14	
1.20.1.20	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIKA	0,00	0,00	0,00	1.587.348.286,40	1.524.143.570,00	96,02	2.084.000.000,00	2.044.969.410,00	98,13	3.671.348.286,40	3.569.112.980,00	97,22	
1.20.1.20	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	2.451.389.327,40	2.368.988.265,00	96,64	2.811.000.000,00	2.749.026.091,00	97,80	5.262.389.327,40	5.118.014.356,00	97,26	
1.20.1.20	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	15.636.050.974,40	16.590.778.746,00	106,11	3.278.095.080,00	2.842.793.996,00	86,72	18.914.146.054,40	19.433.572.742,00	102,75	
1.20.1.20	KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	821.671.375,40	792.020.589,00	96,39	1.635.000.000,00	1.591.032.107,00	97,31	2.456.671.375,40	2.383.052.696,00	97,00	
1.20.1.20	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.375.000,00	671.122.216,00	98,79	679.375.000,00	671.122.216,00	98,79	



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.20.1.20	KECAMATAN PACITAN	0,00	0,00	0,00	2.016.088.519,40	1.891.441.284,00	93,82	352.328.000,00	347.393.922,00	98,60	2.368.416.519,40	2.238.835.206,00	94,53
1.20.1.20	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	0,00	1.439.238.731,00	1.352.800.918,00	93,99	334.905.000,00	317.588.931,00	94,83	1.774.143.731,00	1.670.389.849,00	94,15
1.20.1.20	KECAMATAN TULAKAN	0,00	0,00	0,00	1.880.541.219,00	1.786.843.647,00	95,02	309.723.000,00	306.541.400,00	98,97	2.190.264.219,00	2.093.385.047,00	95,58
1.20.1.20	KECAMATAN NGADIROJO	0,00	0,00	0,00	1.757.095.005,60	1.697.009.394,00	96,58	291.857.000,00	282.914.788,00	96,94	2.048.952.005,60	1.979.924.182,00	96,63
1.20.1.20	KECAMATAN SUDIMORO	0,00	0,00	0,00	1.206.132.573,00	1.159.870.498,00	96,16	274.446.000,00	274.398.050,00	99,98	1.480.578.573,00	1.434.268.548,00	96,87
1.20.1.20	KECAMATAN ARJOSARI	0,00	0,00	0,00	1.761.460.319,60	1.660.167.474,00	94,25	289.641.000,00	288.694.452,00	99,67	2.051.101.319,60	1.948.861.926,00	95,02
1.20.1.20	KECAMATAN TEGALOMBO	0,00	0,00	0,00	1.319.109.826,60	1.279.490.132,00	97,00	287.342.000,00	287.214.000,00	99,96	1.606.451.826,60	1.566.704.132,00	97,53
1.20.1.20	KECAMATAN NAWANGAN	0,00	0,00	0,00	1.202.235.288,00	1.160.153.639,00	96,50	284.533.000,00	279.811.443,00	98,34	1.486.768.288,00	1.439.965.082,00	96,85
1.20.1.20	KECAMATAN BANDAR	0,00	0,00	0,00	1.324.281.204,40	1.276.183.621,00	96,37	328.959.000,00	324.654.238,00	98,69	1.653.240.204,40	1.600.837.859,00	96,83
1.20.1.20	KECAMATAN PRINGKUKU	0,00	0,00	0,00	1.243.908.264,00	1.205.833.768,00	96,94	332.419.000,00	331.872.590,00	99,84	1.576.327.264,00	1.537.706.358,00	97,55
1.20.1.20	KECAMATAN PUNUNG	0,00	0,00	0,00	1.645.448.747,00	1.589.637.093,00	96,61	282.419.000,00	277.862.548,00	98,39	1.927.867.747,00	1.867.499.641,00	96,87
1.20.1.20	KECAMATAN DONOROJO	0,00	0,00	0,00	1.544.076.430,20	1.490.745.009,00	96,55	280.105.000,00	276.587.789,00	98,74	1.824.181.430,20	1.767.332.798,00	96,88
1.20.1.20	KELURAHAN PACITAN	0,00	0,00	0,00	602.931.667,00	540.411.946,00	89,63	350.248.000,00	347.384.520,00	99,18	953.179.667,00	887.796.466,00	93,14
1.20.1.20	KELURAHAN PUCANGSEWU	0,00	0,00	0,00	456.487.325,40	440.152.813,00	96,42	342.300.000,00	339.483.525,00	99,18	798.787.325,40	779.636.338,00	97,60
1.20.1.20	KELURAHAN SIDOHARJO	0,00	0,00	0,00	585.744.452,00	566.868.893,00	96,78	384.940.000,00	381.488.378,00	99,10	970.684.452,00	948.357.271,00	97,70
1.20.1.20	KELURAHAN BALEHARJO	0,00	0,00	0,00	516.989.491,20	506.899.777,00	98,05	345.120.000,00	340.928.519,00	98,79	862.109.491,20	847.828.296,00	98,34
1.20.1.20	KELURAHAN PLOSO	0,00	0,00	0,00	518.583.505,00	503.393.445,00	97,07	370.518.000,00	369.945.943,00	99,85	889.101.505,00	873.339.388,00	98,23
1.21.	KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	1.191.805.347,80	1.153.107.305,00	96,75	400.903.200,00	391.072.432,00	97,55	1.592.708.547,80	1.544.179.737,00	96,95



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.21.1.21	KANTOR KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	1.191.805.347,80	1.153.107.305,00	96,75	400.903.200,00	391.072.432,00	97,55	1.592.708.547,80	1.544.179.737,00	96,95
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0,00	0,00	0,00	2.375.204.987,80	2.295.511.566,00	96,64	3.357.500.000,00	3.346.644.098,00	99,68	5.732.704.987,80	5.642.155.664,00	98,42
1.22.1.22	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	0,00	0,00	2.375.204.987,80	2.295.511.566,00	96,64	3.357.500.000,00	3.346.644.098,00	99,68	5.732.704.987,80	5.642.155.664,00	98,42
1.23.	STATISTIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000.000,00	169.897.700,00	99,36	171.000.000,00	169.897.700,00	99,36
1.23.1.20	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000.000,00	169.897.700,00	99,36	171.000.000,00	169.897.700,00	99,36
1.24.	KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	1.240.950.453,60	1.196.071.394,00	96,38	227.500.000,00	222.270.900,00	97,70	1.468.450.453,60	1.418.342.294,00	96,59
1.24.1.26	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	0,00	0,00	0,00	1.240.950.453,60	1.196.071.394,00	96,38	227.500.000,00	222.270.900,00	97,70	1.468.450.453,60	1.418.342.294,00	96,59
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000.000,00	638.387.997,00	96,87	659.000.000,00	638.387.997,00	96,87
1.25.1.07	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000.000,00	638.387.997,00	96,87	659.000.000,00	638.387.997,00	96,87
1.26.	PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.500.000,00	953.867.756,00	99,10	962.500.000,00	953.867.756,00	99,10
1.26.1.26	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.500.000,00	953.867.756,00	99,10	962.500.000,00	953.867.756,00	99,10
2.	URUSAN PILIHAN	853.948.158,00	889.693.753,00	104,19	19.786.673.308,20	18.934.822.006,00	95,69	47.622.994.219,00	46.846.526.938,12	98,37	67.409.667.527,20	65.781.348.944,12	97,58
2.01.	PERTANIAN	20.435.000,00	20.470.000,00	100,17	14.619.538.884,80	14.009.993.744,00	95,83	23.054.942.950,00	22.571.015.267,12	97,90	37.674.481.834,80	36.581.009.011,12	97,10
2.01.1.21	KANTOR KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.603.701,00	1.355.851.156,00	98,49	1.376.603.701,00	1.355.851.156,00	98,49
2.01.2.01	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	20.435.000,00	20.470.000,00	100,17	8.055.743.078,20	7.694.725.767,00	95,52	16.476.932.883,00	16.055.258.117,12	97,44	24.532.675.961,20	23.749.983.884,12	96,81



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2.01.2.02	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	0,00	0,00	0,00	6.563.795.806,60	6.315.267.977,00	96,21	5.201.406.366,00	5.159.905.994,00	99,20	11.765.202.172,60	11.475.173.971,00	97,53
2.02.	KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454.314.835,00	4.406.262.750,00	98,92	4.454.314.835,00	4.406.262.750,00	98,92
2.02.2.02	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454.314.835,00	4.406.262.750,00	98,92	4.454.314.835,00	4.406.262.750,00	98,92
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	2.045.069.772,40	1.945.582.575,00	95,14	5.739.986.750,00	5.655.492.728,00	98,53	7.785.056.522,40	7.601.075.303,00	97,64
2.03.2.03	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	0,00	0,00	0,00	2.045.069.772,40	1.945.582.575,00	95,14	5.739.986.750,00	5.655.492.728,00	98,53	7.785.056.522,40	7.601.075.303,00	97,64
2.04.	PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956.418.000,00	3.941.727.507,00	99,63	3.956.418.000,00	3.941.727.507,00	99,63
2.04.1.17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956.418.000,00	3.941.727.507,00	99,63	3.956.418.000,00	3.941.727.507,00	99,63
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	833.513.158,00	869.223.753,00	104,28	3.122.064.651,00	2.979.245.687,00	95,43	5.945.332.900,00	5.835.628.369,00	98,15	9.067.397.551,00	8.814.874.056,00	97,22
2.05.2.05	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	833.513.158,00	869.223.753,00	104,28	3.122.064.651,00	2.979.245.687,00	95,43	5.945.332.900,00	5.835.628.369,00	98,15	9.067.397.551,00	8.814.874.056,00	97,22
2.06.	PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176.225.484,00	3.153.450.614,00	99,28	3.176.225.484,00	3.153.450.614,00	99,28
2.06.1.15	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176.225.484,00	3.153.450.614,00	99,28	3.176.225.484,00	3.153.450.614,00	99,28
2.07.	INDUSTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.773.300,00	983.299.703,00	98,75	995.773.300,00	983.299.703,00	98,75
2.07.1.15	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.773.300,00	983.299.703,00	98,75	995.773.300,00	983.299.703,00	98,75
2.08.	KETRANSMIGRASIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	299.650.000,00	99,88	300.000.000,00	299.650.000,00	99,88
2.08.1.13	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	299.650.000,00	99,88	300.000.000,00	299.650.000,00	99,88
	JUMLAH	1.649.390.896.801,00	1.527.531.210.970,59	92,61	1.118.443.479.589,54	999.717.047.413,00	89,38	675.932.320.982,00	645.002.273.206,15	95,42	1.794.375.800.571,54	1.644.719.320.619,15	91,66

Keterangan : Data sebelum audit BPK



- c. Permasalahan dan Solusi
 1. Permasalahan
 - a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundang – undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat;
 - b. Dalam pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Umum Daerah (Dana BOS, Blockgrand dan sejenisnya), terdapat ketidakjelasan aturan yang mengatur terkait penyalurannya, disamping masih kurang jelasnya petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan belanja BOS;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari Kementerian Dalam Negeri dan jaringan on line antar SKPD mulai dari penganggaran, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban dan pengelolaan serta panatausahaan aset daerah karena belum seluruhnya aplikasi yang ada dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Alokasi Belanja APBD mengalami ketidakseimbangan karena sebagian besar alokasi belanja terserap ke belanja tidak langsung, sehingga kebijakan prioritas belanja langsung khususnya belanja modal belum optimal;
 - e. Adanya alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang penetapan pagu alokasi bantuannya setelah Perda APBD Kabupaten ditetapkan, sehingga untuk merealisasikan belanjanya perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - f. Terbatasnya jumlah personil di Satuan Kerja Perangkat Saerah (SKPD) yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 2. Solusi
 - a. Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan perubahan Peraturan Perundang – undangan pengelolaan keuangan dan solusi dalam upaya mengantisipasi dan



- menindaklanjuti perubahan Peraturan tersebut;
- b. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD), ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - c. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan optimalisasi modul aplikasi SIPKD dalam rangka peningkatan keakuratan dan kecepatan penyediaan data keuangan;
 - d. Berkoordinasi dengan pihak ketiga yang di tunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengoptimalkan jaringan dan aplikasi SIPKD secara on line antar SKPD;
 - e. Mengusulkan dan menambah peralatan pendukung dalam rangka mengoptimalkan jaringan on line antar SKPD baik di server maupun jaringannya;
 - f. Mendatangkan pihak ketiga yang telah di tunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan akuntansi melalui Aplikasi SIPKD sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri mengimplementasikan aplikasi tersebut;
 - g. Aktif mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi SIPKD sehingga mampu mengoperasikan aplikasi tersebut secara mandiri;
 - h. Mengoptimalkan penyusunan perencanaan penganggaran belanja sesuai dengan keluaran (out put) yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - i. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi tentang rencana alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, serta segera melakukan pencairan dana dan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD agar bantuan tersebut dapat segera dilaksanakan;
 - j. Dalam rangka peningkatan jumlah personil SKPD yang memahami



dan atau memiliki kemampuan terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ditempuh langkah – langkah sebagai berikut :

- Mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan, baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Pengelolaan Aset Daerah;
- Memberikan Pembinaan dan Bimbingan teknis kepada pengelola keuangan di SKPD dengan mendatangkan narasumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, mengenai Pengelolaan Aset Daerah.



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan selama Tahun 2016. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 yang merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2016. Merupakan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam RPJMD Kabupaten Pacitan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016, pada tahun 2014 melaksanakan 19 (sembilan belas) sasaran dan 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama yang dalam pencapaiannya didukung oleh APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 mencakup 194 program dan 877 kegiatan, dengan rincian Urusan Wajib 155 program dan 767 kegiatan sedangkan untuk Urusan Pilihan sebanyak 39 program dan 110 kegiatan.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Pacitan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 19 (sembilan belas) sasaran yang akan dicapai, 18 diantaranya capaian indikatornya "SANGAT BAIK" dan sedangkan satu sasaran yaitu Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan indikator kinerja utama opini audit BPK masih belum diketahui hasilnya karena masih dalam proses audit / pemeriksaan.

Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Oleh karena itu APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu



yang hendak dicapai dalam suatu tahun anggaran. Pengendalian belanja daerah dilaksanakan dalam rangka mencapai 3 target yaitu:

1. Alokasi belanja yang tepat sasaran.
2. Alokasi belanja yang berkeadilan sosial.
3. Efisiensi pengadaan barang dan jasa.

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.649.390.896.801,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.527.531.210.970,59 kurang dari target sebesar Rp. 121.859.685.830,41 atau mencapai 92,61%.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, dan khususnya untuk tahun 2016 yang juga dituangkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami mengakui semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA				
MISI I : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik				
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
1	Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional	1	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)
		2	Tercapainya SPM daerah	Prosentase SPM yang mencapai target
		3	Terselenggaranya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan	1	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	Opini audit BPK
MISI II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
1	Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat	1	Terwujudnya perilaku hidup sehat	Penduduk yang menggunakan jamban (%) Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)
		2	Terciptanya lingkungan sehat	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Skor Evaluasi Adipura
2	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1	Meningkatnya pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup
		2	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (‰)

MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat				
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
1	Mempermudah akses pendidikan	1	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
				- SD/MI
				- SMP/MTs
			Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	Angka rata-rata lama sekolah
2	Meningkatkan kualitas pendidikan	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Angka Melek Huruf
				Angka kelulusan
				- SD/MI
				- SMP/MTs
				- SMA/SMK/MA
MISI IV : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan				
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
1	Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah	1	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif
		2	Ketersediaan pangan daerah	Penguatan cadangan pangan (%)
		3	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	Prosentase Koperasi Aktif
				Jumlah UMKM
		4	Pemasaran komoditas daerah	Omset penjualan komoditas unggulan (milyar)

MISI V : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar				
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
1	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
				- Jalan
				- Jembatan
				Jumlah terminal bus/sub terminal
				Jumlah rumah tangga pengguna listrik
		2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
MISI VI : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan				
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
1	Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, berbudi luhur dan damai	1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya dan
				Jumlah kegiatan kepemudaan
				Jumlah kegiatan olahraga
				Angka Kriminalitas
		2	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
				Prosentase kader bina ketahanan keluarga

RENCANA KERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2016	NO	PROGRAM	ANGGARAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA							
MISI I : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik							
1	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	1.1	Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	6.75	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,311,181,000.00
					2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	51,217,440,609.00
					3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,953,095,080.00
2	Tercapainya SPM daerah	2.1	Prosentase SPM yang mencapai target	80.00	1	Program Penetapan dan pengendalian Penerapan SPM	15,000,000.00
3	Terselenggaranya Pelayanan Prima	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100.00	1	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	382,000,000.00
					2	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata	21,408,741,410.00
					3	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan (BLUD)	54,100,000,000.00
					4	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	27,650,000.00
					5	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	605,000,000.00
					6	Program keluarga berencana	2,319,468,637.00
					7	Program pelayanan kontrasepsi	225,000,000.00
					8	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	555,000,000.00
					9	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100,000,000.00
					10	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	584,850,000.00
					11	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	7,019,262,000.00
					12	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2,767,199,000.00
					13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,140,000,000.00
					14	Program Penataan Administrasi Kependudukan	942,000,000.00
4	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	4.1	Opini audit BPK	WTP	1	Program perencanaan pembangunan daerah	2,290,000,000.00
					2	Program perencanaan tata ruang	1,060,000,000.00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2016	NO	PROGRAM	ANGGARAN
					3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	7,019,262,000.00
					4	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2,767,199,000.00
					5	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	13,710,555,500.00
					6	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	35,000,000.00
					7	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	32,000,000.00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2016	NO	PROGRAM	ANGGARAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA							
MISI II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat							
1	Terwujudnya perilaku hidup sehat	1.1	Penduduk yang menggunakan jamban (%)	90	1	Program pengembangan lingkungan sehat	365,000,000.00
		1.2	Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	65	1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1,623,295,750.00
2	Terciptanya lingkungan sehat	2.1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	41.58	1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4,220,000,000.00
					2	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	975,000,000.00
		2.2	Skor Evaluasi Adipura	79	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,785,463,000.00
					2	Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	984,071,157.00
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan	3.1	Angka Usia Harapan Hidup	72	1	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	25,000,000.00
					2	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25,000,000.00
					3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	290,000,000.00
					4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6,998,752,000.00
					5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	320,000,000.00
					6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	35,956,362,837.00
					7	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1,424,020,000.00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2016	NO	PROGRAM	ANGGARAN
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	4.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (‰)	0.44	1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	18,793,033,370.00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2016	NO	PROGRAM	ANGGARAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA							
MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat							
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	1.1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil		1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	24,489,446,143.00
			SD/MI	100.00	2	Program Pendidikan Menengah	6,912,217,923.00
			SMP/MTs	100.00	3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,652,336,000.00
2	Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	2.1	Angka rata-rata lama sekolah	7.08	1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	24,489,446,143.00
					2	Program Pendidikan Menengah	6,912,217,923.00
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan	3.1	Angka Melek Huruf	91.65	1	Program pendidikan non formal	532,399,000.00
					2	Program pendidikan luar biasa	118,508,900.00
					3	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	180,660,000.00
					4	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	433,000,000.00
		3.2	Angka kelulusan		1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,780,000,000.00
				100.00	2	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	24,489,446,143.00
				99.93	3	program pendidikan menengah	6,912,217,923.00
	99.91	4	program manajemen pelayanan pendidikan	1,769,000,000.00			

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2016	NO	PROGRAM	ANGGARAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA							
MISI IV : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan							
1	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	1.1.	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	3	1	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1,335,000,000.00
					2	Program kelitbangan	1,561,300,000.00
					3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	160,000,000.00
					4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	47,758,798.00
					5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	385,000,000.00
					6	Program pengembangan destinasi wisata	2,468,708,000.00
					7	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	627,628,000.00
					8	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	638,819,000.00
					9	Program pengembangan sentra - sentra industri potensial	945,773,300.00
2	Ketersediaan pangan daerah	2.1	Penguatan cadangan pangan (%)	65	1	Pogram Peningkatan cadangan pangan	1,376,603,701.00
					2	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	4,120,594,500.00
					3	Program peningkatan produksi hasil peternakan	685,000,000.00
					4	Program pengembangan budidaya perikanan	734,640,000.00
					5	Program pengembangan perikanan tangkap	1,634,600,000.00
3	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	3.1	Prosentase Koperasi Aktif	90.74	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	365,000,000.00
					3.1	Jumlah UMKM	22198
		2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	543,000,000.00			
		3	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	20,000,000.00			
		4	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	295,775,000.00			
5	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	50,000,000.00					
4	Pemasaran komoditas daerah	4.1	omset penjualan komoditas unggulan (milyar)	610	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	295,775,000.00
					2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	584,850,000.00
					3	Program pengembangan kemitraan	1,102,710,000.00
					4	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	2,941,225,484.00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2016	NO	PROGRAM	ANGGARAN	
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA								
MISI V : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar								
1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	1.1	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10,200,000,000.00	
			- Jalan	54.5	2	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	113,960,649,484.00	
			- Jembatan	92.3	3	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	65,120,000.00	
					4	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	91,798,454,761.00	
		1.2	Jumlah terminal bus/sub terminal	6		1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	255,000,000.00
						2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	53,000,000.00
		1.3	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	73.49		1	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	5,085,690,500.00
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	2.1	swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	18.77	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	522,500,000.00	
					2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	235,000,000.00	
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA								
MISI VI : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama								
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	1.1	Angka Kriminalitas	1.5	1	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	160,000,000.00	
					2	Program pengembangan wawasan kebangsaan	510,000,000.00	
					3	Program pendidikan politik masyarakat	395,000,000.00	
					4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	760,000,000.00	
					5	program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	430,000,000.00	
					6	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	811,075,000.00	
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.41	1	Program pengembangan nilai budaya	365,000,000.00		
				2	Program pengelolaan kekayaan budaya	195,000,000.00		
				3	Program peningkatan peran serta kepemudaan	495,000,000.00		
				4	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	445,000,000.00		
				5	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	205,000,000.00		

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2016	NO	PROGRAM	ANGGARAN
2	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	2.1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	555,000,000.00
		2.2	Prosentase kader bina ketahanan keluarga	92	1	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	4,057,320,000.00
					2	Program peningkatan Kesempatan kerja	817,613,700.00
					3	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	10,786,000,000.00

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN								NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI	
			INDIKATOR	TARGET 2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016							% CAPAIAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA MISI I : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik																	
1	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	1.1	Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	6.75	5.24	6.69	6.52	6.50	6.65	7.52	111.41	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,311,181,000.00	3,203,061,462.00	96.73	108,119,538.00
												2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	51,217,440,609.00	49,543,476,902.00	96.73	1,673,963,707.00
												3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,953,095,080.00	1,555,493,923.00	79.64	397,601,157.00
2	Tercapainya SPM daerah	2.1	Prosentase SPM yang mencapai target	82.00	71.70	70.51	70.51	70.51	70.51	82	100.00	1	Program Penetapan dan pengendalian Penerapan SPM	15,000,000.00	13,959,500.00	93.06	1,040,500.00
3	Terselenggaranya Pelayanan Prima	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100.00	80.00	79.00	97.90	100.00	100.00	100	100.00	1	Program standarisasi pelayanan kesehatan	1,140,000,000.00	923,412,075.00	81.00	216,587,925.00
												2	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata	21,408,741,410.00	21,166,616,559.00	98.87	242,124,851.00
												3	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan (BLUD)	54,100,000,000.00	58,636,695,248.24	108.39	(4,536,695,248.24)
												4	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	27,650,000.00	27,650,000.00	100.00	-
												5	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	605,000,000.00	597,728,000.00	98.80	7,272,000.00
												6	Program penataan administrasi penduduk	942,000,000.00	904,580,350.00	96.03	37,419,650.00
												7	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	382,000,000.00	378,183,670.00	99.00	3,816,330.00
												8	Program keluarga berencana	2,319,468,637.00	2,180,380,425.00	94.00	139,088,212.00
												9	Program pelayanan kontrasepsi	225,000,000.00	165,374,900.00	73.50	59,625,100.00
												10	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	555,000,000.00	547,552,000.00	98.66	7,448,000.00
												11	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100,000,000.00	99,933,100.00	99.93	66,900.00
												12	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	584,850,000.00	583,002,650.00	99.68	1,847,350.00
												13	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	7,019,262,000.00	6,572,968,670.00	93.64	446,293,330.00
												14	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2,767,199,000.00	2,639,510,014.00	95.39	127,688,986.00
4	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	4.1	Opini audit BPK	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	n.a	n.a	1	Program perencanaan pembangunan daerah	2,290,000,000.00	2,274,285,200.00	99.31	15,714,800.00
												2	Program perencanaan tata ruang	1,060,000,000.00	987,684,695.00	93.18	72,315,305.00
												3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	7,019,262,000.00	6,572,968,670.00	93.64	446,293,330.00
												4	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2,767,199,000.00	2,639,510,014.00	95.39	127,688,986.00

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN									NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
			INDIKATOR	TARGET 2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	% CAPAIAN						
												5	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	13,710,555,500.00	13,439,476,884.85	98.02	271,078,615.15
												6	Program Penalaan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	35,000,000.00	34,855,000.00	99.59	145,000.00
												7	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	32,000,000.00	21,674,650.00	67.73	10,325,350.00

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN								NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI	
			INDIKATOR	TARGET 2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016							% CAPAIAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA																	
MISI II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat																	
1	Terwujudnya perilaku hidup sehat	1.1	Penduduk yang menggunakan jamban (%)	90.00	79.47	83.02	100.00	100.00	100.00	100.00	111.11	1	Program pengembangan lingkungan sehat	365,000,000.00	364,184,000.00	99.78	816,000.00
		1.2	Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	65.00	58.10	52.83	55.16	60.26	61.03	65.10	100.15	1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1,623,295,750.00	1,610,283,150.00	99.20	13,012,600.00
2	Terciptanya lingkungan sehat	2.1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	41.58	38.68	39.73	40.00	40.61	41.22	41.83	100.15	1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4,220,000,000.00	4,113,939,000.00	97.49	106,061,000.00
												2	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	975,000,000.00	459,063,160.00	47.08	515,936,840.00
		2.2	Skor Evaluasi Adipura	79.00	74.46	76.68	76.68	74.22	74.70	79.00	100.00	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,785,463,000.00	1,691,310,432.00	94.73	94,152,568.00
2	Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup											984,071,157.00	817,135,717.00	83.04	166,935,440.00		
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan	3.1	Angka Usia Harapan Hidup	72.00	71.48	71.69	71.71	71.80	70.75	70.83	98.38	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6,998,752,000.00	6,736,468,416.00	96.25	262,283,584.00
												2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	35,956,362,837.00	31,119,671,868.00	86.55	4,836,690,969.00
												3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	290,000,000.00	275,274,105.00	94.92	14,725,895.00
												4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	320,000,000.00	319,422,650.00	99.82	577,350.00
												5	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1,424,020,000.00	787,856,226.00	55.33	636,163,774.00
												6	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	25,000,000.00	24,870,000.00	99.48	130,000.00
												7	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25,000,000.00	24,839,825.00	99.36	160,175.00

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN								NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI	
			INDIKATOR	TARGET 2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016							% CAPAIAN
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	4.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (%)	0.44	0.38	0.41	0.41	0.53	0.41	0.44	100.00	1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	18,793,033,370.00	17,302,389,967.00	92.07	1,490,643,403.00

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN									NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI	
			INDIKATOR	TARGET 2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	% CAPAIAN							
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat																		
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	1.1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil									1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,652,336,000.00	3,554,332,100.00	97.32	98,003,900.00	
			SD/MI	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	24,489,446,143.00	21,858,033,506.90	89.25	2,631,412,636.10	
			SMP/MTs	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3	Program Pendidikan Menengah	6,912,217,923.00	6,793,423,000.00	98.28	118,794,923.00	
2	Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	2.1	Angka rata-rata lama sekolah	7.08	6.94	6.99	6.95	7.06	7.27	7.35	103.81	1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	24,489,446,143.00	21,858,033,506.90	89.25	2,631,412,636.10	
												2	Program Pendidikan Menengah	6,912,217,923.00	6,793,423,000.00	98.28	118,794,923.00	
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan	3.1	Angka Melek Huruf	91.65	91.60	91.62	92.44	92.69	92.83	93.14	101.63	1	Program pendidikan non formal	532,399,000.00	525,421,500.00	98.69	6,977,500.00	
												2	Program pendidikan luar biasa	118,508,900.00	107,497,900.00	90.71	11,011,000.00	
												3	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	180,660,000.00	171,244,800.00	94.79	9,415,200.00	
												4	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	433,000,000.00	431,291,850.00	99.61	1,708,150.00	
		3.2	Angka kelulusan										1	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	24,489,446,143.00	21,858,033,506.90	89.25	2,631,412,636.10
				SD/MI	100.00	100.00	100.00	99.40	100.00	100.00	100.00	100.00	2	Program pendidikan menengah	6,912,217,923.00	6,793,423,000.00	98.28	118,794,923.00
				SMP/MTs	99.93	100.09	99.46	99.83	99.34	100.00	100.00	100.07	3	Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	1,780,000,000.00	1,658,122,200.00	93.15	121,877,800.00
	SMA/SMK/MA	99.91	99.78	99.87	99.87	99.99	99.99	99.96	100.05	4	Program manajemen pelayanan pendidikan	1,769,000,000.00	1,743,156,080.00	98.54	25,843,920.00			

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN								NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI	
			INDIKATOR	TARGET 2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016							% CAPAIAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA																	
MISI IV : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan																	
1	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	1.1.	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	3	1	1	1	2	4	4	133.33	1	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1,335,000,000.00	1,327,518,100.00	99.44	7,481,900.00
												2	Program kelitbangan	1,561,300,000.00	1,529,261,750.00	97.95	32,038,250.00
												3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	160,000,000.00	155,495,365.00	97.18	4,504,635.00
												4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	47,758,798.00	45,597,800.00	95.48	2,160,998.00
												5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	385,000,000.00	380,655,466.00	98.87	4,344,534.00
												6	Program pengembangan destinasi wisata	2,468,708,000.00	2,460,794,041.00	99.68	7,913,959.00
												7	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	627,628,000.00	624,942,852.00	99.57	2,685,148.00
												8	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	638,819,000.00	625,185,000.00	97.87	13,634,000.00
												9	Program pengembangan sentra - sentra industri potensial	945,773,300.00	933,703,703.00	98.72	12,069,597.00
2	Ketersediaan pangan daerah	2.1	Penguatan cadangan pangan (%)	65.00	15.00	25.00	45.13	64.30	144.44	100.00	153.85	1	Program Peningkatan cadangan pangan	1,376,603,701.00	1,355,851,156.00	98.49	20,752,545.00
												2	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	4,120,594,500.00	4,062,556,959.00	98.59	58,037,541.00
												3	Program peningkatan produksi hasil peternakan	685,000,000.00	645,959,670.00	94.30	39,040,330.00
												4	Program pengembangan budidaya perikanan	734,640,000.00	708,447,000.00	96.43	26,193,000.00
												5	Program pengembangan perikanan tangkap	1,634,600,000.00	1,620,195,000.00	99.12	14,405,000.00
3	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	3.1	Prosentase Koperasi Aktif	90.74	85.51	87.13	87.30	87.42	90.1	89.67	98.82	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	365,000,000.00	364,394,000.00	99.83	606,000.00
		3.1	Jumlah UMKM	22198	20,843	21,114	21,326	21671	22013	23170	104.38	1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	543,000,000.00	542,505,150.00	99.91	494,850.00
												2	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	330,000,000.00	326,269,000.00	98.87	3,731,000.00
												3	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	-
												4	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	295,775,000.00	289,515,500.00	97.88	6,259,500.00
												5	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	50,000,000.00	49,596,000.00	99.19	404,000.00
4	Pemasaran komoditas daerah	4.1	omset penjualan komoditas unggulan (milyar)	610	564	582.9	637,576	688	711	732	120.00	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	295,775,000.00	289,515,500.00	97.88	6,259,500.00
												2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	584,850,000.00	583,002,650.00	99.68	1,847,350.00
												3	Program pengembangan kemitraan	1,102,710,000.00	1,100,278,000.00	99.78	2,432,000.00
												4	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	2,941,225,484.00	2,920,274,614.00	99.29	20,950,870.00

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN									NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			INDIKATOR	TARGET 2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	% CAPAIAN						
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA																	
MISI V : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar																	
1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	1.1	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik									1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10,200,000,000.00	9,940,934,500.00	97.46	259,065,500.00
			- Jalan	54.50	50.23	51.11	52.12	54.61	56.12	58.76	107.82	2	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan jembatan	113,960,649,484.00	112,454,952,992.61	98.68	1,505,696,491.39
			- Jembatan	92.30	90.91	91.57	92.15	92.45	92.81	93.46	101.26	3	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	65,120,000.00	61,886,150.00	95.03	3,233,850.00
		1.2	Jumlah terminal bus/sub terminal	6	6	6	6	6	6	6	100.00	4	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	91,798,454,761.00	89,798,016,450.00	97.82	2,000,438,311.00
				1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	255,000,000.00	254,922,700.00	99.97	77,300.00								
						2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	53,000,000.00	51,066,000.00	96.35	1,934,000.00						
1.3	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	73.49	84,067	94,050	101,458	107063	133678	81.17	110.45	1	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	5,085,690,500.00	5,031,190,850.00	98.93	54,499,650.00		
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	2.1	swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	18.77	18.93	26.52	24.2	28.47	28.66	101	538.09	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	522,500,000.00	521,461,987.00	99.80	1,038,013.00
												2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	235,000,000.00	234,388,910.00	99.74	611,090.00

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN								NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI	
			INDIKATOR	TARGET 2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016							% CAPAIAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA																	
MISI VI : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama																	
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	1.1	Angka Kriminalitas	1.5	18.93	26.52	24.2	28.47	1.9	1.4	93.33	1	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	160,000,000.00	154,600,000.00	96.63	5,400,000.00
				2	Program pengembangan wawasan kebangsaan	510,000,000.00	469,024,710.00	91.97	40,975,290.00								
				3	Program pendidikan politik masyarakat	395,000,000.00	386,689,425.00	97.90	8,310,575.00								
				4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	760,000,000.00	755,920,000.00	99.46	4,080,000.00								
				5	Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	430,000,000.00	429,984,500.00	100.00	15,500.00								
				6	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	811,075,000.00	792,997,000.00	97.77	18,078,000.00								
		1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.41	72.48	72.91	73.25	73.27	74.08	64.44	87.78	1	Program pengembangan nilai budaya	365,000,000.00	361,268,300.00	98.98	3,731,700.00
				2	Program pengelolaan kekayaan budaya	195,000,000.00	133,573,000.00	68.50	61,427,000.00								
				3	Program peningkatan peran serta kepemudaan	495,000,000.00	490,408,850.00	99.07	4,591,150.00								
				4	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	445,000,000.00	445,000,000.00	100.00	-								
				5	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	205,000,000.00	205,000,000.00	100.00	-								
				2	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	2.1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80.00	3.60	3.60	40.76	60.00	72.00	119.30	149.13	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2.2	Prosentase kader bina ketahanan keluarga	92.00	62.61	62.61	76.22	77.40	87.00	92.2	100.22	1	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	4,057,320,000.00	3,651,107,450.00	89.99	406,212,550.00		
2											2	Program peningkatan Kesempatan kerja	817,613,700.00	814,669,700.00	99.64	2,944,000.00	
											3	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	10,786,000,000.00	686,308,150.00	6.36	10,099,691,850.00	



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 15.A TAHUN 2012
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011- 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016 perlu penyempurnaan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 15.A TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 - 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 2.A, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.A

Inspektorat Kabupaten Pacitan mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan ; dan
 - b. Memantau kemajuan pencapaian kinerja kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Pada Lampiran I dihapus
 3. Pada Lampiran II diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 26 - 5 - 2014

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 Mei 2014**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TANGGAL : 26 - 5 - 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011-2016

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA								
MISI I : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik								
TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1		2	3		4	5	6	7
1.	Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional	1.	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya dibanding jumlah seluruh aparatur	2,64	6,75
		2.	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah	Prosentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Jumlah SKPD yang mencapai target SPM dibanding Jumlah seluruh SKPD yang menerapkan SPM x 100%	31,6	82
		3.	Terselenggaranya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	ada/baik	18,75	100

	1		2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan	1.	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	Opini audit BPK: WTP (wajar tanpa pengecualian)	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP

MISI II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1		2		3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat	1.	Terwujudnya perilaku hidup sehat	a. Prosentase penduduk yang menggunakan jamban	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Jumlah Penduduk yang menggunakan jamban dibandingkan jumlah seluruh penduduk x 100 %	76,93	90
				b. Prosentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Jumlah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat dibanding jumlah seluruh rumah tangga x 100 %	58,1	64
		2.	Terciptanya lingkungan sehat	a. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan	Jumlah lingkungan (Kelurahan/Desa) yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), meliputi: jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100 %	38,68	41,58

MISI II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1	2	3	4	5	6	7
		b. Skor Evaluasi Adipura	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	skor penilaian adipura	74,65	79
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan	angka usia harapan hidup	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.	70,88	72
	2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dibanding Jumlah Penduduk x 1000	0,37	0,44

MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1		2		3	4	5	6	7
1.	Mempermudah akses pendidikan	1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan			
				a. SD/MI		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman	0	100
				b. SMP/MTs		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman	0	100

MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1	2	3	4	5	6	7
	2. Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	Angka rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang di jalani, kelas yang di duduki dan pendidikan yang ditamatkan	6,9	7,08
2. Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Meningkatnya pelayanan pendidikan	a. Angka melek huruf	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x 100%	91,58	91,65
		b. Angka kelulusan:	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan			
		1) SD/MI		Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya x 100 %	99,98	100
		2) SMP/MTs		Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya x 100 %	99,35	99,93

MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1	2	3	4	5	6	7
		3) SMA/SMK/MA		Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya x 100 %	98,34	99,91

MISI IV : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah	1. Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	Jumlah <i>cluster</i> ekonomi unggulan produktif	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan	jumlah <i>cluster</i> ekonomi unggulan produktif di satu wilayah dalam tahun bersangkutan	1	3
	2. Ketersediaan pangan daerah	Penguatan cadangan pangan	Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan	ketersediaan cadangan bahan pangan dalam satu tahun dibanding jumlah kebutuhan bahan pangan pada tahun yang bersangkutan x 100 %	0	65
	3. Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	a. Prosentase koperasi aktif		Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan	Jumlah Koperasi aktif dibanding jumlah seluruh koperasi x 100%	84,18
b. Jumlah UMKM			Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan	Jumlah UKM aktif atau UKM yang ada di Kabupaten Pacitan	20.793	22.198

1	2	3	4	5	6	7	
		4 Pemasaran komoditas daerah	Omset penjualan komoditas unggulan (Milyar)	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan	jumlah keseluruhan omset penjualan komoditas unggulan	556	610

MISI V : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1		2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	1.	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	a. % jalan dan jembatan dalam kondisi baik:	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan			
				1) jalan		Panjang jalan kondisi baik dibanding Panjang Jalan seluruhnya	49,58	54,5
				2) jembatan		Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibanding jumlah seluruh jembatan x 100%	89,84	92,3
				b. Jumlah Terminal Bus/sub terminal	Dinas Perhubungan komunikasi dan Informasi Kabupaten Pacitan	Jumlah Terminal Bus/Sub terminal yang ada di Kabupaten Pacitan	6	6
			c. Jumlah rumah tangga pengguna listrik	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik	60,13	73,49	

1	2	3	4	5	6	7
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan	Jumlah swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat dibanding Total Program Pemberdayaan Masyarakat x 100%	16,56	18,77

MISI VI : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1		2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, berbudi luhur dan damai	1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	a. Angka kriminalitas	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibanding jumlah penduduk x 10.000	2,3	1,5
				b. Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan	Merupakan rata-rata dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak	72,07	73,41
		2.	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	a. Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan dibanding jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x 100%	15	80

**Daftar Penghargaan (Hasil Capaian Kinerja)
Yang Diterima Oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016**

NO	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	INSTANSI PEMBERI
1	Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Tingkat Propinsi	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
2	Anti-Corruption Teacher Supercamp 2016 : Guru Menulis Anti Korupsi	5 Besar Tingkat Nasional	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
3	Kriteria Kabupaten/Kota Pedulia Hak Asasi Manusia	Tingkat Nasional	Dirjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan HAM
4	Juara II Lomba Kelompok Agribisnis Peternakan	Tingkat Nasional	Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
5	Lomba Menulis Surat Kepada Presiden RI	Juara 1 Tingkat Nasional	
6	Lomba Kompetensi Siswa Bidang Kriya Kayu	Juara 1 Tingkat Nasional	Kementerian Pendidikan
7	Lomba Keterampilan Siswa	Juara 1 Tingkat Nasional	Kementerian Pendidikan
8	O2SN Guru SD	Juara 2 Tingkat Nasional	Kementerian Pendidikan
9	Lomba Kompetensi Siswa Bidang Kriya Kulit	Juara 2 Tingkat Nasional	Kementerian Pendidikan
10	Lomba Kompetensi Siswa Bidang Kriya Tekstil	Juara 3 Tingkat Nasional	Kementerian Pendidikan
11	Lomba Inovasi Pembelajaran	Juara 3 Tingkat Nasional	Kementerian Pendidikan
12	Lomba Karya Tulis Ilmiah	Juara Harapan 3 Tingkat Nasional	Kementerian Pendidikan
13	Lomba Kompetensi Siswa Bidang Joinery	Juara Harapan 3 Tingkat Nasional	Kementerian Pendidikan
14	Peringkat Pertama Dalam Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak Pada Kppn Pacitan Tahun Anggaran 2016	Tingkat Nasional	Kementerian Keuangan

NO	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	INSTANSI PEMBERI
15	Penghargaan Atas Kerjasama Mewujudkan Layanan Bebas Korupsi Dan Pungutan Liar Dalam Pencairan Dana Apbn Pada KPPN Pacitan	Tingkat Nasional	Kementerian Keuangan
16	Catur Dalang Terbaik Dalam Festival Dalang Anak Nasional 2016	Tingkat Nasional	Kementerian Pendidikan
17	Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas	Tingkat Nasional	Kementerian Perhubungan
18	Pakarti Utama Pelaksana Terbaik Lomba Posyandu Nasional Tingkat Kabupaten Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional Ke XXIII Tahun 2016	Tingkat Nasional	Kementerian Dalam Negeri
19	Pelaksanaan Sertifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berstandar Internasional ISO 9001-2008	Tingkat Nasional	Kementerian Dalam Negeri
20	Eliminasi Malaria Untuk Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016	Tingkat Nasional	Kementerian Dalam Negeri
21	Adiwiyata Tingkat Nasional, SD Baleharjo 2 Pacitan	Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup
22	Adiwiyata Tingkat Nasional, SMP Negeri 1 Pringkuku	Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup
23	Adiwiyata Mandiri, SMP Negeri 1 Pacitan	Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup
24	Adiwiyata Nasional, SMP Negeri 4 Pacitan	Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup
25	Adiwiyata Tingkat Nasional, SMP Negeri 1 Pacitan	Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup
26	Adiwiyata Tingkat Nasional, SD Alam Pacitan	Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup
27	Adipura Tingkat Nasional	Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup
28	Kawastara Pawitra (Kepala Daerah Berintegritas Dalam Peran Serta Dan Kinerjanya Pada Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah)	Tingkat Nasional	
29	Anugerah Paud Berkualitas	Tingkat Nasional	Kementerian Pendidikan

NO	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	INSTANSI PEMBERI
30	Pakarti Utama I Lomba UP2K Tingkat Nasional Kategori Kabupaten Tahun 2016	Tingkat Nasional	TP-PKK Pusat
31	Pakarti Utama I Lomba Posyandu Tingkat Nasional Kategori Kabupaten Tahun 2016	Tingkat Nasional	TP-PKK Pusat
32	Juara I Tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba BBGRM	Tingkat Propinsi	Bapemas Prov. Jawa Timur
33	Juara I Tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba Kinerja LPMD/K	Tingkat Propinsi	Bapemas Provinsi Jawa Timur
34	Juara III Lomba Bumdes	Tingkat Propinsi	Bapemas Provinsi Jawa Timur
36	Penghargaan Pemenang Lomba Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kinerja Bupati/ Walikota	Tingkat Propinsi	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
37	Adiwiyata Provinsi, SMPN 1 Arjosari	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timu
38	Adiwiyata Provinsi, SMPN 1 Arjosari	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timu
39	Adiwiyata Provinsi, SMPN 2 Kebonagung	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timu
40	Adiwiyata Provinsi, SMAN 1 Pacitan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timu
41	Adiwiyata Provinsi, SMKN 1 Nawangan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timu
42	Adiwiyata Provinsi, SMPN 1	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timu
43	Adiwiyata Provinsi, SDN Mentoro	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timu
44	Adiwiyata Provinsi, SDN Tegalombo 2	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timu
45	Adiwiyata Provinsi, SDN Pacitan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timu
46	Adiwiyata Provinsi, SDN Ploso 1	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timu
47	Desa Berseri Tingkat Provinsi Kategori Madya, Desa Bandar, Kec. Bandar, Kab. Pacitan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
48	Desa Berseri Tingkat Pratama, Desa Arjowinangun, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
49	Adiwiyata Tingkat Provinsi, SDN Baleharjo 2	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur

NO	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	INSTANSI PEMBERI
50	Adiwiyata Tingkat Provinsi, SMPN Pringkuku	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
51	Adiwiyata Tingkat Provinsi, SMPN 4 Pacitan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
52	Desa Berseri Tingkat Provinsi Kategori Mandiri, Desa Bangunsari Kec. Bandar, Kab. Pacitan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
53	Desa Berseri Tingkat Provinsi Kategori Madya, Desa Arjowinangun Kec. Pacitan, Kab. Pacitan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
54	Desa Berseri Tingkat Provinsi Kategori Pratama, Desa Punung Kec. Punung, Kab. Pacitan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
55	Desa Berseri Tingkat Provinsi Kategori Pratama, Desa Cokrokembang Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
56	Desa Berseri Tingkat Provinsi Kategori Pratama, Desa Donorojo Kec. Donorojo, Kab. Pacitan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
57	Desa Berseri Tingkat Provinsi Kategori Pratama, Desa Tambakrejo Kec. Pacitan, Kab. Pacitan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
58	Adiwiyata Provinsi, SMA Negeri Tulakan	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
59	Adiwiyata Provinsi, SMPN 2 Kebonagung	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
60	Adiwiyata Provinsi, SMKN Pringkuku	Tingkat Propinsi	Gubernur Jawa Timur
61	Lomba Pidato Bahasa Indonesia Dalam Rangka HAN	Juara 1 Tingkat Propinsi	
62	Lomba Karya Ilmiah Duta Sanitasi	Juara 1 Tingkat Propinsi	
63	Lomba Poster	Juara 1 Tingkat Propinsi	
64	O2SN Bidang Lomba Bulu Tangkis	Juara 1 Tingkat Propinsi	
65	Lomba Anugerah Konstitusi Guru PKN	Juara 1 Tingkat Propinsi	
66	Lomba Mading Adiwiyata	Juara 1 Tingkat Propinsi	
67	Joinery	Juara 1 Tingkat Propinsi	
68	Led. Dressmaking	Juara 1 Tingkat Propinsi	
69	Wood Craft	Juara 1 Tingkat Propinsi	

NO	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	INSTANSI PEMBERI
70	Lomba PTK Paud Dikmas	Juara 2 Tingkat Propinsi	
71	Pertandingan Sepak Takraw Antar Pelajar SMA/SMK Sederajat	Juara 2 Tingkat Propinsi	
72	Leather Craft	Juara 2 Tingkat Propinsi	
73	Fishery	Juara 2 Tingkat Propinsi	
74	Cabinet Making	Juara 2 Tingkat Propinsi	
75	Cipta Baca Puisi	Juara 2 Tingkat Propinsi	
76	O2SN SMP Bidang Lomba Catur	Juara 3 Tingkat Propinsi	
77	Lomba Menyanyi Tunggal Dalam Rangka HAN	Juara 3 Tingkat Propinsi	
78	Tekstil	Juara 3 Tingkat Propinsi	
79	Lomba Menyanyi Tunggal Dalam Rangka HAN	Juara Harapan 2 Tingkat Propinsi	
80	FLS2N SMA Bidang Seni Kriya	Juara Harapan 2 Tingkat Propinsi	
81	10 Penyaji Unggulan Dalam Jatim Night Specta Di Kabupaten Blitar 2016		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
82	Raki Favorit Jawa Timur 2016 Dalam Pemilihan Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur 2016		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
83	Lomba Kinerja Kelembagaan Perikanan Budidaya		Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Jawa Timur
84	Lomba Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)		Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Jawa Timur
85	Juara li Pokmaswas Bidang Pelestarian Sumberdaya Perairan		Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Jawa Timur
86	OSN SMA Bidang Studi Matematika		Mewakili Propinsi Jawa Timur Ke Tingkat Nasional
87	OSN SMA Bidang Studi Biologi		Mewakili Propinsi Jawa Timur Ke Tingkat Nasional

NO	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	INSTANSI PEMBERI
88	Juara 1 Lomba Perawat/Bidan Teladan Di Puskesmas Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016		Pemerintah Provinsi Jawa Timur
89	Pelaksana Terbaik Desa/Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Tahun 2016		Pemerintah Provinsi Jawa Timur
90	Juara I Lomba Agribisnis Biofarmaka Tingkat Provinsi Jawa Timur		Provinsi Jawa Timur (Gubernur Jawa Timur)
99	Juara I UP2K PKK TK. Provinsi Jawa Timur		TP-PKK Provinsi Jawa Timur
100	Terbaik I Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016		TP-PKK Provinsi Jawa Timur
101	Juara I Kategori Penghargaan Kreatifitas Menu Seimbang Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Sumberdaya Lokal Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016		TP-PKK Provinsi Jawa Timur
102	Juara II Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur		TP-PKK Provinsi Jawa Timur

Lampiran I

Rencana Strategis Pemerintah

Kabupaten Pacitan

Lampiran II

Rencana Kinerja Pemerintah

Kabupaten Pacitan Tahun 2016

Lampiran III

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Lampiran IV
Pengukuran Kinerja
Tahun 2016

Lampiran V
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Pacitan
Tahun 2011-2016

Lampiran VI

Daftar Penghargaan
(Hasil Capaian Kinerja)
Yang Diterima Oleh Pemerintah
Kabupaten Pacitan Tahun 2016



BUPATI PACITAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDARTATO

Jabatan : BUPATI PACITAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pacitan, Januari 2016



PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA

Misi 1 : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	6,75
2.	Tercapainya SPM daerah	Prosentase SPM yang mencapai target	82,00
3.	Terselenggaranya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	100
4.	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	Opini audit BPK: WTP (wajar tanpa pengecualian)	WTP

Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya perilaku hidup sehat	Prosentase penduduk yang menggunakan jamban	90,00
		Prosentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	64
2.	Terciptanya lingkungan sehat	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	41,58
		Skor Evaluasi Adipura	79,00
3.	Meningkatnya pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72,00
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,44

Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	
		- SD/MI	100
		- SMP/MTs	100
2.	Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	Angka rata-rata lama sekolah	7,08
3.	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Angka Melek Huruf	91,65
		Angka Kelulusan:	
		- SD/MI	100
		- SMP/MTs	99,93
		- SMA/SMK/MA	99,91

Misi 4: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	3
2.	Ketersediaan pangan daerah	Penguatan cadangan pangan	65
3.	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	Prosentase koperasi aktif	90,74
		Jumlah UMKM	22.198
4.	Pemasaran komoditas daerah	Omset penjualan komoditas unggulan (Milyar)	610

Misi 5: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	% jalan dan jembatan dalam kondisi baik:	
		- jalan	54,50
		- jembatan	92,30
		Jumlah Terminal Bis/Sub Terminal	6
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	73,49
		Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	18,77

Misi 6: Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	Angka kriminalitas	1,5
		Indek Pembangunan Manusia (IPM)	73,41
2.	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80
		Prosentase kader bina ketahanan keluarga	92,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.183.812.500,00
2	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	715.000.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	325.000.000,00
4	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	678.881.000,00
5	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.684.600.000,00
6	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	334.302.000,00
7	program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	602.628.000,00
8	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	648.819.000,00
9	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	4.785.690.500,00
10	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	720.000.000,00
11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	160.000.000,00
12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	8.260.815.165,00
13	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3.004.944.500,00
14	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	535.000.000,00
15	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	2.771.610.000,00
16	Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan	115.000.000,00
17	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	2.200.000.000,00
18	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	250.000.000,00
19	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	385.000.000,00
20	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	47.758.798,00
21	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	320.000.000,00
22	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	70.000.000,00
23	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	50.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
24	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan	75.000.000,00
25	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	613.660.000,00
26	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	400.000.000,00
27	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	225.000.000,00
28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	160.000.000,00
29	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	633.139.000,00
30	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	810.000.000,00
31	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	1.300.086.701,00
32	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.294.516.500,00
33	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur	344.000.000,00
34	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	295.775.000,00
35	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	559.225.000,00
36	Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SOP	150.000.000,00
37	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.784.881.000,00
38	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.614.827.152,00
39	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.025.000.000,00
40	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6.399.262.000,00
41	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	602.000.000,00
42	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	35.000.000,00
43	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	32.000.000,00
44	Program Kelitbang	1.411.000.000,00
45	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	171.000.000,00
46	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.414.899.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
47	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	2.377.030.000,00
48	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	13.320.047.500,00
49	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	990.000.000,00
50	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah`	3.335.000.000,00
51	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	213.250.000,00
52	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	520.000.000,00
53	Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SPM	15.000.000,00
54	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	795.000.000,00
55	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	430.000.000,00
56	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	661.075.000,00
57	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	760.000.000,00
58	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1.150.000.000,00
59	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	465.000.000,00
60	Program Pendidikan Politik Masyarakat	375.000.000,00
61	Program Pengembangan Nilai Budaya	360.000.000,00
62	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	85.000.000,00
63	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.150.000.000,00
64	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	495.000.000,00
65	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	425.000.000,00
66	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	180.000.000,00
67	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	320.000.000,00
68	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.636.050.000,00
69	Program Pengembangan Kemitraan	1.037.710.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
70	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	20.000.000,00
71	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	414.000.000,00
72	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	230.000.000,00
73	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	325.000.000,00
74	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	185.000.000,00
75	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.984.310.000,00
76	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	20.000.000,00
77	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	50.000.000,00
78	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	850.000.000,00
79	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	550.000.000,00
80	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100.000.000,00
81	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	330.000.000,00
82	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)	135.000.000,00
83	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	532.000.000,00
84	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	892.825.000,00
85	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	657.175.000,00
86	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	277.825.000,00
87	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	250.000.000,00
88	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	227.000.000,00
89	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	236.000.000,00
90	Program Keluarga Berencana	1.805.910.000,00
91	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	60.000.000,00
92	Program Pelayanan Kontrasepsi	225.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
93	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	1.846.200.000,00
94	Program Penataan Administrasi Kependudukan	812.000.000,00
95	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.813.608.000,00
96	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	765.409.450,00
97	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	160.000.000,00
98	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	680.000.000,00
99	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	255.000.000,00
100	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	658.000.000,00
101	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	53.000.000,00
102	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	497.675.600,00
103	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	659.000.000,00
104	Program Pengembangan data/informasi	170.000.000,00
105	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	165.000.000,00
106	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.090.000.000,00
107	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.210.000.000,00
108	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	1.335.000.000,00
109	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	1.120.000.000,00
110	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	46.618.956.871,00
111	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	2.400.000.000,00
112	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	10.973.880.000,00
113	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	1.289.877.600,00
114	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	4.480.000.000,00
115	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	32.299.845.352,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
116	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.200.000.000,00
117	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	925.000.000,00
118	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	580.000.000,00
119	Program Perencanaan Tata Ruang	1.060.000.000,00
120	Program Pemanfaatan Ruang	790.000.000,00
121	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	80.000.000,00
122	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10.200.000.000,00
123	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	97.906.405.167,00
124	Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	65.120.000,00
125	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	1.860.000.000,00
126	Program Pengendalian Banjir	1.265.000.000,00
127	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	18.180.802.500,00
128	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	22.148.709.410,00
129	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	68.525.000,00
130	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	43.100.000.000,00
131	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.517.770.000,00
132	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1.278.300.000,00
133	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	280.000.000,00
134	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	305.000.000,00
135	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	280.000.000,00
136	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	965.000.000,00
137	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	20.652.610.100,00
138	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	25.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
139	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	25.000.000,00
140	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	300.000.000,00
141	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.278.200.000,00
142	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21.767.018.000,00
143	Program Pendidikan Menengah	5.702.559.723,00
144	Program Pendidikan Non Formal	494.935.000,00
145	Program Pendidikan Luar Biasa	118.508.900,00
146	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.675.000.000,00
147	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.724.000.000,00

Pacitan, Januari 2016





BUPATI PACITAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDARTATO

Jabatan : BUPATI PACITAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pacitan, 03 - 10 - 2016



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA

Misi 1 : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	6,75
2.	Tercapainya SPM daerah	Prosentase SPM yang mencapai target	82,00
3.	Terselenggaranya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	100
4.	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	Opini audit BPK: WTP (wajar tanpa pengecualian)	WTP

Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya perilaku hidup sehat	Prosentase penduduk yang menggunakan jamban	90,00
		Prosentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	64
2.	Terciptanya lingkungan sehat	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	41,58
		Skor Evaluasi Adipura	79,00
3.	Meningkatnya pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72,00
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,44

Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	
		- SD/MI	100
		- SMP/MTs	100
2.	Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	Angka rata-rata lama sekolah	7,08
3.	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Angka Melek Huruf	91,65
		Angka Kelulusan:	
		- SD/MI	100
		- SMP/MTs	99,93
		SMA/SMK/MA	99,91

Misi 4: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	3
2.	Ketersediaan pangan daerah	Penguatan cadangan pangan	65
3.	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	Prosentase koperasi aktif	90,74
		Jumlah UMKM	22.198
4.	Pemasaran komoditas daerah	Omset penjualan komoditas unggulan (Milyar)	610

Misi 5: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	% jalan dan jembatan dalam kondisi baik:	
		- jalan	54,50
		- jembatan	92,30
		Jumlah Terminal Bis/Sub Terminal	6
		Jumlah rumah tangga pengguna listrik	73,49
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	18,77

Misi 6: Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	Angka kriminalitas	1,5
		Indek Pembangunan Manusia (IPM)	73,41
2.	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80
		Prosentase kader bina ketahanan keluarga	92,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	45.456.956.871	49.087.297.609
2	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	23.614.827.152	27.669.060.552
3	program pendidikan anak usia dini	3.278.200.000	3.652.336.000
4	program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	21.767.018.000	24.489.446.143
5	program pendidikan menengah	5.702.559.723	6.912.217.923
6	program pendidikan non formal	494.935.000	532.399.000
7	program pendidikan luar biasa	118.508.900	118.508.900
8	program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1.675.000.000	1.780.000.000
9	program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	613.660.000	613.660.000
10	program manajemen pelayanan pendidikan	1.724.000.000	1.769.000.000
11	program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.200.000.000	2.300.000.000
12	program obat dan perbekalan kesehatan	7.517.770.000	6.998.752.000
13	program upaya kesehatan masyarakat	18.180.802.500	37.682.362.837
14	program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1.098.300.000	1.273.300.000
15	program perbaikan gizi masyarakat	280.000.000	290.000.000
16	program pengembangan lingkungan sehat	305.000.000	365.000.000
17	program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	280.000.000	320.000.000
18	program standarisasi pelayanan kesehatan	965.000.000	1.140.000.000
19	program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	20.652.610.100	18.793.003.370
20	program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	25.000.000	25.000.000
21	program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25.000.000	25.000.000
22	program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	300.000.000	1.424.020.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
23	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	22.148.709.410	21.408.741.410
24	program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	68.525.000	27.650.000
25	program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	43.100.000.000	54.100.000.000
26	program peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran	1.162.000.000	1.412.000.000
27	program pembangunan jalan dan jembatan	10.200.000.000	10,200.000.000,00
28	program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	97.906.405.167	113.960.649.484
29	program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	65.120.000	65.120.000
30	program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.860.000.000	1.910.000.000
31	program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	10.973.880.000	15.232.831.000
32	program pengendalian banjir	1.265.000.000	1.465.000.000
33	program pembangunan infrastruktur perdesaan	32.299.845.352	85.898.453.761
34	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.183.812.500	1.350.729.900
35	program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.400.000.000	5.295.000.000
36	program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1.289.877.600	1.289.877.600
37	program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	4.480.000.000	8.775.000.000
38	program pemberdayaan komunitas perumahan	2.200.000.000	4.220.000.000
39	program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	580.000.000	605.000.000
40	program perencanaan tata ruang	1.060.000.000	1.060.000.000
41	program pemanfaatan ruang	790.000.000	790.000.000
42	program pengendalian pemanfaatan ruang	80.000.000	80.000.000
43	program pengembangan data/informasi	170.000.000	240.000.000
44	program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	165.000.000	165.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
45	program perencanaan pembangunan daerah	2.090.000.000	2.290.000.000
46	program perencanaan pembangunan ekonomi	1.210.000.000	1.335.000.000
47	program perencanaan sosiasi dan budaya	1.335.000.000	1.435.000.000
48	program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1.120.000.000	1.195.000.000
49	program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	680.000.000	760.398.100
50	program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	255.000.000	255.000.000
51	program peningkatan pelayanan angkutan	658.000.000	658.000.000
52	program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	53.000.000	53.000.000
53	program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	497.675.600	459.351.600
54	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	659.000.000	659.000.000
55	program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.813.608.000	1.785.463.000
56	program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	765.409,450,00	984.071.157
57	program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	160.000.000	185.000.000
58	program penataan administrasi kependudukan	812.000.000	942.000.000
59	program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	227.000.000	382.000.000
60	program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	236.000.000	281.000.000
61	program keluarga berencana	1.805.910.000	2.319.468.637
62	program kesehatan reproduksi remaja	60.000.000	60.000.000
63	program pelayanan kontrasepsi	225.000.000	225.000.000
64	program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1.846.200.000	1.946.200.000
65	program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	550.000.000	555.000.000
66	program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100.000.000	100.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
67	program pembinaan panti asuhan/panti jompo	330.000.000	348.130.000
68	program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	135.000.000	160.000.000
69	program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	532.000.000	532.000.000
70	program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	892.825.000	4.057.320.000
71	program peningkatan kesempatan kerja	657.175.000	817.613.700
72	program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	277.825.000	277.825.000
73	program pengembangan wilayah transmigrasi	250.000.000	300.000.000
74	program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif	20.000.000	20.000.000
75	program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil	414.000.000	543.000.000
76	program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	230.000.000	330.000.000
77	program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	325.000.000	365.000.000
78	program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	185.000.000	185.000.000
79	program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	2.984.310.000	2.941.225.484
80	program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	20.000.000	50.000.000
81	program pengembangan industri kecil dan menengah	50.000.000	50.000.000
82	program pengembangan sentra-sentra industri potensial	850.000.000	466.537.900
83	program pengembangan nilai budaya	360.000.000	365.000.000
84	program pengelolaan kekayaan budaya	85.000.000	195.000.000
85	program pengelolaan keragaman budaya	1.150.000.000	1.220.000.000
86	program peningkatan peran serta kepemudaan	495.000.000	495.000.000
87	program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	425.000.000	445.000.000
88	program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	180.000.000	205.000.000
89	program pengembangan pemasaran	320.000.000	385.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
90	program pengembangan destinasi pariwisata	2.636.050.000	2.468.708.000
91	program pengembangan kemitraan	1.037.710.000	1.102.710.000
92	program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.910.000.000	1.955.000.000
93	program pengembangan wawasan kebangsaan	465.000.000	510.000.000
94	program pendidikan politik masyarakat	375.000.000	395.000.000
95	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2.584.881.000	3.111.181.000
96	program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal	430.000.000	430.000.000
97	program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	661.075.000	811.075.000
98	program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	795.000.000	786.000.000
99	program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dan SDM aparatur	332.000.000	302.000.000
100	program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	3.335.000.000	4.199.708.000
101	program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	213.250.000	243.250.000
102	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	6.399.262.000	7.019.262.000
103	program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2.414.899.000	2.767.199.000
104	program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	520.000.000	550.000.000
105	program penataan peraturan perundang-undangan	990.000.000	1.215.000.000
106	program penetapan dan pengendalian penerapan SPM	15.000.000	15.000.000
107	program penetapan dan pengendalian penerapan SOP	150.000.000	150.000.000
108	program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	13.320.047.500	16.954.644.900
109	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	12.294.516.500	13.853.436.500
110	program pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	2.377.030.000	2.751.316.000
111	program kelitbangan	1.411.000.000	1.561.300.000
112	program pengembangan	171.000.000	171.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
113	program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	602.000.000	602.000.000
114	program penataan dan pentempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	35.000.000	35.000.000
115	program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	32.000.000	32.000.000
116	program pembinaan dan pengembangan aparatur	2.025.000.000	1.953.095.080
117	program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	295.775.000	295.775.000
118	program peningkatan , iklim investasi dan realisasi investasi	559.225.000	584.850.000
119	program peningkatan kelembagaan daerah dan SDM aparatur	12.000.000	12.000.000
120	program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	1.300.086.701	1.376.603.701
121	program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	400.000.000	522.500.000
122	program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	225.000.000	260.000.000
123	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	160.000.000	235.000.000
124	program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	633.139.000	733.139.000
125	program peningkatan peran perempuan di pedesaan	810.000.000	810.000.000
126	program perbaikan sistem administrasi kearsipan	70.000.000	77.500.000
127	program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	50.000.000	50.000.000
128	program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	75.000.000	100.000.000
129	program peningkatan kesejahteraan petani	720.000.000	878.150.000
130	program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2.260.815.165	12.483.835.951
131	program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	3.004.944.500	4.120.549.500
132	program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	535.000.000	849.000.000
133	program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	250.000.000	250.000.000
134	program peningkatan produksi hasil peternakan	385.000.000	685.000.000
135	program peningkatan pemasaran hasil	47.758.798	47.758.798

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
136	program peningkatan penerapan teknologi peternakan	320.000.000	1.040.000.000
137	program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	160.000.000	160.000.000
138	program rehabilitasi hutan dan lahan	2.771.610.000	3.622.314.835
139	program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	115.000.000	115.000.000
140	program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	4.785.690.500	5.085.690.500
141	program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	715.000.000	935.000.000
142	program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	325.000.000	325.000.000
143	program pengembangan perikanan tangkap	1.684.600.000	1.634.600.000
144	program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	334.302.000	271.040.000
145	program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	602.628.000	627.628.000
146	program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	648.819.000	638.819.000

Pacitan, 03 - 10 - 2016

